



PEMERINTAH KABUPATEN
DHARMASRAYA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 dapat kami selesaikan tepat waktu. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas



Annisa Suci Ramadhani, S.H., LL.M.
Bupati Dharmasraya

Leli Arni, S.Pd., M.Si.
Wakil Bupati Dharmasraya

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Laporan Kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya jangka waktu 5 tahun periode 2021-2026. Materi laporan menguraikan capaian sasaran yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.

Substansi laporan ini tidak hanya mencerminkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menunjukkan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pemerintah yang lebih tinggi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Melalui laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang komprehensif agar ke depan dapat tercipta sinergi yang lebih baik antara aspek perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari peran serta dan kerja sama berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan yang

telah berkontribusi dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya, mulai dari tahap perumusan kebijakan hingga implementasi dan pengawasannya. Dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak sangat berperan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 ini tidak hanya menjadi media pertanggungjawaban kinerja, tetapi juga dapat menjadi instrumen evaluasi dan perbaikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kami juga berharap laporan ini dapat semakin memperkuat komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam memberikan pelayanan yang berkualitas serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa yang akan datang. Atas kontribusi dan kerja sama dari semua pihak dalam penyusunan laporan ini, kami mengucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.

Pulau Punjung, 31 Maret 2026



ANNISA SUCI RAMADHANI, S.H., LL.M

EXECUTIVE SUMMERY

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya 2021-2026. Keberhasilan/kegagalan tersebut diukur berdasarkan pencapaian 18 sasaran strategis dengan 33 indikator kinerja utama yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2025. Dari 33 indikator kinerja utama, sebanyak 18 indikator kinerja utama mencapai keberhasilan dengan kategori memuaskan, sebanyak 11 indikator kinerja utama mencapai keberhasilan dengan kategori sangat berhasil, 1 indikator kinerja utama mencapai keberhasilan dengan kategori berhasil, sebanyak 1 indikator kinerja utama mencapai keberhasilan dengan kategori Cukup berhasil dan 2 indikator kinerja utama yang tidak bisa dilakukan pengukuran kinerja.

Sasaran Strategis **“Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan”** yang di ukur oleh indikator kinerja kesesuaian pemanfaatan ruang berhasil dengan capaian kinerja tertinggi sebesar 136,38%. Akan tetapi, sasaran strategis **“Birokrasi yang bersih dan akuntabel”** juga yang di ukur oleh indikator kinerja Nilai LPPD dengan capaian kinerja terendah sebesar 71,13%.

Rincian pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

Tujuan I : Terwujudnya Penyediaan Infrastruktur Secara Merata and Berkualitas

Sasaran I : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKAT
1	Rasio kemantapan jalan kabupaten	60%	54.88	91.47	Sangat Berhasil
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	92%	89.79	97.6	Sangat Berhasil
3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	95%	92.45	97.32	Sangat Berhasil

Sasaran II : Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKAT
4	Persentase lingkungan permukiman kumuh	69.76%	69.99	100.33	Memuaskan
5	Rasio pemukiman layak huni	90.00%	86.32	95.91	Sangat Berhasil

Sasaran III : Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKAT
6	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	80.00%	93.26	116.57	Memuaskan
7	Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	0%	-	0.00	Tidak Ada Penilaian

Tujuan II : Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia**Sasaran IV : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKAT
8	Angka Harapan Hidup	74.5 Tahun	74.34 Tahun	99.79	Sangat Berhasil

Sasaran V : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKAT
9	Angka rata-rata lama sekolah	8.98 Tahun	9.31 Tahun	103.67	Memuaskan
10	Harapan lama sekolah	12.89 Tahun	13.02 Tahun	101.01	Memuaskan

Sasaran VI : Meningkatnya peran perempuan dalam Pembangunan

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKAT
11	Indeks Pembangunan Gender	89.5	89.71	100.23	Memuaskan

Tujuan III : Meningkatnya Perekonomian yang Inklusif, Berkualitas dan Berdaya Saing**Sasaran VII : Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah**

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKAT
12	PDRB Per Kapita	58.71 Juta Rupiah	62.048 Juta Rupiah	105.69	Memuaskan
13	Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	8.83%	10.89	123.32	Memuaskan

Sasaran VIII : Mengurangi pengangguran

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKAT
14	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6.00%	5.51	108.17	Memuaskan

Sasaran IX : Mengurangi Kemiskinan

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKAT
15	Tingkat Kemiskinan	5.32%	4.61	113.35	Memuaskan

Tujuan IV : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**Sasaran X : Birokrasi yang bersih dan akuntabel**

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKAT
16	Indeks perilaku antikorupsi	3.578	3.85	108.17	Memuaskan
17	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	100.00	Memuaskan*
18	Hasil evaluasi AKIP	70 (BB)	67.42 (B)	96.31	Sangat Berhasil
19	Nilai LPPD	3.800	2.7029	71.13	Cukup Berhasil

Sasaran XI : Birokrasi yang berkualitas

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKAT
20	Indeks Kelembagaan	0	-	0	Tidak Ada Penilaian
21	Indeks SPBE	3.61	3.61	100.00	Memuaskan
22	Indeks Profesionalisme ASN	82.77	82.23	99.35	Sangat Berhasil

Sasaran XII : Pelayanan publik yang prima

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKAT
23	Publik service indeks	3.3	4.25	128.79	Memuaskan
24	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.00%	89.94	105.81	Memuaskan

Tujuan V : Meningkatnya Kemampuan Nagari dalam Pengelolaan Pemerintahan dan Potensi Sumber Daya Nagari**Sasaran XIII : Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari**

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKAT
25	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	0.8651	0.8041	92.95	Sangat Berhasil
26	Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	0.7798	0.7582	97.23	Sangat Berhasil
27	Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	0.7154	0.7068	98.8	Sangat Berhasil

Tujuan VI : Terwujudnya Pembangunan Berbasis Lingkungan (*Green Development*)**Sasaran XIV : Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan**

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKAT
28	Kesesuaian pemanfaatan ruang	10%	27.17%	136.38	Memuaskan

Sasaran XV : Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKAT
29	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66.47	72.89	109.66	Memuaskan

Sasaran XVI : Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKAT
30	Indeks Resiko Bencana Daerah	115	134.81	82.77	Berhasil

Tujuan VII : Meningkatkan Pembangunan Mental dan Kehidupan Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Agama, Adat, dan Budaya**Sasaran XVII : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat**

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKAT
31	Persentase peningkatan zakat	20	20.48	102.39	Memuaskan
32	Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	100	90.48	90.48	Sangat Berhasil

Sasaran XVIII : Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKAT
33	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	2 Nagari	2 Nagari	100	Memuaskan

Rincian Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

NO	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	Rata-Rata Capaian Kinerja	Tingkat Efisien	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	69.10	95.46%	26.36	EFISIEN
2	Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	97.30	98.12%	0.82	EFISIEN
3	Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air	99.83	116.57%	16.74	EFISIEN
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	35.95	99.76%	63.81	EFISIEN
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	31.16	102.34%	71.18	EFISIEN

NO	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	Rata-Rata Capaian Kinerja	Tingkat Efisien	Keterangan
6	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	74.44	100.24%	25.80	EFISIEN
7	Meningkatkan pendapatan Masyarakat dan daya saing daerah	95.39	114.50%	19.11	EFISIEN
8	Mengurangi pengangguran	72.77	108.17%	35.40	EFISIEN
9	Mengurangi kemiskinan	93.58	113.35%	19.77	EFISIEN
10	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	56.95	93.76%	36.81	EFISIEN
11	Birokrasi yang berkualitas	88.30	99.67%	11.37	EFISIEN
12	Pelayanan publik yang prima	2.50	117.30%	114.80	EFISIEN
13	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	89.36	100%	10.64	EFISIEN
14	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	28.65	136.68%	108.03	EFISIEN
15	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	91.23	109.66%	18.43	EFISIEN
16	Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	79.00	82.77%	3.77	EFISIEN
17	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	70.09	96.43%	26.34	EFISIEN
18	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	88.88	100%	11.12	EFISIEN
Total		66.80	105%	57.47	56.72 (EFISIEN)

Efisiensi penggunaan anggaran diukur berdasarkan formula yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021, dengan mempertimbangkan pencapaian terhadap 18 sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, telah dinyatakan efisien. Hal ini mencerminkan bahwa secara agregat, penggunaan anggaran memenuhi prinsip efisiensi sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran tahun 2025 berada dalam kategori efisien sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
EXECUTIVE SUMMARY	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 SEJARAH SINGKAT KABUPATEN DHARMASRAYA.....	1
1.3 GAMBARAN UMUM DAERAH	2
1.4 PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA.....	3
1.4.1 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	3
1.4.2 SUMBER DAYA APARATUR.....	5
1.5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA.....	5
1.5.1 PERMASALAHAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA	6
1.5.2 ISU STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA.....	6
1.6 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA.....	7
1.7 MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.7.1 MAKSUD	7
1.7.2 TUJUAN.....	8
1.8 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN SEBELUMNYA.....	8
1.9 SISTEMATIKA PENYAJIAN	13
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH.....	14
2.1.1 VISI	14
2.1.2 MISI	14
2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	15
2.2 PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025..	16
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA.....	20
3.1.1 Metode Perhitungan Kinerja.....	20
3.1.2 Kategori Capaian Kinerja	21
3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA	22
3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA	25
3.4 PROGRAM UNGGULAN BUPATI TAHUN 2025 YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA.....	142

3.5 ANALISIS EFISIENSI PELAKSANAAN PROGRAM.....	176
3.5.1 ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS.....	176
3.5.2 ANALISIS EFISIENSI CAPAIAN KINERJA	177
3.6 REALISASI ANGGARAN.....	180
3.6.1 LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025	180
3.6.2 PROGRAM PER SASARAN STRATEGIS	183
BAB 4. PENUTUP	190

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai menurut Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.....	5
Tabel 1.2 Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025	9
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Kinerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.....	15
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya tahun 2025	22
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan target tahun 2025.....	26
Tabel 3.3 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	26
Tabel 3.4 Daftar Pembangunan, Pemeliharaan Jalan dan Rehabilitasi Jembatan Tahun 2025.....	28
Tabel 3.5 Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten	29
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan berdasarkan target tahun 2025	30
Tabel 3.7 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	31
Tabel 3.8 Cakupan Pelayanan Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak Tahun 2025	32
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. berdasarkan target tahun 2025	33
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan selama 4 tahun terakhir	34
Tabel 3.11 Akses Limbah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025	35
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh berdasarkan target tahun 2025.....	37
Tabel 3.13 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	37
Tabel 3.14 Data Kawasan Lingkungan Kumuh Tahun 2025.....	38
Tabel 3.15 Capaian Kinerja Rasio Pemukiman Layak Huni berdasarkan target tahun 2025	40
Tabel 3.16 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rasio Pemukiman Layak Huni Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	40
Tabel 3.17 Capaian Kinerja Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik berdasarkan target tahun 2025.....	43
Tabel 3.18 Capaian Kinerja Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir.....	43

Tabel 3.19 Perbandingan luas daerah irigasi dalam kondisi baik dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2025.....	44
Tabel 3.20 Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup berdasarkan target tahun 2025	46
Tabel 3.21 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	47
Tabel 3.22 Kinerja Dinas Kesehatan yang mendukung pencapaian indikator Kinerja Angka Harapan Tahun 2025.....	48
Tabel 3.23 Upaya Yang Telah Dilaksanakan dalam Mendukung Peningkatan Usia Harapan Hidup	51
Tabel 3.24 Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah berdasarkan target tahun 2025.....	52
Tabel 3.25 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 5 (lima) Tahun Terakhir.....	53
Tabel 3.26 Jumlah Penduduk 15 Tahun keatas berdasarkan Pendidikan yang diselesaikan Tahun 2025.....	54
Tabel 3.27 Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah berdasarkan target tahun 2025	55
Tabel 3.28 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	56
Tabel 3.29 data APK, APM, dan APS di Kabupaten Dharmasraya tahun 2025.....	58
Tabel 3.30 Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender berdasarkan target tahun 2025.....	59
Tabel 3.31 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 5 (Lima) Tahun Terakhir	59
Tabel 3.32 Indikator Perhitungan IPG menurut Jenis Kelamin (Usia Harapan Hidup, Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pendapatan) Tahun 2025.....	61
Tabel 3.33 Capaian Kinerja PDRB Per Kapita berdasarkan target tahun 2025.....	62
Tabel 3.34 Perbandingan Antara Capaian Kinerja PDRB Per Kapita Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	63
Tabel 3.35 Perbandingan Kinerja PDRB Per Kapita Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat	63
Tabel 3.36 Capaian Kinerja Rasio Net Ekspor Terhadap PDRB berdasarkan target tahun 2025	67
Tabel 3.37 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rasio Net Ekspor Terhadap PDRB Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (empat) Tahun Terakhir.....	68
Tabel 3.38 Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan target tahun 2025.....	72
Tabel 3.39 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (empat) Tahun Terakhir.....	72
Tabel 3.40 Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan berdasarkan target tahun 2025	75

Tabel 3.41 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (EMPAT) Tahun Terakhir	76
Tabel 3.42 Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja pengentasan kemiskinan.....	78
Tabel 3.43 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2, dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2025.....	79
Tabel 3.44 Capaian Kinerja Indeks Perilaku Antikorupsi berdasarkan target tahun 2025.....	82
Tabel 3.45 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Perilaku Antikorupsi Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (empat) Tahun Terakhir.....	82
Tabel 3.46 Upaya yang telah dilakukan untu mencapai Indeks Perilaku Antikorupsi tahun 2025	83
Tabel 3.47 Capaian Kinerja Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan berdasarkan target tahun 2025.....	86
Tabel 3.48 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	87
Tabel 3.49 Perbandingan antara target kinerja Hasil Evaluasi AKIP dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025	90
Tabel 3.50 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	90
Tabel 3.51 Komponen Penilaian SAKIP.....	92
Tabel 3.52 Capaian Kinerja LPPD berdasarkan target tahun 2025	94
Tabel 3.53 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Nilai LPPD Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 5 (Lima) Tahun Terakhir	95
Tabel 3.55 Capaian Kinerja Indeks SPBE berdasarkan target tahun 2025.....	98
Tabel 3.56 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks SPBE Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 5 (Lima) Tahun Terakhir	98
Tabel 3.57 Upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai kinerja Peningkatan Indeks SPBE ..	99
Tabel 3.58 Capaian Kinerja Indeks Profesionalisme ASN berdasarkan target tahun 2025.....	103
Tabel 3.59 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 5 (Lima) Tahun Terakhir	103
Tabel 3.60 Indeks Profesionalisme ASN Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN 2025	104
Tabel 3.61 Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja Indeks Profesionalisme ASN ..	105
Tabel 3.62 Capaian Publik Servis Indeks berdasarkan target tahun 2025.....	108
Tabel 3.63 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Publik Service Indeks Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (empat) Tahun Terakhir.....	108
Tabel 3.64 Hasil Indeks Pelayanan Publik 2025 Kabupaten/ Kota Se- Provinsi Sumatera Barat	109

Tabel 3.65 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan target tahun 2025	110
Tabel 3.66 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	111
Tabel 3.67 Capaian Kinerja berdasarkan target tahun 2025.....	114
Tabel 3.68 Capaian Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan target tahun 2025..	118
Tabel 3.69 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir	118
Tabel 3.70 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berdasarkan target tahun 2025	121
Tabel 3.71 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 5 (Lima) Tahun Terakhir.....	121
Tabel 3.72 Capaian Kinerja Indeks Resiko Bencana Daerah berdasarkan target tahun 2025	125
Tabel 3.73 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Resiko Bencana Daerah Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 5 (Lima) Tahun Terakhir	125
Tabel 3.74 Rekomendasi Perbaikan Indeks Resiko Bencana Daerah	129
Tabel 3.75 Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Zakat berdasarkan target tahun 2025.....	131
Tabel 3.76 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Zakat Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir	132
Tabel 3.77 Penyaluran Badan Amil Zakat Kabupaten Dharmasraya	132
Tabel 3.78 Capaian Kinerja Persentase MDA/TPA/TPSA Yang Aktif berdasarkan target tahun 2025.....	136
Tabel 3.79 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase MDA/TPA/TPSA Yang Aktif Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 5 (Lima) Tahun Terakhir.....	136
Tabel 3.80 Capaian Kinerja Jumlah Nagari Beradat Dan Berbudaya berdasarkan target tahun 2025.....	139
Tabel 3.81 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Jumlah Nagari Beradat Dan Berbudaya Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	139
Tabel 3.82 Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai nagari beradat dan berbudaya	140
Tabel 3.83 Progul Bupati Tahun 2025 Yang Mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur	142
Tabel 3.84 Progul Bupati Tahun 2025 Yang Mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Perumahan Serta Prasarana Dan Sarana Pada Kawasan Pemukiman.....	149
Tabel 3.85 Progul Bupati Tahun 2025 Yang Mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air	150
Tabel 3.86 Progul Bupati Tahun 2025 Yang Mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.....	152

Tabel 3.87 Progul Bupati Tahun 2025 Yang Mendukung Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat.....	153
Tabel 3.88 Progul Bupati Tahun 2025 Yang Mendukung Sasaran Strategis Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Daya Saing Daerah	156
Tabel 3.89 Progul Bupati Tahun 2025 Yang Mendukung Sasaran Strategis Mengurangi Pengangguran.....	166
Tabel 3.90 Progul Bupati Tahun 2025 Yang Mendukung Sasaran Strategis Mengurangi Kemiskinan	166
Tabel 3.91 Progul Bupati Tahun 2025 Yang Mendukung Sasaran Strategis Birokrasi yang berkualitas	171
Tabel 3.92 Progul Bupati Tahun 2025 Yang Mendukung Sasaran Strategis Pelayanan Publik yang Prima.....	173
Tabel 3.93 Progul Bupati Tahun 2025 Yang Mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup.....	173
Tabel 3.94 ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025	176
Tabel 3.95 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025	178
Tabel 3.96 LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED ANGGARAN TAHUN 2025	180
Tabel 3.97 ANGGARAN DAN PROGRAM PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025.....	183

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perbandingan Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2025 (%)	26
Grafik 3.2 Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025	27
Grafik 3.3 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2025	31
Grafik 3.4 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2025	34
Grafik 3.5 Faktor Pendukung Pemukiman Layak Huni di Kabupaten Dharmasraya tahun 2026	41
Grafik 3.6 Perbandingan Kinerja Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2025	47
Grafik 3.7 Perbandingan Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional	53
Grafik 3.8 Perbandingan Kinerja Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional	57
Grafik 3.9 Perbandingan Kinerja Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional	60
Grafik 3.10 Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2026 (PDRB Dharmasraya)	65
Grafik 3.11 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2025.....	73
Grafik 3.12 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2025	77
Grafik 3.13 Persentase Penduduk Miskin Dharmasraya Usia 15 Tahun ke Atas menurut Status Bekerja, 2025.....	79
Grafik 3.14 Nilai SAKIP Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2025.....	90
Grafik 3.15 Nilai LPPD Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2025	95
Grafik 3.16 Indeks SPBE Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat Tahun 2025	99
Grafik 3.17 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	115
Grafik 3.18 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2025	122
Grafik 3.19 Indeks Kualitas Bencana Daerah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	126
Grafik 3.20 Tingkat Paparan Penduduk Dharmasraya terhadap Berbagai Bencana.....	126

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Birokrasi merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi berfungsi menerjemahkan keputusan politik menjadi kebijakan publik serta memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan secara operasional dalam pelayanan kepada masyarakat.

Birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sejumlah komponen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik adalah penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas. Tata kelola pemerintahan yang baik tentunya dimulai dari aparatur pemerintah.

1.2 SEJARAH SINGKAT KABUPATEN DHARMASRAYA

Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu Kabupaten di provinsi Sumatera Barat, Indonesia yang merupakan salah satu dari 3 Kabupaten baru hasil pemekaran di Sumatera Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003. Kabupaten ini lahir dari pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang terdiri dari 4 kecamatan dengan luas 2.961, 13 Km atau 296.113 Ha. Pada kawasan ini dahulunya pernah menjadi ibu kota dan pusat kerajaan Malayapura. Ibu kota Kabupaten Dharmasraya berada di Pulau Punjung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 2003, dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Dharmasraya dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo.

Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 wilayah administrasi Kecamatan dan 52 Nagari atau pemerintahan setingkat Desa. Selain itu untuk menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kabupaten (Pemerintah Kabupaten) Dharmasraya menerbitkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam Perda tersebut Pemerintah Kabupaten membentuk 18 dinas daerah, 3 (tiga) badan, dan 1 (Satu) kantor. Dengan komposisi tersebut diharapkan pelayanan kemasyarakatan, pembangunan dan pemerintahan dapat dilakukan dengan baik.

Dalam perkembangannya Kabupaten Dharmasraya terbentuk atas dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

1.3 GAMBARAN UMUM DAERAH

A. Geografi Kabupaten Dharmasraya

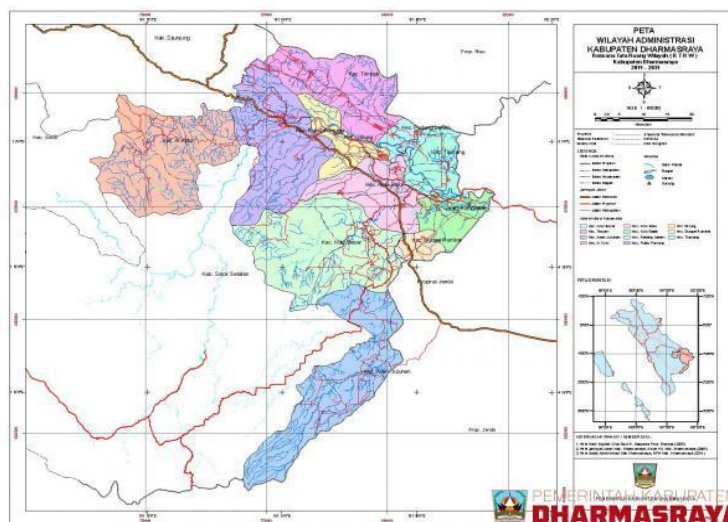
Secara geografis Kabupaten Dharmasraya berada pada posisi 00°47' LS – 1°04' LS dan 101°09' BT – 101°54' BT, Lintang Selatan (LS) dan, 1019' 21", BT -- 1010 54' 27", Bujur Timur (BT). Kabupaten Dharmasraya dilalui oleh jalur lalu lintas Sumatera dan berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Kab. Sawahlunto/Sijunjung dan Kab. Kuantan Singingi Propinsi Riau
- Sebelah Selatan dengan Kab. Bungo dan Kab. Kerinci Provinsi Jambi
- Sebelah Timur dengan Kab. Tebo dan Bungo Propinsi Jambi
- Sebelah Barat dengan Kab. Solok dan Solok Selatan.

Letak geografis Kabupaten Dharmasraya 00048'25,4"- 1041'40,3" LS dan 10108'32,5"- 101053'30,2" BT.. Luas wilayah berdasarkan Perda No 4 Tahun 2009 adalah 2.961,13 Km² (296.113 Ha). Sebesar 87,4% dari luas wilayahnya merupakan lahan pertanian, sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi citra spot 5 pada RTRW Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 3.025,99 km² (302.599 Ha). Perbedaan luas wilayah disebabkan perbedaan metode pengukuran antara data administratif Perda dan hasil digitasi citra satelit pada RTRW.

Peta Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1-1 Peta Kabupaten Dharmasraya



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa letak geografis Kabupaten Dharmasraya sangat strategis. Dengan posisi sangat strategis berada di segitiga emas Sumbar, Riau dan Jambi, persisnya di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Batas sebelah selatan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Batas sebelah timur dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan batas sebelah barat dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat.

B. Wilayah dan Geografi Ekonomi Kabupaten Dharmasraya

Suhu berkisar antara 21^o C -- 33^o C dengan rata-rata hari hujan 14,35 hari per bulan dan rata-rata curah hujan 265,36 mm per bulan. Kondisi topografi Kabupaten Dharmasraya bervariasi antara berbukit, bergelombang dan datar dengan variasi ketinggian dari 98,3 M sampai 1.525 M dari permukaan laut. Sebagian besar jenis tanah di Kabupaten Dharmasraya berjenis Podzolic Merah Kuning (PMK) yang didominasi oleh hutan hujan tropik dan perkebunan. Hutan seluas 133.186 Ha (44,98 %), perkebunan seluas 118.803 Ha (40,12 %) dan lain-lain sebesar (14,90 %).

Kabupaten Dharmasraya berkembang sebagai salah satu penghasil kelapa sawit atau buah pasir menurut istilah setempat. Di samping itu, Kabupaten ini juga merupakan produsen berbagai jenis tanaman keras lainnya, seperti kulit manis, karet, kelapa, gambir, kopi, cokelat, cengkih, dan pinang. Lahan perkebunan di sana lebih didominasi karet dan sawit. Penghasil kelapa sawit paling banyak di Kabupaten ini adalah Kecamatan Sungai Rumbai.

Selain itu terdapat potensi tambang yang hingga detik ini belum tergarap, yakni batu bara, batu kapur, pasir kuarsa, emas, lempung kuarsit, dan sebagainya. Kabupaten ini masih baru dan masih dalam tahap mengembangkan diri dengan membuka peluang investasi seluas-luasnya. Ditunjang dengan posisi strateginya di Sumatera (dilintasi Jalur Lintas Tengah Sumatera sepanjang 100 km), maka Dharmasraya cepat menjadi kawasan yang maju dan tumbuh sebagai wilayah perdagangan dan jasa.

C. Demografi Kabupaten Dharmasraya

Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 sebanyak 244.110 jiwa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Pulau Punjung, sedangkan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Rumbai (479 Jiwa/Km²). Sebagian besar wilayah Kabupaten Dharmasraya telah dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pertanian, mulai tanaman pangan, perkebunan dan perikanan yang mencapai 87,74 persen dari total luas wilayah.

Dilihat dari sisi kependudukan di Dharmasraya, komposisi penduduk menurut suku bangsa diperoleh data Suku Minang 62,93%, Suku Jawa 32,96%, Suku Sunda 1,49%, Suku Batak 0,88%, Melayu 0,71% dan Suku lainnya 1,03%. Berdasarkan distribusi penduduk menurut tingkat usia, diperoleh data angkatan kerja (15-59 tahun) sebanyak 104.123 jiwa (61,30%) dengan tingkat ketergantungan 63,15%.

1.4 PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA

1.4.1 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Guna mendukung implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016

tentang perangkat daerah implementasi peraturan tersebut mendasari pembentukan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Dharmasraya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagai Berikut:

1. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, membawahi:
 - a. Asisten Pemerintah dan Kesra, membawahi:
 - 1) Bagian Pemerintahan;
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 3) Bagian Hukum.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
 - 1) Bagian Perekonomian dan SDA,
 - 2) Bagian Administrasi pembangunan,
 - 3) Bagian pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Asisten Administrasi Umum membawahi:
 - 1) Bagian Umum dan Perlengkapan,
 - 2) Bagian Protokol dan TU Pimpinan,
 - 3) Bagian Organisasi.
2. Sekretariat DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD;
3. Inspektorat Daerah, dipimpin oleh Inspektur;
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dipimpin oleh Kepala Badan;
6. Badan Keuangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan;
7. Dinas Pendidikan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
8. Dinas Kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dipimpin oleh Kepala Dinas;
10. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
11. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas;
12. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dipimpin oleh Kepala Satuan;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh Kepala Dinas;
14. Dinas Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika, dipimpin oleh Kepala Dinas;
16. Dinas Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Kepala Dinas;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipimpin oleh Kepala Dinas;

19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
20. Dinas Pertanian, dipimpin oleh Kepala Dinas;
21. Dinas Pangan dan Perikanan , dipimpin oleh Kepala Dinas;
22. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dipimpin oleh Kepala Dinas;
23. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dipimpin oleh Kepala Kantor;
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan ;
25. Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur RSUD;
26. Kecamatan dipimpin oleh Camat terdiri dari 11 Kecamatan terdiri dari;
 - a. Kecamatan Sungai Rumbai membawahi 4 Nagari,
 - b. Kecamatan Koto Besar membawahi 7 Nagari,
 - c. Kecamatan Asam Jujuhan membawahi 5 Nagari,
 - d. Kecamatan Koto Baru membawahi 4 Nagari,
 - e. Kecamatan Koto Salak membawahi 5 Nagari,
 - d. Kecamatan Koto Tiumang membawahi 4 Nagari,
 - e. Kecamatan Koto Sitiung membawahi 4 Nagari,
 - f. Kecamatan Koto Timpeh membawahi 5 Nagari,
 - g. Kecamatan Padang Laweh membawahi 4 Nagari,
 - h. Kecamatan Pulau Punjung membawahi 6 Nagari,
 - i. Kecamatan Sembilan Koto membawahi 4 Nagari,
27. Nagari dipimpin oleh Wali Nagari terdiri dari 52 Nagari

1.4.2 SUMBER DAYA APARATUR

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai menurut Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

Kepegawaian	Σ Pegawai	Jenis Kelamin			Pendidikan			
		P	L	SD-SLTA	D1-D3	DIV/ S1	S2	S3
PNS	2976	2094	882	167	484	1996	326	3
P3K	2034	1634	400	0	469	1480	33	0
P3K Paruh Waktu	1316	638	678	662	140	514	0	0
TOTAL	6326	4366	1960	829	1093	3990	359	3

Sumber Data : BKPSDM Dharmasraya, 2025

1.5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Sedangkan isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat dimasa datang. Isu strategis juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang tidak dimanfaatkan.

1.5.1 PERMASALAHAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, atau kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan dapat juga dimaknai sebagai penyebab terjadinya kesenjangan tersebut, beberapa permasalahan di Kabupaten Dharmasraya sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah :

1. Permasalahan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup (infrastruktur)
2. Permasalahan pembangunan sumber daya manusia
3. Permasalahan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat
4. Permasalahan birokrasi pemerintahan daerah (birokrasi)

1.5.2 ISU STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk itu, isu-isu strategis akan di analisa dengan berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Identifikasi akan isu-isu strategis dalam pembangunan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi juga dikedepankan guna mencari alternatif solusi yang tepat yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Karena pada dasarnya salah satu dasar dalam proses perencanaan pembangunan adalah karena ditemuinya permasalahan-permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat. Berikut diuraikan isu-isu strategis pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 , antara lain :

1. Peningkatan ekonomi,
2. Pembenahan sektor kesehatan,
3. Peningkatan kualitas pendidikan,
4. Pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat khususnya yang terkait dengan kesehatan lingkungan dan;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Sedangkan Prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2023 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 akan lebih difokuskan pada 3 sektor yaitu;

1. Sektor pertanian,
2. Sektor industri pengolahan dan,
3. Sektor akomodasi dan makan minum dengan tetap tidak mengabaikan upaya pencegahan, pengendalian serta penanganan akibat pandemi covid-19 yang tidak akan bisa diprediksi kapan akan berakhir, serta

4. dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah

1.6 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 ini didasarkan kepada:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah;

1.7 MAKSUD DAN TUJUAN

1.7.1 MAKSUD

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 ini dimaksudkan untuk mengungkap pertanggungjawaban tingkat pencapaian pengukuran kinerja dan Evaluasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam mewujudkan Visi dan Misi berdasarkan pencapaian dan tujuan dan sasaran serta strategi berupa kebijakan da program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.

1.7.2 TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan LAKIP ini secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak terkait, meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten. Akhirnya penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat membantu upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.8 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN SEBELUMNYA

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Kota se Indonesia tahun 2025 belum di terbitkan, sehingga rencana tindak lanjut masih berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2025, Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/112/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, telah disusun tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

NO	REKOMENDASI LHE 2024	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan Pemda dan PD dengan menyusun pohon kinerja yang logis dan <i>cascading</i> (penjenjangan) kinerja mulai dari level tertinggi hingga terendah dengan memerhatikan <i>critical success factor</i> (CSF) dalam mencapai tujuan dan sasaran, sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis daerah. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan	1. Penyusunan RPJMD beriringan dengan Penyusunan Kerangka Logis dan Cascading yang memperhatikan CSF pada masing-masing Perangkat Daerah, selanjutnya dilakukan penyusunan Renstra, RKPD, Renja yang selaras.	4 Dokumen (Perda RPJMD, Perbup Renstra, RKPD, Renja)	Februari - Agustus 2025	BAPPERIDA
		2. Penyusunan turunan kinerja dari jenjang yang lebih tinggi dalam rangka pencapaian kinerja	37 OPD	Triwulan 1	
		3. Evaluasi triwulan terhadap indikator output dan outcome.	4 kali	Triwulan 1,2,3,4	
2	Melakukan identifikasi dan pemetaan pada <i>cascading</i> kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi <i>crosscutting</i> kinerja dengan tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja	1. Menentukan OPD yang mampu Kinerja Outcome atau Outcome Intermediate dalam rangka pemetaan <i>crosscutting</i>	2 kegiatan	Triwulan 1	BAPPERIDA DAN BAGIAN ORGANISASI
		2. identifikasi terhadap indikator kinerja yang berpotensi adanya irisan atau <i>Crosscutting</i> .			
3	Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan baik pada Pemda maupun PD dengan memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran	1. pelaksanaan review dokumen perencanaan kinerja mulai RPJMD, RENSTRA, RKPD DAN RENJA OPD	3 dokumen review	Triwulan 3	Inspektorat

NO	REKOMENDASI LHE 2024	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
	strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (<i>result oriented</i>) serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang SMART (<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound</i>) dan cukup untuk mengawal pencapaian kinerja. Selanjutnya, memastikan sasaran dan indikator kinerja tersebut sesuai dengan level jabatannya	2. Perbaiki dokumen perencanaan-an berdasarkan hasil review			
4	Mereview kembali rencana aksi yang disusun pada sebagian PD dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut	Pelaksanaan review rencana aksi yang telah disusun serta melakukan kegiatan penyelarasan rencana aksi dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam PK	38 OPD	triwulan 1 dan triwulan 4	Bagian Organisasi
5	Melakukan <i>monitoring</i> terhadap rencana aksi PD untuk memastikan kualitas pencapaian kinerjanya secara berkala	Pelaksanaan monitoring evaluasi rencana aksi perangkat daerah	4 kali	triwulan 1,2,3,4	Bagian Organisasi
6	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi E-Sakip Kabupaten Dharmasraya diikuti dengan sosialisasi kepada seluruh PD, serta memantau kepatuhan pengisian seluruh PD di aplikasi tersebut sebagai bagian dari untuk media pengumpulan data dan pengukuran kinerjanya secara <i>real time</i>	1. Koordinasi aplikasi E-SAKIP ke Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat.	2 Kali	Januari, Maret 2025	DISKOMINFO
		2. Bimtek Pengisian aplikasi e-SAKIP Dharmasraya.	1 Kali	April 2025	
		3. Monev Pengisian aplikasi e-SAKIP	3 Kali	Triwulan 2,3,4	

NO	REKOMENDASI LHE 2024	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
7	Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja agar tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja. Sehingga ketercapaian kinerja dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik	Penyusunan Anggaran dan review Anggaran fokus pada kinerja yang dilakukan saat penyusunan anggaran bersama tim TAPD	2 kali (perubahan 2024 dan anggaran 2025)	triwulan 4	Inspektorat
8	Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memastikan efisiensi anggaran telah mengukur seluruh biaya capaian kinerja	menambahkan pengukuran efisiensi anggaran dalam LAKIP Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah	39 Dokumen	Desember 2024	Bagian Organisasi
10	Meningkatkan kualitas Laporan Hasil Evaluasi AKIP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan pada seluruh aspek untuk meningkatkan kualitas implementasi	Memfokuskan memberikan rekomendasi pada LHE yang dikeluarkan oleh inspektorat pada aspek kualitas dan pemanfaatan kinerja	37 OPD	April- Juni 2025	Inspektorat
11	Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan PD dan melaporkan nya kepala pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	1. Setiap OPD diwajibkan untuk menyusun rencana tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat 2. Monitoring pelaksanaan rencana tindak lanjut Evaluasi Internal	4 kali	triwulan 1,2,3,4	Bagian Organisasi

NO	REKOMENDASI LHE 2024	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
12	Mendorong implementasi kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi AKIP internal sehingga akan mendorong percepatan peningkatan implementasi SAKIP di PD	Pembahasan bersama tim TAPD untuk kemungkinan menyusun SK Bupati atau Peraturan Bupati terkait penetapan reward dan Punishment dalam rangka percepatan peningkatan implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah	2 Kegiatan	Februari 2025	Bagian Organisasi
13	Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan professional judgement secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi real penerapan SAKIP setiap PD sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD	1. Konsultasi evaluator langsung ke Kementerian PAN RB untuk peningkatan kualitas Laporan Hasil Evaluasi.	1 kali	Triwulan 2	Inspektorat
		2. Diklat evaluator dalam meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal	6 Orang		
		3. Inspektorat membentuk tim review atau monitoring terhadap hasil evaluasi tim internal OPD	1 Tim	Triwulan 1	

1.9 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 ini menjelaskan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025. Capaian kinerja tersebut merupakan perbandingan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Analisis atas capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja memungkinkan diidentifikasi dari sejumlah celah kinerja guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Serta menguraikan mengenai rencana strategis, prioritas Nasional dan rencana kerja tahun bersangkutan serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja Organisasi.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada BAB ini disajikan data serta analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan dengan melakukan analisis yang memuat perbandingan antara target kinerja tahun -n dengan realisasi kinerja tahun -n, perbandingan antara capaian kinerja tahun -n dengan capaian kinerja 3 (tiga) tahun terakhir, perbandingan antara capaian kinerja sampai dengan tahun -n dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD, perbandingan antara capaian kinerja tahun -n dengan standar Nasional (jika ada), analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan menampilkan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun bersangkutan.

BAB IV Penutup

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala dan saran serta strategi yang dapat dilaksanakan untuk perbaikan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya

LAMPIRAN

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

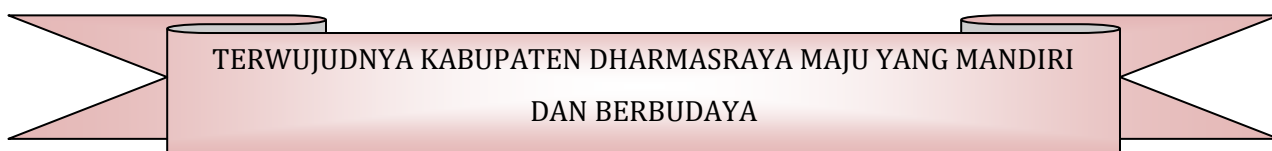
Penyusunan perencanaan kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 masih mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2025. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terkait penyampaian laporan kinerja Tahun 2025, yang menetapkan bahwa tahun pelaporan tersebut berada dalam masa transisi perencanaan. Oleh karena itu, penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tetap menggunakan sasaran, indikator kinerja, dan target yang tercantum dalam Renstra periode sebelumnya, sebagai dasar penilaian kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan dan konsisten.

2.1 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi dirumuskan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta selaras pula dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

2.1.1 VISI

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya 2021- 2026 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka menengah lima tahun.



Definisi kalimat Visi RPJMD :

Maju: Kabupaten Dharmasraya yang lebih baik sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial yang berdaya saing pada wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat

Mandiri: Kondisi daerah yang memiliki daya tahan sosial, ekonomi dan keuangan daerah, serta pelayanan publik yang memadai dengan pengelolaan sumber daya daerah secara optimal

Berbudaya Masyarakat yang melestarikan nilai dan tradisi multikultural dalam berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan Iman dan Taqwa

2.1.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan guna menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Adapun misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah

2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan kinerja menentukan tujuan, sasaran dan indikator sasaran sebagai alat ukur terhadap kinerja, tujuan dan sasaran kinerja Dharmasraya dijabarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Kinerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur
		2 Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman
		3 Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air
2	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	4 Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat
		5 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
		6 Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
3	Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing	7 Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah
		8 Mengurangi pengangguran
		9 Mengurangi kemiskinan
4	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik	10 Birokrasi yang bersih dan akuntabel
		11 Birokrasi yang berkualitas
		12 Pelayanan publik yang prima

5	Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari	13	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari
6	Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)	14	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan
		15	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup
		16	Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah
7	Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai nilai agama, adat, dan budaya	17	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat
		18	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agaman, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat

Sumber :RPJMD Dharmasraya Tahun 2021-2026

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya maka dapat disarikan delapan prioritas pembangunan yang disebut dengan astha utama kedua, dimana prioritas pembangunan ini menjadi dasar menyusun program pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju
3. Memajukan pendidikan yang berkarakter
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Pembangunan yang berkelanjutan
7. Membangkitkan identitas daerah
8. Membangun berbasis nagari

2.2 PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025

Penetapan kinerja bupati merupakan bagian penting dalam memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Proses ini bertujuan untuk menetapkan target kinerja yang jelas, terukur, dan relevan dengan visi, misi, serta program kerja pemerintahan daerah. Dengan adanya penetapan kinerja, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat.

Perjanjian Kinerja Bupati Dharmasraya tahun 2025 disusun berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.
3. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
4. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Penetapan indikator kinerja dan target kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SKPD Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	1	Rasio kemantapan jalan Kabupaten	60	DPUPR
		2	% rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	92	DPUPR
		3	% rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	95	DPUPR
2	Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	4	% lingkungan permukiman kumuh	69.76	PERKIMTAN
		5	Rasio pemukiman layak huni	90	PERKIMTAN
3	Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air	6	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	80	DPUPR
		7	Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	0	DPUPR
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	8	Angka Harapan Hidup	74.5	DINKES/BPS
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	9	Angka rata-rata lama sekolah	8.98	DISDIK/BPS
		10	Harapan lama sekolah	12.89	DISDIK/BPS
6	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	11	Indeks Pembangunan Gender	89.5	DINSOS/BPS

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SKPD Penanggung Jawab
7	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	12	PDRB Per Kapita	58.71	BAPPERIDA/ BPS
		13	Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	8.83	BAPPERIDA/ BPS
8	Mengurangi pengangguran	14	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6	NAKERTRAN S/BPS
9	Mengurangi kemiskinan	15	Tingkat Kemiskinan	5.32	BAPPERIDA/ BPS
10	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	16	Indeks perilaku antikorupsi	3.578	INSPEKTORA T
		17	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	BKD
		18	Hasil evaluasi AKIP	BB	SETDA
		19	Nilai LPPD	3.8	SETDA
11	Birokrasi yang berkualitas	20	Indeks Kelembagaan	0	-
		21	Indeks SPBE	3.61	KOMINFO
		22	Indeks Profesionalisme ASN	82.77	BKPSDM
12	Pelayanan publik yang prima	23	Publik service indeks	3.3	SETDA
		24	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	BAPPERIDA
13	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	25	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	0.8651	DPMD
		26	Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	0.7798	DPMD
		27	Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	0.7154	DPMD
14	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	28	Kesesuaian pemanfaatan ruang	20	PUPR
15	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	29	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66.47	DLH
16	Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	30	Indeks Resiko Bencana Daerah	115	BPBD
17	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	31	Persentase peningkatan zakat	20	SETDA/ BAZNAS
		32	Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	100	SETDA

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SKPD Penanggung Jawab
18	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	33	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	2	BUDPARPOR A

Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati Dharmasraya. 2025

Selama tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 dengan total belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar Rp . 1.040.327.621.311,0,-.

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tahun 2025 merupakan kewajiban Kepala Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Dharmasraya. Untuk mengukur pencapaian visi dan misi tersebut maka telah ditetapkan setiap tahunnya sasaran dan indikator kinerja Bupati ke dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah yang tertuang ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Sumber dana lainnya.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 secara umum menunjukkan perkembangan yang cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari sebagian besar indikator kinerja yang mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan program pembangunan daerah, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong pencapaian sasaran pembangunan. Namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian lebih lanjut sehingga pada tahun berikutnya diperlukan penguatan perencanaan, peningkatan kualitas pelaksanaan program, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja kepala dinas dengan Bupati. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud. digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya serta menganalisa penyebab keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

3.1.1 Metode Perhitungan Kinerja

a. Metode Perhitungan indikator Positif

Indikator positif adalah indikator yang menunjukkan kinerja semakin baik apabila nilai realisasi meningkat dan mendekati atau melampaui target.

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} \\ = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

b. Metode Perhitungan indikator Negatif

Indikator negatif adalah indikator yang menunjukkan kinerja semakin baik apabila nilai realisasi semakin rendah dari target.

Capaian Kinerja (%)

$$= (2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi} / \text{Rencana} \times 100\%$$

Atau dalam beberapa pedoman:

Capaian Kinerja (%)

$$= [\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) / \text{Target}] \times 100\%$$

c. Metode Perhitungan Tingkat Efisiensi

Tingkat Efisiensi dalam pengelolaan anggaran dapat dihitung menggunakan formula berikut, sebagaimana digunakan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \left(\frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \right) \times 100$$

- **PA (Pagu Anggaran)** merupakan total alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
- **CK (Capaian Kinerja)** dinyatakan dalam persentase, dengan batas maksimal perhitungan sebesar 120%.
- **RA (Realisasi Anggaran)** adalah jumlah anggaran yang telah digunakan dalam pelaksanaan program atau kegiatan.

Berdasarkan ketentuan, tingkat efisiensi memiliki rentang nilai antara **-20% hingga 20%**, di mana:

- Nilai **positif** menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran, yaitu capaian kinerja yang optimal dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari alokasi.
- Nilai **negatif** mengindikasikan adanya ketidakefisienan, yakni penggunaan anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh.

3.1.2 Kategori Capaian Kinerja

Untuk penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/ kegagalan capaian indikator kinerja. ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/ kegagalan sebagaimana tercantum pada table berikut ini :

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	>100%	Memuaskan
2	85% - 99.9%	Sangat Berhasil
3	75% - 84.9%	Berhasil
4	55% - 74.9%	Cukup Berhasil
5	<55%	Kurang Berhasil

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran pencapaian terhadap target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Tahun 2025 dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel di bawah ini. Tabel tersebut menyajikan data mengenai sejauh mana target indikator dari setiap sasaran strategis telah berhasil direalisasikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai capaian kinerja pemerintah daerah dalam kurun waktu yang telah ditentukan, berikut pembahasannya:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya tahun 2025

Tujuan I : Terwujudnya Penyediaan Infrastruktur Secara Merata and Berkualitas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	1 Rasio kemantapan jalan Kabupaten	60%	54.88	91.47
		2 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	92%	89.79	97.60
		3 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	95%	92.45	97.32
2	Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	4 Persentase lingkungan permukiman kumuh	69.76%	69.99	100.33
		5 Rasio pemukiman layak huni	90.00%	86.32	95.91
3	Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air	6 Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	80%	93.26	116.57
		7 Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	0.00%	Tidak Ada Penilaian	

Tujuan II: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	8 Angka Harapan Hidup	74.5 Tahun	74.34 Tahun	99.79
5	Meningkatnya kualitas	9 Angka rata-rata lama	8.98	9.31 Tahun	103.67

	pendidikan masyarakat	10	sekolah	Tahun		
			Harapan lama sekolah	12.89 Tahun	13.02 Tahun	101.01
6	Meningkatnya peran perempuan dalam Pembangunan	11	Indeks Pembangunan Gender	89.5	89.71	100.23

Tujuan III : Meningkatnya Perekonomian yang Inklusif, Berkualitas dan Berdaya Saing

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	%
7	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	12	PDRB Per Kapita	58.71 Juta Rupiah	62.048 Juta Rupiah	105.69
		13	Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	8.83%	10.89	132.32
8	Mengurangi pengangguran	14	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6.00%	5.51	108.17
9	Mengurangi kemiskinan	15	Tingkat Kemiskinan	5.32%	4.61	113.35

Tujuan IV : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	%
10	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	16	Indeks perilaku antikorupsi	3.58	3.85	107.6
		17	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP*	100.00
		18	Hasil evaluasi AKIP	BB	67.42	96.31
		19	Nilai LPPD	3.800	2.7029	71.13
11	Birokrasi yang berkualitas	20	Indeks Kelembagaan	0	Tidak Ada Penilaian	
		21	Indeks SPBE	3.61	3.61	100.00
		22	Indeks Profesionalisme ASN	82.77	82.23	99.35
12	Pelayanan publik yang prima	23	Publik service indeks	3.3	4.25	128.79
		24	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	89.94	105.81

Tujuan V : Meningkatnya Kemampuan Nagari dalam Pengelolaan Pemerintahan dan Potensi Sumber Daya Nagari

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
----	-------------------	-------------------	--	--------	-----------	---

UTAMA						
13	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	25	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	0.8651	0.8041	92.95
		26	Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	0.7798	0.7582	97.23
		27	Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	0.7154	0.7068	98.8

Tujuan VI : Terwujudnya Pembangunan Berbasis Lingkungan (*Green Development*)

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
14	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	28	Kesesuaian pemanfaatan ruang	20%	27.34%	136.38%
15	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	29	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66.47	72.89	109.66
16	Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	30	Indeks Resiko Bencana Daerah	115	134.81	82.77

Tujuan VII : Meningkatkan Pembangunan Mental dan Kehidupan Masyarakat Berdasarkan Nilai Nilai Agama, Adat, dan Budaya

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
17	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	31	Persentase peningkatan zakat	20	20.48	102.39
		32	Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	100	90.48	90.48
18	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	33	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	2 Nagari	2 Nagari	100.00

Sumber : Data Perangkat Daerah di olah Oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah,2026

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil capaian terhadap pengukuran indikator kinerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 yang telah dicantumkan pada tabel pengukuran kinerja. selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan masing-masing misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

MISI 1. MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Tujuan 1.1 Terwujudnya penyeUdiaan infrastruktur secara merata dan berkualitas

Untuk Pencapaian misi 1 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di tetapkan 1 tujuan yaitu “Terwujudnya Penyediaan Infrastruktur Secara Merata Dan Berkualitas” Tujuan misi 1 memiliki sasaran yang diukur dengan 7 Indikator Kinerja Utama, Analisis terhadap capaian sasaran strategis pada misi 1 dibahas berdasarkan capaian terhadap indikator kinerja masing-masing sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1.1.1 MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR



1. RASIO KEMANTAPAN JALAN KABUPATEN

RASIO KEMANTAPAN JALAN KABUPATEN

$$= \frac{\text{Jumlah Jalan dalam keadaan mantap (Kecepatan kendaraan} \pm 40 \text{ km per jam)}}{\text{Seluruh Jumlah Jalan di Dharmasraya}} * 100\%$$

$$\text{RASIO KEMANTAPAN JALAN KABUPATEN} = \frac{577.75}{1.052.66} * 100\% = 54.88 \%$$

1.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Dibawah ini adalah tabel Capaian Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan target tahun 2025:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan target tahun 2025

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2025			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
51.25 %	63	54.88	91.47%	Sangat Berhasil	68 %	80.71%

Sumber : Dinas PUPR Dharmasraya. 2025

Rasio kemantapan jalan di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target akhir masa RPJMD, capaian kinerja baru mencapai 80,71%. Sementara itu, realisasi capaian pada tahun 2025 tercatat sebesar 91,47%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai tergolong sangat baik, namun masih belum sepenuhnya memenuhi tingkat capaian yang diharapkan. Adapun tren capaian kinerja dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

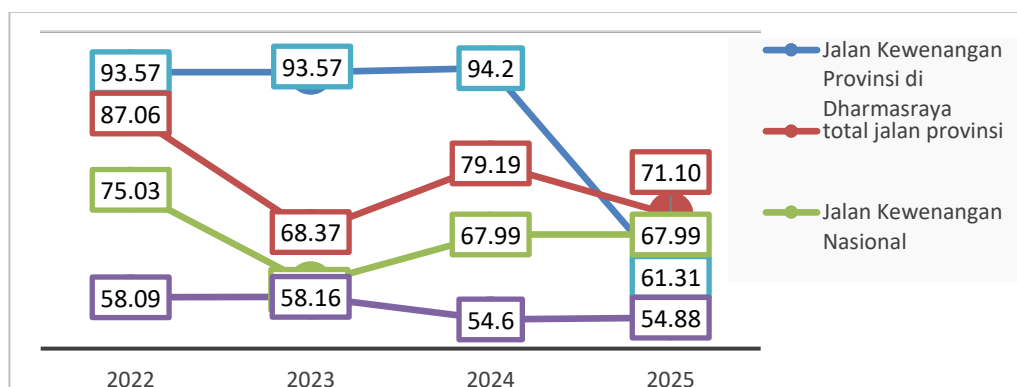
Tabel 3.3 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Predikat
2023	60%	58.16%	96.93%	↓	Sangat Berhasil
2024	63%	54.60%	86.67%	↓	Sangat Berhasil
2025	63%	54.88%	91.47%	↑	Sangat Berhasil

Sumber data : Dinas PUPR Dharmasraya.2025

Tren capaian kinerja rasio kemantapan jalan di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan adanya peningkatan realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, capaian tersebut selanjutnya dibandingkan dengan capaian pada tingkat provinsi serta Kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat, sebagaimana disajikan pada grafik di bawah ini:

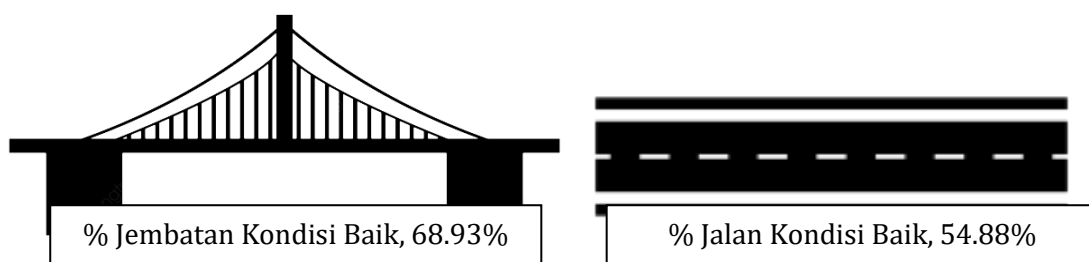
Grafik 3.1 Perbandingan Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2025 (%)



Sumber : BPS Sumatera Barat (Provinsi Sumatera Barat dalam Angka) dan Kementerian PUPR. 2025

Tren capaian kinerja kemantapan jalan kewenangan Kabupaten Dharmasraya dalam periode 2022–2025 menunjukkan kondisi yang relatif stabil meskipun mengalami sedikit fluktuasi. Pada tahun 2022 capaian tercatat sebesar 58,09%, meningkat tipis menjadi 58,16% pada tahun 2023, kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi 54,60%, dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 54,88%. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2024, capaian pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan kemantapan jalan kewenangan nasional maupun provinsi di wilayah Dharmasraya, capaian jalan kewenangan Kabupaten masih berada pada tingkat yang lebih rendah, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan kualitas dan pemeliharaan jalan secara berkelanjutan guna mendukung konektivitas wilayah dan pelayanan infrastruktur daerah.

Grafik 3.2 Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025



Sumber: Dinas PUPR Dharmasraya, 2025

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur. Saat ini, 54,88% jalan dan 68,93% jembatan berada dalam kondisi baik. Meskipun capaian ini cukup positif, masih diperlukan peningkatan lebih lanjut, terutama pada infrastruktur jalan, agar aksesibilitas dan konektivitas wilayah semakin optimal. Pemerintah daerah akan terus berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan dan pembangunan guna mendukung kesejahteraan masyarakat.

1.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Jalan Kabupaten yang telah ada sudah banyak rusak karena pengaruh keadaan cuaca yang ekstrem dan karena peningkatan volume lalu lintas serta beban berlebih kendaraan yang melebihi tonase yang diizinkan untuk klas jalan. Untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan. Kendala yang dihadapi panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap adalah :

1. Keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan pemeliharaan maupun peningkatan ruas jalan
2. Mutu dan kemantapan jalan belum seragam dan kerusakan jalan akibat beban melebihi tonase juga masih terjadi, sementara keselamatan jalan dan kelaikan fungsi jalan dituntut untuk lebih ditingkatkan

Solusi atau faktor pendukung keberhasilan indikator ini adalah dengan adanya pemeliharaan jalan dengan mengadakan Tim URC (Unit Reaksi Cepat). Tim URC harus dibentuk. Untuk memperbaiki, rehabilitasi/ pemeliharaan infrastruktur jalan raya yang meliputi Penilaian kebutuhan (Needs Assessment), penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Loses Assessment).

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran, Persentase Panjang Jalan dalam kondisi mantap, dari target 63 % terealisasi 54,88 %. Hal ini dapat diartikan bahwa dari Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang di targetkan sepanjang 577,75 km dari 1.052,60 dari panjang jalan Kabupaten seluruhnya pada Tahun 2025.

Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

- a) SDM Teknis yang memadai
- b) Sarana Prasarana yang memadai

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai kinerja rasio kemantapan jalan Kabupaten antara lain:

Tabel 3.4 Daftar Pembangunan, Pemeliharaan Jalan dan Rehabilitasi Jembatan Tahun 2025

No	Uraian	realisasi	satuan	ket
PANJANG JALAN YANG DI REKONSTRUKSI / DI REHABILITASI				
Paket Pekerjaan :				
1	Penanganan Long Segment Simp. Tabek - Padang Laweh (R.108)	1.40	Km	Pekerjaan Aspal
2	Rehab Jalan Paket II	2.19	Km	
Paket Pekerjaan :				
	-Perbaikan Jalan Penghubung Ampalu-Koto salak			Pekerjaan Aspal
	- Perbaikan jalan poros Simpang Lawai-Sitiung Lama			Pekerjaan Aspal
	- Perbaikan jalan poros Simpang microwave			Pekerjaan Aspal
	- Rehab Jalan pulai-Simpang Tabek			Pekerjaan Aspal
	-Rehab jalan Simpang Blok E Sipangkur			Pekerjaan Aspal
3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket I (Kec.Sembilan Koto, Kec.Pulau Punjung & Kec.Sitiung)	144.80	Km	Pekerjaan Rambahan kiri kanan Jalan
4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket II (Kec.Koto Baru, Kec.Koto Salak, Kec.Timpeh, Kec.Padang Laweh & Kec.Tiumang)	124.90	Km	Pekerjaan Rambahan kiri kanan Jalan
5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket III (Kec.Koto Besar, Kec.Sungai Rumbai & Kec.Asam Jujuhan)	123.40	Km	Pekerjaan Rambahan kiri kanan Jalan
6	Belanja TMMN 2025	1.8	Km	Pengkrekelan
Lokasi jorong Muaro Momong Nagari Sungai Kambut				

No	Uraian	realisasi	satuan	ket
REHABILITASI JEMBATAN				
1	Rehab Jembatan Kayu I Lokasi Nagari Koto Nan IV di Bawuah	36.00	Meter	
2	Rehab Jembatan Kayu II Lokasi nagari timpeh dan padukuan	22.6	Meter	

Sumber : Dinas PUPR Dharmasraya, 2025

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja *Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten*, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang tertuang dalam Program 100 Hari Kerja Bupati periode 2025–2030. Salah satu perangkat daerah yang berkontribusi dalam pelaksanaan program tersebut adalah Dinas Perhubungan melalui kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan transportasi dan pengelolaan fasilitas pendukung pengguna jalan. Rincian indikator kinerja yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten

No	Sasaran	Ukuran Keberhasilan	Target	Analisis Keterkaitan dengan Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten	Jenis Dukungan
1	Memberikan fasilitas layanan publik komersil kepada pengguna Jalan Nasional Jalur Lintas Sumatera	Tersedianya Feasibility Study Rest Area Modern	1 Unit (min. 1 Ha)	Penyediaan rest area dapat mengurangi kendaraan berhenti di bahu jalan dan meningkatkan ketertiban pemanfaatan koridor jalan. Hal ini mendukung fungsi jalan agar tetap lancar dan aman sehingga berkontribusi terhadap pemanfaatan jalan yang lebih baik.	Tidak langsung
2	Peningkatan pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir	Sosialisasi, pendataan dan pemungutan retribusi parkir	500 titik subjek pajak	Pengaturan parkir tepi jalan yang tertib dapat mengurangi parkir liar yang berpotensi merusak bahu jalan serta mengganggu fungsi jalan. Dengan pengelolaan parkir yang baik, kondisi dan fungsi jalan dapat lebih terjaga.	Tidak langsung
3	Peningkatan fasilitasi layanan transportasi anak sekolah	Launching Bus Sekolah bantuan Kemenhub	1 Unit bus	Penyediaan bus sekolah dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh pelajar sehingga menurunkan kepadatan lalu lintas. Hal ini membantu menjaga fungsi jalan tetap optimal, meskipun pengaruhnya terhadap kemantapan fisik jalan relatif kecil.	Tidak langsung

No	Sasaran	Ukuran Keberhasilan	Target	Analisis Keterkaitan dengan Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten	Jenis Dukungan
4	Forum CSR	Mengajukan usulan proposal yang akan diajukan kepada setiap Perusahaan kepada Bupati (koordinasi dengan Dinas PU, Sekda dan Asisten 2) termasuk prioritas jalan/jembatan.	Proposal CSR	Pemanfaatan dana CSR perusahaan untuk pembangunan atau peningkatan kualitas jalan dan jembatan dapat menambah panjang jalan Kabupaten dengan kondisi baik sehingga berkontribusi terhadap peningkatan rasio kemantapan jalan Kabupaten.	Dukungan Langsung

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya, dan DPMPTSP Dharmasraya, 2025

2. PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SUMBER AIR MINUM LAYAK DAN BERKELANJUTAN

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SUMBER AIR MINUM LAYAK DAN BERKELANJUTAN $= \frac{\text{jumlah rumah tangga memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan}}{\text{jumlah rumah tangga keseluruhan}} * 100$ $= \frac{52.551 \text{ Rumah Tangga}}{58.526 \text{ Rumah Tangga}} * 100\% = 89.79 \%$
--

2.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Dibawah ini adalah perbandingan capaian kinerja persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. berdasarkan target yang ditetapkan untuk tahun 2025

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan berdasarkan target tahun 2025

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2025			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
59%	92%	89.79%	97.6%	Sangat Baik	100 %	89.79%

Sumber : Dinas PUPR Dharmasraya. 2025

Jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2020 sebesar 59%, capaian akses rumah tangga terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan realisasi mencapai 89,79%. Capaian tersebut telah mencapai 97,6% dari target tahun 2025 sebesar 92% dengan predikat sangat baik. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100%, capaian tahun 2025 baru mencapai 89,79%, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan cakupan

layanan air minum layak agar target pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD dapat tercapai secara optimal

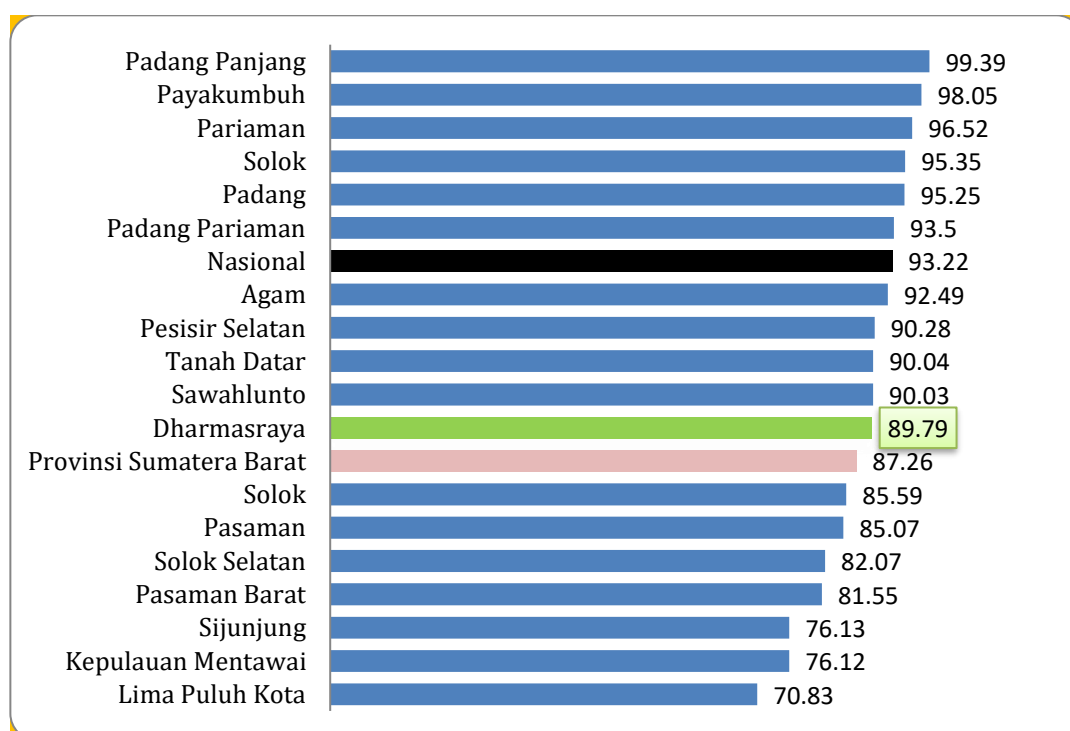
Tabel 3.7 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan			Tren	Predikat
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
2022	65 %	88 %	135.90 %	↑	Memuaskan
2023	89.00 %	89.07 %	100.08 %	↓	Memuaskan
2024	89.07 %	89.64 %	100.64 %	↑	Memuaskan
2025	92 %	89.79%	97.6%	↓	Sangat Berhasil

Sumber Data : Dinas PUPR Dharmasraya. 2025

Secara umum, capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan di Kabupaten Dharmasraya selama periode 2022–2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian yang sebagian besar telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Meskipun pada tahun 2025 capaian kinerja mengalami sedikit penurunan akibat peningkatan target, secara substansial tingkat akses layanan air minum layak di masyarakat tetap berada pada level yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penyediaan layanan air minum di Kabupaten Dharmasraya telah berjalan cukup efektif, namun peningkatan cakupan layanan masih perlu terus didorong agar mampu memenuhi target pembangunan daerah secara optimal.

Grafik 3.3 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2025



Sumber: BPS Sumatera Barat dan Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya, 2025

Kabupaten Dharmasraya mencatat capaian 89,79% dalam indikator yang diukur, menempatkannya pada peringkat menengah di antara Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Capaian ini melebihi keadaan Provinsi Sumatera Barat namun masih dibawah capaian nasional secara keseluruhan, Meskipun sudah mencapai kategori memuaskan, masih terdapat ruang untuk perbaikan guna meningkatkan peringkat Kabupaten Dharmasraya dalam skala provinsi dan Nasional.

2.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dalam mencapai kinerja penduduk mendapatkan air minum yang layak, beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan yang merupakan kegiatan operasional UPT SPAM, berikut sebaran layanan air minum di Kabupaten Dharmasraya:

Tabel 3.8 Cakupan Pelayanan Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak Tahun 2025

Kecamatan	Total	Realisasi		
		Terlayani JP	Terlayani BJP	Belum Terlayani
IX KOTO	2476	633	1043	800
PULAU PUNJUNG	10264	1052	8325	887
SITIUNG	6589	1955	4206	428
TIMPEH	4034	2781	1162	91
PADANG LAWEH	1320	721	553	46
KOTO BARU	12070	671	10523	824
TIUMANG	2988	2411	374	203
KOTO SALAK	4629	2219	2029	433
SUNGAI RUMBAI	5906	3633	1923	350
KOTO BESAR	5762	1615	3075	1072
ASAM JUJUHAN	2488	139	1508	841
Total	58526	17830	34721	5975

Sumber : Dinas PUPR Dharmasraya, 2025

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan antara lain:

1. Pada Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum POKJAPL/ POKJA Sanitasi kurang aktif sehingga koordinasi antar sector tidak berjalan sebagaimana mestinya sementara kegiatan dibidang AMPL berkaitan dengan tupoksi dinas lainnya seperti Dinas

Kesehatan. Pemberdayaan. Dinas Lingkungan Hidup dan BAPPERIDA sebagai coordinator

2. Belum adanya pendataan dan survey kelayakan air minum dan sanitasi
3. Kurangnya Anggaran APBD terhadap Program Air Minum
4. Masih kurangnya kepedulian Masyarakat terhadap air minum dan penggunaan Tanki septic sesuai teknis
5. Masyarakat lebih mementingkan pembangunan sarana dan prasarana lainnya dibanding pembangunan sarana dan prasarana Air Minum.
6. Kurangnya anggaran APBD untuk kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola Air Minum berbasis masyarakat

Beberapa Solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan dalam pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Peran aktif dari POKJAPL/ POKJA Sanitasi dan koordinasi antar sektor
2. Tersedianya Anggaran untuk pendataan dan survey kelayakan air minum
3. Penambahan Anggaran APBD terhadap Program Air Minum
4. Sosialisasi antar sektor pada Masyarakat terhadap air minum
5. Penambahan anggaran APBD untuk kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sarana sanitasi dan Air Minum berbasis masyarakat

3. PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SANITASI LAYAK DAN BERKELANJUTAN

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SANITASI LAYAK DAN BERKELANJUTAN $= \frac{\text{jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.}}{\text{jumlah rumah tangga keseluruhan}} * 100\%$ $= \frac{54110}{58.526} * 100\% = 92.45\%$
--

3.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. berdasarkan target tahun 2025

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2025			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
87.25 %	95%	92.45%	97.32%	Sangat Berhasil	100 %	92.45%

Sumber Data: Dinas PUPR. 2025

Jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2020 sebesar 87,25%, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan dengan

realisasi mencapai 92,45%. Meskipun demikian, capaian tersebut masih belum mencapai tingkat optimal atau 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100%, capaian kinerja tahun 2025 baru mencapai 92,45%, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan kinerja agar target pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD dapat tercapai secara maksimal.

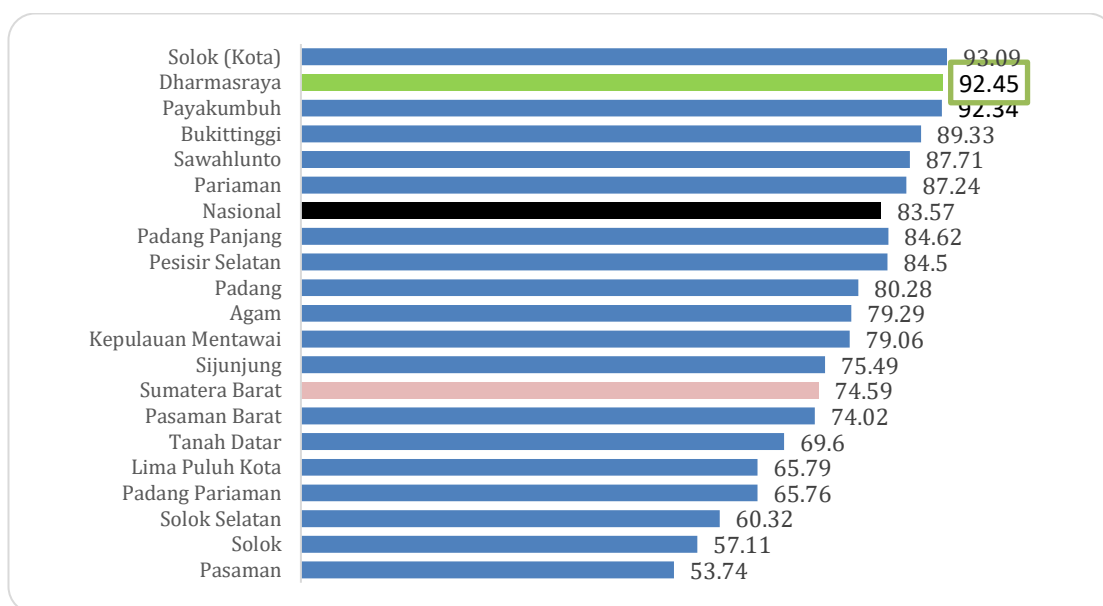
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan selama 4 tahun terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Predikat
2022	92%	91.73%	99.70%	↑	Sangat Berhasil
2023	95%	92.50%	97.36%	↓	Sangat Berhasil
2024	97%	92.45%	95.31%	↓	Sangat Berhasil
2025	95%	92.45%	97.32%	↑	Sangat Berhasil

Sumber : Dinas PUPR Dharmasraya 2025

Tren capaian kinerja pada periode 2022–2025 menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya relatif stabil dan secara umum berada pada predikat sangat berhasil. Realisasi kinerja meningkat signifikan dari 80,00% pada tahun 2021 menjadi sekitar 92,45% pada tahun-tahun berikutnya dan mampu dipertahankan hingga tahun 2025, meskipun capaian terhadap target tahunan mengalami sedikit fluktuasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja daerah telah mencapai tingkat yang baik dan konsisten, namun masih memerlukan upaya peningkatan agar dapat mendekati target yang telah ditetapkan. Untuk melihat perbandingan dengan Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.4 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2025



Sumber: BPS Sumatera Barat dan Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya, 2025

Kabupaten Dharmasraya memiliki persentase akses terhadap layanan sanitasi layak sebesar 92,45%, yang merupakan peringkat kedua tertinggi di Sumatera Barat, hanya di bawah Kota Solok (93.09%) Dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat (74.59%) capaian Dharmasraya jauh lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten ini memiliki akses sanitasi yang lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi dan Nasional.

Secara keseluruhan, Dharmasraya menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam penyediaan akses sanitasi layak, melampaui rata-rata provinsi, serta sebagian besar Kabupaten/kota di Sumatera Barat.

3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Beberapa langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan antara lain:

1. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat berupa pembangunan tangki septik individual setempat 16 unit
2. penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja
3. pengembangan kapasitas kelembagaan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) berupa pemeriksaan sampel air limbah IPAL komunal
4. operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD), berupa :
 - a. Pemeriksaan Sampel Air Limbah IPLT Sitiung V Ragusa
 - b. Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik

Tabel 3.11 Akses Limbah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

KECAMATAN	TARGET RT	TANPA AKSES	AKSES DASAR	AKSES LAYAK	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T
IX KOTO	2,476	1617	0	858	1	0
PULAU PUNJUNG	10,264	486	0	9535	243	0
SITIUNG	6,589	722	0	5779	88	0
TIMPEH	4,034	14	347	3663	10	0
PADANG LAWEH	1,320	0	119	1196	5	0
KOTO BARU	12,070	70	29	11923	48	0
TIUMANG	2,988	0	148	2202	7	631
KOTO SALAK	4,629	150	92	4202	25	160
SUNGAI RUMBAI	5,906	105	121	5475	101	104
KOTO BESAR	5,762	324	125	5287	26	0
ASAM JUJUHAN	2,488	979	247	1262	0	0
TOTAL	58,526	4,468	1,228	49,387	2,600	895

Sumber : Dinas PUPR Dharmasraya, 2025

Permasalahan yang terdapat pada pencapaian kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air limbah domestik dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah antara lain :

1. Pada Kegiatan Pengembangan Distribusi air limbah POKJAPL/ POKJA Sanitasi kurang aktif sehingga koordinasi antar sector tidak berjalan sebagaimana mestinya sementara kegiatan dibidang AMPL berkaitan dengan tupoksi dinas lainnya seperti Dinas Kesehatan, Pemberdayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan BAPPERIDA sebagai coordinator
2. Belum adanya pendataan dan survey kelayakan sanitasi
3. Kurangnya Anggaran APBD terhadap Program Air Limbah
4. Masih kurangnya kepedulian Masyarakat terhadap penggunaan Tanki septic sesuai teknis
5. Masyarakat lebih mementingkan membangun sarana dan prasarana lainnya dibanding pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi
6. Kurangnya anggaran APBD untuk kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sarana sanitasi berbasis masyarakat

Solusi :

1. Peran aktif dari POKJAPL/ POKJA Sanitasi dan koordinasi antar sektor
2. Tersedianya Anggaran untuk pendataan dan survey sanitasi
3. Penambahan Anggaran APBD terhadap Program Air Limbah
4. Sosialisasi antar sektor pada Masyarakat terhadap penggunaan Tanki septic sesuai teknis
5. Penambahan anggaran APBD untuk kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sarana sanitasi berbasis masyarakat

SASARAN STRATEGIS 1.1.2 MENINGKATNYA KUALITAS PERUMAHAN SERTA PRASARANA DAN SARANA PADA KAWASAN PEMUKIMAN

4. PERSENTASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH

PERSENTASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH

= Luas Kawasan kumuh yang terlayani (luas Kawasan kumuh tahun 2021-luas Kawasan kumuh Tahun 2025)/Luas Kawasan Kumuh Yang Ditetapkan Melalui Keputusan Bupati Berdasarkan Kriteria Teknis Tertentu *100

$$= \frac{(337.36 - 101.23 \text{ Ha})}{337.36 \text{ ha}} * 100\%$$

$$= 66.99\%$$

4.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Luas kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2020 yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/101/KPTS-BUP/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh Kabupaten Dharmasraya tercatat seluas 337,36 hektar. Hingga tahun 2025, luas kawasan kumuh yang tersisa adalah 101,23 hektar, sehingga kawasan yang telah berhasil ditangani mencapai 236,18 hektar atau sekitar 69.99% dari total luas kawasan kumuh yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kemajuan yang cukup signifikan dalam upaya penanganan kawasan kumuh serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman di Kabupaten Dharmasraya.

Capaian kinerja lingkungan permukiman kumuh berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja perubahan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh berdasarkan target tahun 2025

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2025			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
22.7 %	69.76	69.99	100.33	Memuaskan	68.66 %	101.94%

Sumber : Dinas Perkimtan Dharmasraya. 2025

Jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2020 sebesar 22,7%, kinerja penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya hingga tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dengan realisasi mencapai 69,99%. Realisasi tersebut bahkan sedikit melampaui target tahun 2025 sebesar 69,76% dengan capaian kinerja 100,33% dan memperoleh predikat memuaskan. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 68,66%, capaian tahun 2025 telah mencapai 101,94%, yang menunjukkan bahwa kinerja penanganan kawasan kumuh telah melampaui target akhir RPJMD lebih awal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas permukiman dan penanganan kawasan kumuh telah berjalan efektif dan memberikan hasil yang optimal.

Tabel 3.13 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Predikat
2022	36.14%	22.70%	63.05%	➡	Cukup Berhasil
2023	43.03%	68%	157.99%	⬆	Memuaskan
2024	68	69.76	102.59%	⬇	Memuaskan
2025	69.76	69.99	100.33	⬇	Memuaskan

Sumber : Dinas Perkimtan Dharmasraya. 2025

Tren capaian kinerja penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya pada periode 2022–2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022 capaian kinerja masih berada pada tingkat 63,05%, namun pada tahun 2023 meningkat

tajam hingga mencapai 157,99%. Capaian tersebut kemudian dapat dipertahankan pada tahun 2024 dengan capaian kinerja 102,59% dan pada tahun 2025 sebesar 100,33%. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanganan kawasan permukiman kumuh telah berjalan efektif dan mampu memenuhi target yang ditetapkan.

Tabel 3.14 Data Kawasan Lingkungan Kumuh Tahun 2025

No	Kecamatan	Pemugaran (Ha)	Peremajaan (Ha)	Pemukiman Kembali (Ha)	Total Luasan Ditangani (Ha)	Kawasan Kumuh Belum Tertangani (Ha)
1	Sembilan Koto	-	-	-	-	1.68
2	Pulau Punjung	-	-	-	0.65	6.64
3	Sitiung	-	-	-	0.5	15.13
4	Timpeh	-	-	-	1.2	9.75
5	Koto Baru	-	-	-	0.15	21.62
6	Tiumang	-	-	-	0.5	8.71
7	Padang Laweh	-	-	-	-	2.04
8	Sungai Rumbai	-	-	-	0.3	5.95
9	Koto Besar	-	0.8	-	3.45	10.97
10	Asam Jujuhan	-	-	-	-	18.74
Jumlah		0	0.8	0	6.75	101.23

Sumber : Dinas Perkimtan Dharmasraya. 2025

Keterangan:

Berdasarkan SK Bupati Dharmasraya, total luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha adalah 107,98 Ha, dengan 6,75 Ha telah ditangani dan 101,23 Ha masih belum tertangani.

4.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dari data yang disajikan, terlihat bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam capaian kinerja Persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya dari kondisi awal (2020) RPJMD hingga realisasi Tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam upaya perbaikan atau pengembangan lingkungan permukiman kumuh selama periode tersebut.

1. PENYEBAB KEBERHASILAN

- Implementasi Program yang Efektif. terdapat implementasi program yang efektif dalam meningkatkan kondisi lingkungan permukiman kumuh. Program-program ini mungkin mencakup upaya rehabilitasi, perbaikan infrastruktur, atau penyediaan layanan dasar yang memadai.
- Komitmen Bupati dengan adanya alokasi dana yang cukup untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh.
- Partisipasi Masyarakat yang aktif dari masyarakat setempat dalam program-program yang ditujukan untuk meningkatkan lingkungan permukiman kumuh. Serta kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam hal penanggulangan sampah.

2. ALTERNATIF SOLUSI

- a. Penguatan Program yang Berkelanjutan untuk mempertahankan dan memperkuat program-program yang telah terbukti berhasil dalam meningkatkan lingkungan permukiman kumuh. Ini termasuk alokasi sumber daya yang cukup, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, serta penyesuaian strategi jika diperlukan.
- b. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat. dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Ini dapat dilakukan melalui kampanye penyuluhan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pemeliharaan lingkungan.
- c. Kolaborasi dengan instansi Pemerintah maupun swasta untuk penanggulangan Kawasan lingkungan kumuh

Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja dalam meningkatkan lingkungan permukiman kumuh, serta memastikan keberlanjutan dari upaya-upaya yang telah dilakukan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh, Dinas Perkimtan telah menetapkan indikator kinerja Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani. Program yang dijalankan adalah Program Kawasan Permukiman dengan fokus pada peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektar. Kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh. Analisis mendalam terhadap program dan kegiatan ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator kinerja.

1. Efektivitas pelaksanaan kegiatan peremajaan/pemugaran permukiman kumuh memainkan peran penting dalam mencapai target indikator. Kegiatan ini melibatkan pembenahan fisik lingkungan permukiman, seperti infrastruktur, akses jalan, dan fasilitas publik lainnya, yang secara langsung mempengaruhi kualitas lingkungan tempat tinggal.
2. Keterbatasan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan, seperti proses pengadaan yang lambat, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, atau perubahan kebijakan yang tidak terduga, dapat menyebabkan penundaan atau ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program.
3. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran, termasuk identifikasi dan penanganan sumber daya yang tidak efisien atau terbuang, untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang strategis dan sistematis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat mencapai indikator kinerja yang ditetapkan dengan lebih baik di masa mendatang.

5. RASIO PEMUKIMAN LAYAK HUNI

RASIO PEMUKIMAN LAYAK HUNI

$$= \frac{\text{Luas Pemukiman Layak Huni}}{\text{Luas Wilayah Pemukiman}} * 100\% = \frac{2129.49 \text{ Ha}}{2467 \text{ Ha}} * 100\% = 86.32 \%$$

Ketersediaan kawasan permukiman yang layak mencerminkan terpenuhinya aspek kesehatan lingkungan, keamanan hunian, serta akses terhadap prasarana dan sarana dasar seperti air minum, sanitasi, drainase, dan jalan lingkungan. Selain itu, peningkatan pemukiman layak huni juga berkaitan dengan upaya pengurangan kawasan kumuh serta mendukung penataan ruang wilayah yang lebih tertata dan berkelanjutan.

5.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Luas Kawasan pemukiman di Kabupaten Dharmasraya sekitar 2.467 hektar dan 86.32% dari total luas wilayah pemukiman di Kabupaten Dharmasraya telah dianggap layak huni. Ini menunjukkan tingkat kelayakan yang cukup tinggi dalam wilayah pemukiman. namun juga menyoroti potensi untuk meningkatkan kondisi hunian di sisa wilayah tersebut. Capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Rasio Pemukiman Layak Huni berdasarkan target tahun 2025

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2025			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
83.88%	90%	86.32%	95.91%	Sangat Berhasil	100%	86.32

Sumber Data: Dinas Perkimtan. 2025

Capaian indikator menunjukkan peningkatan dari kondisi awal tahun 2020 sebesar 83,88% menuju target Tahun 2025 sebesar 94,25%, dengan realisasi mencapai 86,29% atau 91,55% dari target yang ditetapkan. Predikat yang diperoleh adalah sangat berhasil. Dengan target akhir RPJMD 2026 sebesar 100%, capaian Tahun 2025 telah mencapai 86,32% dari target tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa progres menuju target akhir berjalan dengan baik, meskipun masih perlu upaya lebih lanjut untuk mencapai sasaran penuh pada tahun 2026, perbandingan dengan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.16 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rasio Pemukiman Layak Huni Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Rasio Permukiman Layak Huni			Tren	Predikat
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
2022	88.65	84.15	94.93%	↓	Sangat Berhasil
2023	91.45	84.31	92.19%	↓	Sangat Berhasil

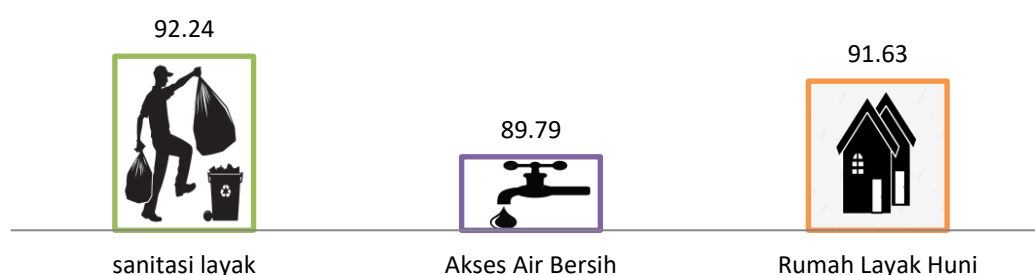
Tahun	Rasio Permukiman Layak Huni			Tren	Predikat
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
2024	94.25	86.29	91.55%	↓	Sangat Berhasil
2025	90	86.32	95.91%	↑	Memuaskan

Sumber : Dinas Perkimtan Dharmasraya. 2025

Perkembangan rasio permukiman layak huni tahun 2022–2025 menunjukkan capaian yang relatif stabil dengan predikat kinerja yang baik, meskipun realisasi masih berada di bawah target yang ditetapkan. Pada periode 2022 hingga 2024 terlihat tren penurunan capaian kinerja yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas permukiman belum sepenuhnya mampu mengikuti kenaikan target tahunan. Namun pada tahun 2025 terjadi perbaikan tren dengan meningkatnya capaian kinerja menjadi 95,91 persen, yang menunjukkan adanya peningkatan upaya pemerintah daerah dalam penataan kawasan dan perbaikan kualitas permukiman.

Grafik di bawah ini menggambarkan kondisi pemukiman di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan tiga indikator utama layak huni antara lain luas permukiman layak huni, luas kawasan kumuh, dan akses infrastruktur dasar. Meskipun sebagian besar wilayah telah memenuhi standar layak huni, masih terdapat sejumlah rumah dan kawasan yang belum memenuhi kriteria kesehatan, keamanan, dan kenyamanan, sehingga menjadi fokus prioritas perbaikan untuk mencapai pemukiman yang sepenuhnya layak huni:

Grafik 3.5 Faktor Pendukung Pemukiman Layak Huni di Kabupaten Dharmasraya tahun 2026



Sumber : Dinas PUPR dan Provinsi Sumatera Barat dalam angka,2025

Berdasarkan data terbaru, kondisi pemukiman layak huni di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan pencapaian yang cukup tinggi. Indikator sanitasi layak mencapai 92,24 %, sementara akses air bersih berada pada angka 89,79 %, dan rumah layak huni sebesar 91,63 %. Hasil ini mencerminkan bahwa sebagian besar pemukiman telah memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. Meskipun demikian, terdapat sebagian kecil wilayah yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria layak huni, sehingga perlu menjadi fokus perbaikan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kualitas pemukiman dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya

5.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Kabupaten Dharmasraya telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan jumlah permukiman layak huni, seiring dengan kebijakan nasional yang mendorong akses hunian yang lebih baik bagi masyarakat. Program nasional seperti **100-0-100**, yang bertujuan mencapai 100% akses air minum layak, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak, menjadi salah satu landasan utama dalam pengembangan kebijakan daerah. S

Keberhasilan ini tidak lepas dari beberapa faktor utama, seperti adanya regulasi yang jelas, alokasi anggaran daerah yang cukup memadai, serta koordinasi yang baik antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pada Tahun 2025, anggaran yang dialokasikan untuk program permukiman telah terserap hampir sepenuhnya, Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program berjalan dengan efektif dan sesuai dengan perencanaan.

Di sisi lain, keterlibatan sektor swasta dan masyarakat juga dapat menjadi solusi strategis dalam mendukung perbaikan permukiman. Melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) atau pendekatan berbasis komunitas, revitalisasi kawasan kumuh dapat dilakukan lebih cepat dan menyeluruh. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Dharmasraya dapat mencapai target RPJMD 2026 dan semakin mendekati tujuan nasional dalam menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni dan bebas dari kawasan kumuh.

1. Penyebab keberhasilan mencapai indikator
Adanya kerjasama dengan developer untuk penyediaan rumah yang layak huni di daerah.
2. Penyebab kegagalan pencapaian indikator
 - a. Karena tidak dapat mengetahui kepastian jumlah rumah swadaya yang terbangun di nagari-nagari setiap tahunnya.
 - b. Perencanaan dan anggaran yang tidak memadai
3. Alternatif Solusi yang telah dilakukan
 - a. Melakukan evaluasi terhadap perencanaan anggaran maupun fisik.
 - b. Aspirasi dewan yang ada pada Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang lokasinya berada di kawasan kumuh. maka akan dimasukkan pada DPA untuk peningkatan dan pembangunan rumah layak huni.

SASARAN STRATEGIS 1.1.3 MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

6. PERSENTASE LUAS DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN KONDISI BAIK

Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik

$$= \frac{\text{Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah seluruh daerah irigasi kewenangan Kabupaten}} * 100\% = \frac{1.022,7 \text{ km}}{1.096,62 \text{ km}} * 100\% = 93.26\%$$

6.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Luas daerah irigasi yang berada dalam kondisi baik di Kabupaten Dharmasraya adalah sebesar 1.022,7 kilometer dari total luas seluruh daerah irigasi dalam kewenangan Kabupaten Dharmasraya. yang mencapai 1.096,62 kilometer Hasil perhitungan menunjukkan bahwa proporsi luas daerah irigasi yang dalam kondisi baik terhadap total daerah irigasi kewenangan Kabupaten Dharmasraya adalah sekitar 93.26%. Capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik berdasarkan target tahun 2025

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2025			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
67.36 %	80%	93.26%	116.57%	Memuaskan	73.5 %	126.88%

Sumber : Dinas PUPR Dharmasraya. 2025

kondisi awal pada tahun 2020 tercatat sebesar 67,36 persen. Pada tahun 2025 ditetapkan target kinerja sebesar 80 persen, sedangkan realisasi yang dicapai mencapai 93,26 persen. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja pada tahun berjalan sebesar 116,57 persen dengan predikat memuaskan, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung indikator ini telah berjalan efektif sehingga mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 73,5 persen, maka realisasi tahun 2025 telah mencapai 126,88 persen terhadap target akhir RPJMD. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian indikator tersebut berada pada kondisi yang sangat baik serta telah melampaui target pembangunan jangka menengah daerah yang direncanakan. untuk melihat perkembangan kinerja dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik			Tren	Predikat
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
2022	71%	73.85%	104%	→	Memuaskan
2023	76.37%	76.37%	100.00%	↓	Sangat Berhasil
2024	76.36%	69.57%	91.11%	↓	Sangat Berhasil
2025	80%	93.26%	116.57%	↑	Memuaskan

Sumber : Dinas PUPR Dharmasraya. 2025

Secara keseluruhan, kinerja irigasi periode 2021–2025 menunjukkan resiliensi tinggi dengan tren yang berhasil bangkit secara signifikan setelah sempat mengalami tekanan efektivitas pada tahun 2024. Meskipun realisasi sempat menurun ke angka 69,57%, manajemen mampu melakukan akselerasi di tahun 2025 dengan mencatatkan rekor capaian tertinggi sebesar 116,57% dari target yang ditetapkan. Lonjakan kondisi baik hingga menyentuh 93,26% ini membuktikan adanya perbaikan strategi pemeliharaan yang masif dan adaptif dalam menjaga kualitas infrastruktur daerah. Keberhasilan melampaui target secara konsisten dengan predikat memuaskan mengukuhkan bahwa progres pembangunan irigasi berada pada jalur pertumbuhan yang sangat positif dan berkelanjutan.

Peningkatan irigasi kondis baik ini tentunya sangat kecil sekali dibandingkan dengan upaya pemerintah pusat yang dalam beberapa tahun terakhir sangat berupaya untuk meningkatkan kondisi infrastruktur dengan menggenjot proyek-proyek infrastruktur.

Tabel 3.19 Perbandingan luas daerah irigasi dalam kondisi baik dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2025

Kewenangan	Luas Daerah Irigasi Berdasarkan Permen 14/2015	Berfungsi dengan Pemetaan IGT	%
Kabupaten Dharmasraya	2.317 Ha	1.612 Ha*	69.57
Provinsi Sumatera Barat	65.007 Ha	32.787 Ha*	50.43
Nasional	7.1juta Ha	3.8juta Ha*	53.52

**Data Sementara*

Sumber Data: data.sumbarprov.go.id, Dinas PUPR Dharmasraya dan Kementerian PUPR, 2024

Kabupaten Dharmasraya memiliki luas daerah irigasi sebesar 2.317 hektare, dengan 1.612 hektare di antaranya berfungsi sesuai pemetaan informasi geospasial tematik (IGT), mencapai 69,57%. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Sumatera Barat yang hanya mencapai 50,43% dari total 65.007 hektare, serta rata-rata nasional sebesar 53,52% dari total 7,1 juta hektare. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan daerah irigasi di Dharmasraya lebih optimal dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional, meskipun masih perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan fungsionalitas irigasi secara menyeluruh.

6.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

1. Penyebab keberhasilan
 - a. Konsistensi dalam Perawatan dan Pemeliharaan: Terlihat bahwa dari tahun 2021 hingga 2025. terdapat konsistensi dalam upaya perawatan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi. Realisasi capaian kinerja selalu melebihi atau setidaknya mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perawatan infrastruktur irigasi dilakukan secara konsisten dan efektif selama periode tersebut.

- b. Pengalokasian Sumber Daya yang Tepat: Peningkatan realisasi capaian kinerja dari tahun ke tahun juga disebabkan oleh pengalokasian sumber daya yang tepat. baik dari segi anggaran. tenaga kerja. maupun peralatan. Adanya pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif memungkinkan pelaksanaan program perawatan infrastruktur irigasi berjalan dengan baik.

Dengan demikian. keberhasilan dalam mencapai indikator kinerja tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas yang saling mendukung dalam menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi di Kabupaten Dharmasraya.

2. Kendala yang dihadapi jaringan irigasi kondisi baik yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran :
 - a. Keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan.
 - b. Tinggi nya curah hujan pada saat pelaksanaan kegiatan menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang dijadwalkan
3. Solusi atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :
 - a. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi. rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan. dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. Upaya peningkatan fungsi jaringan dilakukan hanya pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarap nya sudah siap.
 - b. Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.

Untuk terwujudnya persentase luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten dalam Kondisi baik di dukung oleh Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan 2 (dua) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan dan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan.

7. INDIKATOR SASARAN PERSENTASE PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Tidak ada penilaian dan data terkait pengendalian daya rusak air. sehingga tidak dapat diukur untuk ketercapaian indikator kinerja ini

MISI 2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Tujuan 2.1 MENINGKATNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA

SASARAN STRATEGIS 2.1.1 MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

8. ANGKA HARAPAN HIDUP

Angka Harapan Hidup	= Rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x
	= 74.34 Tahun

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator penting dalam mengukur kinerja pemerintah, khususnya dalam bidang kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat. Angka ini mencerminkan efektivitas berbagai kebijakan dan program, seperti layanan kesehatan, pengentasan kemiskinan, peningkatan gizi, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi. Dalam evaluasi kinerja, UHH digunakan untuk menilai sejauh mana pembangunan berkelanjutan telah tercapai dan menjadi dasar perencanaan strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi angka harapan hidup, semakin menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera.

8.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.20 Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup berdasarkan target tahun 2025

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2025			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
71.33	74.5	74.34	99.79%	Sangat Baik	72.42	102.65%

Sumber : BPS. diolah oleh Dinas Kesehatan Dharmasraya. 2025

Indikator usia harapan hidup di Kabupaten menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sejak kondisi awal pada 2020. Pada tahun 2025, realisasi mencapai 74,34, hampir menyentuh target 74,5 yang telah dinaikkan dibanding kondisi awal, menandakan keberhasilan upaya peningkatan kualitas kesehatan, gizi, dan layanan kesehatan masyarakat. Lebih penting, capaian terhadap Target Akhir RPJMD 2026 sebesar 72,42 berhasil melampaui ekspektasi dengan persentase 102,65%, menegaskan bahwa meskipun target sebelumnya sudah dinaikkan, kinerja yang dicapai tetap melebihi standar yang ditetapkan. Hasil ini mencerminkan efektivitas program-program kesehatan preventif dan promotif, sekaligus menunjukkan progres yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten.

Untuk mendapatkan gambaran tren perkembangan ini, penting untuk melihat capaian kinerja usia harapan hidup dalam empat dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.21 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

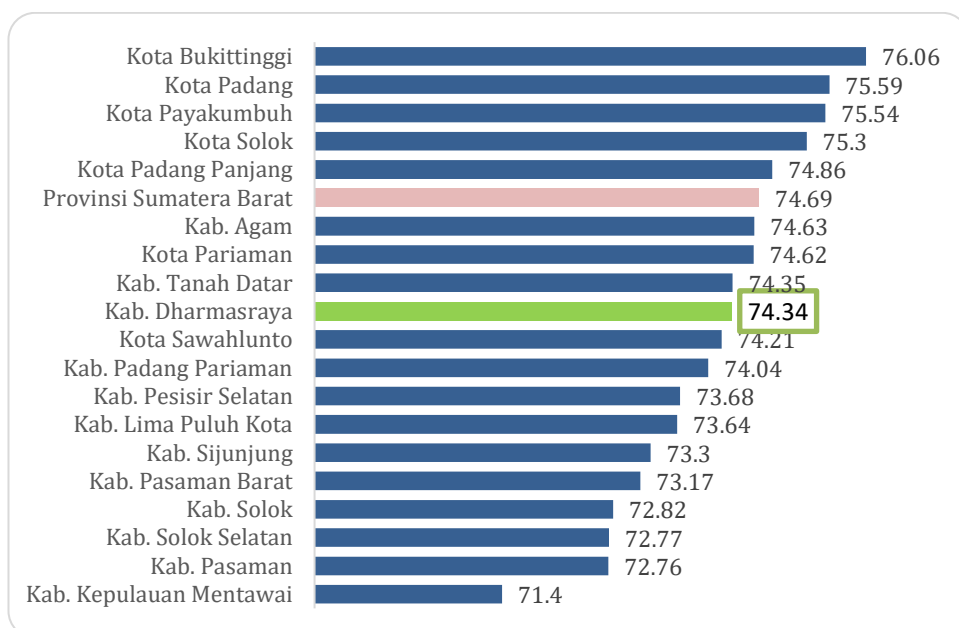
Tahun	Angka Harapan Hidup			Tren	Predikat
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
2022	71.69	71.9	100.30%	↓	Memuaskan
2023	71.87	72.24	100.50%	↑	Memuaskan
2024	72.24	74.25	102.78%	↑	Memuaskan
2025	74.5	74.34	99.79%	↓	Sangat Baik

Sumber : Badan Pusat Statistik diolah oleh Dinas Kesehatan. 2025

Kinerja Kabupaten menunjukkan tren peningkatan yang konsisten meskipun terdapat fluktuasi minor dari tahun ke tahun. Pada 2022, realisasi 71,9 sedikit melebihi target 71,69 dengan capaian 100,30%, diikuti 2023 dan 2024 yang menunjukkan tren naik signifikan dengan capaian masing-masing 100,50% dan 102,78%. Hal ini menandakan bahwa upaya peningkatan kualitas kesehatan, gizi, dan layanan medis berjalan efektif dan berkelanjutan.

Pada 2025, realisasi mencapai 74,34 meskipun sedikit di bawah target 74,5, namun capaian ini tetap menunjukkan predikat “Sangat Baik”. Penting dicatat bahwa target tahun ini telah dinaikkan dibandingkan target RPJMD sebelumnya, sehingga pencapaian yang hampir memenuhi target menunjukkan keberhasilan program yang lebih tinggi dari standar awal. Secara keseluruhan, angka harapan hidup Kabupaten berhasil melampaui ekspektasi RPJMD dan menegaskan efektivitas kebijakan kesehatan jangka panjang. Untuk melihat bagaimana capaian ini dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat serta tingkat nasional, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Grafik 3.6 Perbandingan Kinerja Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2025



Data pada grafik menunjukkan angka harapan hidup di berbagai daerah di Sumatera Barat, dengan Bukit tinggi memiliki angka tertinggi sebesar 76.06 dan Kepulauan Mentawai yang terendah dengan 71,4. Kabupaten Dharmasraya mencatat angka 74,3 di bawah angka rata rata Provinsi Sumatera Barat. Namun, terdapat variasi antar daerah yang mencerminkan perbedaan dalam akses layanan kesehatan, infrastruktur, dan faktor sosial-ekonomi lainnya.

8.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dalam mencapai kinerja usia harapan hidup, Dinas Kesehatan mendukung melalui dua sasaran kinerja dengan sembilan indikator kinerja. Dengan tercapainya sasaran kinerja tersebut, usia harapan hidup di Kabupaten Dharmasraya turut mengalami peningkatan. Berikut adalah capaian kinerja yang mendukung pencapaian usia harapan hidup pada Tahun 2025.

Tabel 3.22 Kinerja Dinas Kesehatan yang mendukung pencapaian indikator Kinerja Angka Harapan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)	172	157/100.000	108,72
		Angka Kematian Bayi (AKB)	15	16,1/1000	92,67
		Prevalensi Malnutrisi	9	4,52	150
		Persentase Rumah Tangga PHBS	60	60,14	100,23
		Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	80	80,05	100,06
		Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤ 24 jam	100%	100%	100
		Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	100%	116%	116
		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	100%	100%	100
		Visite Rate	5	5,46	109,2
2	Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	100%	100%	100
		Persentase UPT RSUD Terakreditasi	100%	100%	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, 2025

Beberapa penyebab keberhasilan peningkatan usia harapan hidup di Kabupaten Dharmasraya antara lain:

1. Menetapkan kebijakan percepatan penurunan AKI, AKB, dan stunting melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting serta Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat melalui Surat Keputusan Bupati.
2. Menetapkan Nagari Prioritas Penanganan Stunting sebagai lokus intervensi terintegrasi lintas sektor.
3. Mendorong komitmen lintas sektor bersama camat dan OPD terkait dalam mendukung program kesehatan, termasuk deklarasi stop BABS (ODF).
4. Mengalokasikan anggaran APBD untuk pembiayaan kepesertaan JKN bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah dalam rangka mendukung Universal Health Coverage (UHC).
5. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Bidang Kesehatan untuk mendukung operasional program prioritas serta pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.
6. Mendukung implementasi Transformasi Layanan Primer dan integrasi layanan kesehatan berbasis siklus hidup di seluruh wilayah kerja puskesmas.
7. Mendorong percepatan penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD pada UPT Puskesmas agar lebih fleksibel dalam pengelolaan layanan dan pembiayaan.
8. Mendukung peningkatan mutu pelayanan melalui percepatan akreditasi seluruh FKTP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Mendukung penyediaan rumah tunggu kelahiran bagi ibu hamil risiko tinggi sebagai bagian dari strategi penurunan kematian maternal dan neonatal.
10. Mendorong inovasi daerah berbasis masyarakat seperti OKE TBC, SUMBAR RANCAK, POKOK SAWIT, dan penguatan Nagari Siaga.
11. Memfasilitasi peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor (KIA, Gizi, PTM, Imunisasi, Kesehatan Lingkungan, Sosial, Pendidikan, dan lainnya).
12. Mendukung penguatan sistem kewaspadaan dini (SKDR) untuk deteksi potensi Kejadian Luar Biasa (KLB).

Dalam analisis kinerja indikator usia harapan hidup, beberapa permasalahan yang berpotensi memengaruhi pencapaian target yang ditetapkan antara lain:

1. Masih adanya kematian ibu dan bayi yang dipengaruhi oleh keterlambatan deteksi risiko tinggi, keterlambatan rujukan, dan persalinan non tenaga kesehatan.
2. Masih ditemukannya kasus stunting, malnutrisi, anemia remaja, ibu hamil KEK, serta BBLR yang berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia jangka panjang.
3. Belum optimalnya akses pelayanan kesehatan di wilayah dengan kondisi geografis sulit dan keterbatasan infrastruktur jalan.

4. Ketimpangan distribusi dan keterbatasan jumlah SDM kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
5. Keterbatasan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang belum memenuhi standar pelayanan minimal.
6. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
7. Belum optimalnya komitmen lintas sektor dan peran aktif masyarakat dalam mendukung perubahan perilaku hidup sehat, termasuk kepatuhan imunisasi dan pengobatan TBC.
8. Masih adanya kasus pasung pada ODGJ berat serta kendala sosial ekonomi dalam akses rujukan layanan kesehatan jiwa.
9. Masih adanya persepsi keliru masyarakat terhadap imunisasi dan penyakit TBC yang mempengaruhi cakupan layanan.
10. Tantangan dalam menjaga konsistensi mutu pelayanan puskesmas pasca akreditasi dan implementasi manajemen mutu secara berkelanjutan.

Dari perumusan masalah yang ditemukan dalam mencapai kinerja usia harapan hidup, maka disusun alternatif solusi untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kinerja antara lain:

1. Memperkuat kebijakan afirmatif dalam percepatan penurunan AKI, AKB, dan stunting melalui penguatan regulasi daerah dan integrasi program lintas OPD.
2. Meningkatkan proporsi anggaran kesehatan dalam APBD secara bertahap untuk pemenuhan standar sarana, prasarana, alat kesehatan, dan ketenagaan.
3. Memprioritaskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan menuju fasilitas kesehatan di wilayah terpencil untuk meningkatkan akses rujukan.
4. Mengembangkan kebijakan distribusi dan insentif bagi tenaga kesehatan di wilayah sulit atau terpencil.
5. Memperluas cakupan kepesertaan JKN bagi masyarakat rentan guna menjamin akses layanan tanpa hambatan biaya.
6. Memperkuat peran camat, wali nagari, dan tokoh masyarakat dalam mendukung program kesehatan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.
7. Mendorong integrasi intervensi spesifik dan sensitif stunting, termasuk akses air bersih, sanitasi, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial.
8. Mengembangkan program edukasi publik berbasis komunitas untuk mengatasi stigma TBC, meningkatkan kepatuhan imunisasi, dan memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat.
9. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah melalui indikator yang terukur dan berbasis data.
10. Memastikan keberlanjutan inovasi daerah yang telah terbukti efektif serta melakukan replikasi pada wilayah lain.

11. Mengoptimalkan pengelolaan BLUD puskesmas untuk meningkatkan fleksibilitas pembiayaan dalam peningkatan mutu layanan.
12. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan ODGJ berat untuk menghapus praktik pasung dan menjamin akses layanan kesehatan jiwa yang layak.

Selain langkah-langkah rutin, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga telah melakukan berbagai upaya khusus untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup masyarakat. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari perjanjian 100 hari kerja bersama Bupati periode dengan rincian kegiatannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.23 Upaya Yang Telah Dilaksanakan dalam Mendukung Peningkatan Usia Harapan Hidup

No	Upaya yang telah dilaksanakan	Analisis Keterkaitan dengan Usia Harapan Hidup	Jenis Dukungan
1	Peningkatan status RSUD Sungai Dareh dan RSUD Sungai Rumbai	Peningkatan kapasitas rumah sakit memperluas akses layanan kesehatan rujukan sehingga meningkatkan kualitas penanganan penyakit dan menurunkan risiko kematian.	Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan
2	Penugasan dan penambahan dokter spesialis	Ketersediaan dokter spesialis meningkatkan kualitas diagnosis dan penanganan penyakit sehingga memperbesar peluang kesembuhan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.	Penguatan SDM kesehatan
3	Penambahan sarana dan prasarana Puskesmas dan Pustu	Peningkatan fasilitas layanan kesehatan dasar memperluas jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat sehingga mendukung pencegahan dan penanganan penyakit lebih dini.	Peningkatan akses layanan kesehatan dasar
4	Pemeriksaan kesehatan gratis	Deteksi dini kondisi kesehatan masyarakat memungkinkan penanganan lebih cepat sehingga mencegah komplikasi penyakit yang dapat menurunkan harapan hidup.	Upaya promotif dan preventif
5	Pemeriksaan kesehatan lansia dan kunjungan rumah	Pemantauan kesehatan lansia secara rutin membantu pengendalian penyakit kronis sehingga meningkatkan kualitas hidup dan memperpanjang usia harapan hidup.	Pelayanan kesehatan kelompok rentan

No	Upaya yang telah dilaksanakan	Analisis Keterkaitan dengan Usia Harapan Hidup	Jenis Dukungan
6	Operasi katarak	Penanganan katarak meningkatkan kualitas hidup lansia dan mencegah disabilitas yang dapat memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan.	Pelayanan kuratif
7	Sunatan massal	Sunatan membantu mencegah infeksi saluran reproduksi dan penyakit tertentu sehingga mendukung peningkatan kesehatan masyarakat jangka panjang.	Upaya promotif dan preventif
8	Pengusulan program penanganan stunting bagi ibu hamil dalam rencana kerja 2026	Penanganan stunting dan peningkatan kesehatan ibu hamil berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang berdampak	Dukungan program kesehatan ibu dan pencegahan stunting
9	Bantuan sosial bagi rakyat miskin, lansia, bayi dan ibu hamil serta usulan penambahan JKN/BPJS	Bantuan sosial dan akses jaminan kesehatan meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok rentan	Dukungan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan

Sumber : Dinas Kesehatan Dharmasraya, DinsosP3APPKB, 2025

SASARAN STRATEGIS 2.1.2 MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT

9. ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH

ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH

= JUMLAH TAHUN YANG DIGUNAKAN OLEH PENDUDUK DALAM MENJALANI PENDIDIKAN FORMAL (data dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik) = 9.31 tahun

9.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.24 Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah berdasarkan target tahun 2025

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2025			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
8.47	8.98	9.31	103.67%	Memuaskan	8.50	109.53%

Sumber Data : BPS diolah oleh Dinas Pendidikan Dharmasraya. 2025

Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 8,98 dengan realisasi 9,31 sehingga capaian kinerja mencapai 103,67% dengan predikat memuaskan. Realisasi tersebut tidak hanya melampaui target tahun 2025, tetapi juga telah melampaui target akhir RPJMD 2026 sebesar

8,50 dengan capaian 109,53%. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik karena target akhir RPJMD telah tercapai lebih cepat., untuk melihat tren pencapaian kinerja, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

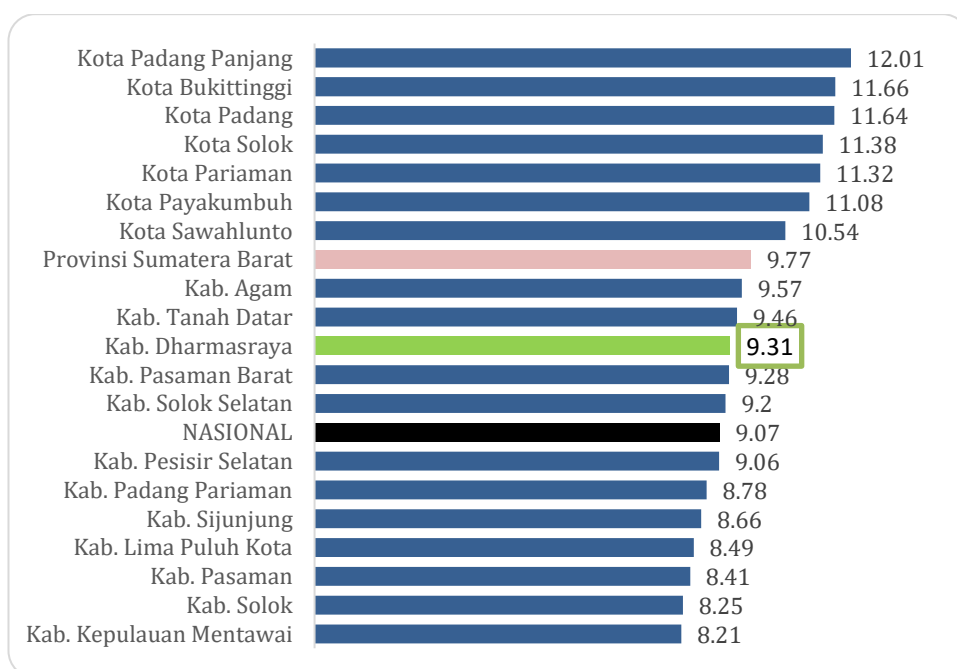
Tabel 3.25 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 5 (lima) Tahun Terakhir

Tahun	Angka Rata-Rata Lama Sekolah			Tren	Predikat
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
2021	8.48	8.55	100.83	→	Memuaskan
2022	8.48	8.56	100.94	↑	Memuaskan
2023	8.56	8.71	101.75	↑	Memuaskan
2024	8.71%	8.98%	103.10%	↓	Memuaskan
2025	8.98	9.31	103.67%	↑	Memuaskan

Sumber Data: BPS diolah oleh Dinas Pendidikan Dharmasraya. 2025

Berdasarkan data Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Dharmasraya tahun 2021–2025, terlihat bahwa realisasi setiap tahun selalu melampaui target yang ditetapkan dengan capaian kinerja di atas 100 persen dan predikat memuaskan. Nilai rata-rata lama sekolah juga menunjukkan tren peningkatan dari 8,55 pada tahun 2021 menjadi 9,31 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Dharmasraya berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif.

Grafik 3.7 Perbandingan Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional



Sumber :Provinsi Sumatera Barat dalam Angka, .2025

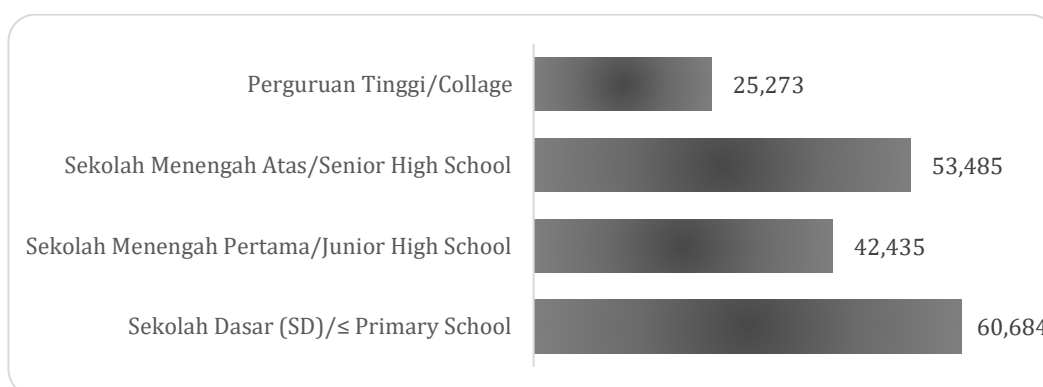
Berdasarkan grafik perbandingan capaian antar Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, nilai indikator Kabupaten Dharmasraya tercatat sebesar 9,31. Nilai tersebut berada pada posisi menengah dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya. Capaian ini masih berada di bawah rata-rata provinsi yang sebesar 9,77. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Kabupaten Dharmasraya masih perlu ditingkatkan agar dapat mendekati rata-rata provinsi maupun daerah dengan nilai tertinggi.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang sebesar 9,07, capaian Kabupaten Dharmasraya masih berada di atas nilai tersebut dengan selisih sekitar 0,24 poin. Selain itu, nilai Kabupaten Dharmasraya juga masih lebih tinggi dibandingkan beberapa Kabupaten lain seperti Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok Selatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum posisi Kabupaten Dharmasraya masih relatif kompetitif di tingkat nasional, meskipun tetap diperlukan upaya peningkatan kinerja agar mampu bersaing dengan daerah lain di tingkat provinsi.

9.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Angka rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan lamanya penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi oleh capaian kinerja Dinas Pendidikan. beberapa indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 antara lain:

Tabel 3.26 Jumlah Penduduk 15 Tahun keatas berdasarkan Pendidikan yang diselesaikan Tahun 2025



Sumber : Dharmasraya Dalam Angka tahun 2026 data diolah

Hasil pengukuran atas target dan realisasi indikator kinerja utama dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan indikator angka rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan bahkan sudah melebihi target RPJMD tahun 2026 Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Di Tahun 2025. sudah tidak ada lagi Penduduk yang tamat SD lebih dari 6 tahun. tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun. tamat SMA diperhitungkan lama

sekolah selama 12 tahun. Selain itu, hal yang mendukung pemenuhan angka rata-rata lama sekolah seperti terpenuhinya ruang kelas baru, terbangunnya sekolah baru dengan jarak tempuh dekat dengan warga serta kecilnya angka putus sekolah di Tahun 2025.

Selain itu, pencapaian kinerja angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Berkurangnya tingkat kemiskinan pada masyarakat berdampak pada peningkatan akses pendidikan. Masyarakat yang lebih sejahtera cenderung lebih mampu menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang yang lebih tinggi.
2. Pemerataan infrastruktur pendidikan telah memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang layak, proses belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal.
3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar semakin meningkat berkat program wajib belajar 9 tahun. Program ini memastikan bahwa anak-anak menyelesaikan setidaknya pendidikan dasar dan menengah pertama.
4. Adanya anggaran yang cukup untuk mendukung operasional pendidikan, baik dari APBD maupun dana BOS, membantu meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Kabupaten Dharmasraya.
5. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan turut berkontribusi dalam memperbaiki kualitas pendidikan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas guru telah mendorong proses pembelajaran yang lebih efektif

10. HARAPAN LAMA SEKOLAH

HARAPAN LAMA SEKOLAH

= LAMANYA SEKOLAH (DALAM TAHUN) YANG DIHARAPKAN AKAN DIRASAKAN OLEH ANAK PADA UMUR TERTENTU DIMASA MENDATANG

= 13.02 Tahun

10.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.27 Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah berdasarkan target tahun 2025

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2025			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian(%)			
12.43	12.89	13.02	101.01	Memuaskan	12.46	104.49%

Sumber Data : BPS diolah oleh Dinas Pendidikan Dharmasraya. 2025

Berdasarkan data yang disajikan, indikator tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan. Pada kondisi awal tahun 2020, nilai indikator tercatat sebesar 12,43. Selanjutnya pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 12,89, namun realisasi yang dicapai mencapai 13,02, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 101,01 persen

dengan predikat memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai tidak hanya memenuhi target, tetapi juga sedikit melampaui target yang telah direncanakan.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 12,46, capaian pada tahun 2025 sebenarnya telah melampaui target tersebut. Realisasi sebesar 13,02 setara dengan 104,49 persen terhadap target akhir RPJMD, yang menunjukkan bahwa indikator ini telah mencapai bahkan melampaui sasaran pembangunan daerah sebelum periode RPJMD berakhir. Kondisi ini mencerminkan adanya percepatan pencapaian kinerja pada indikator tersebut.

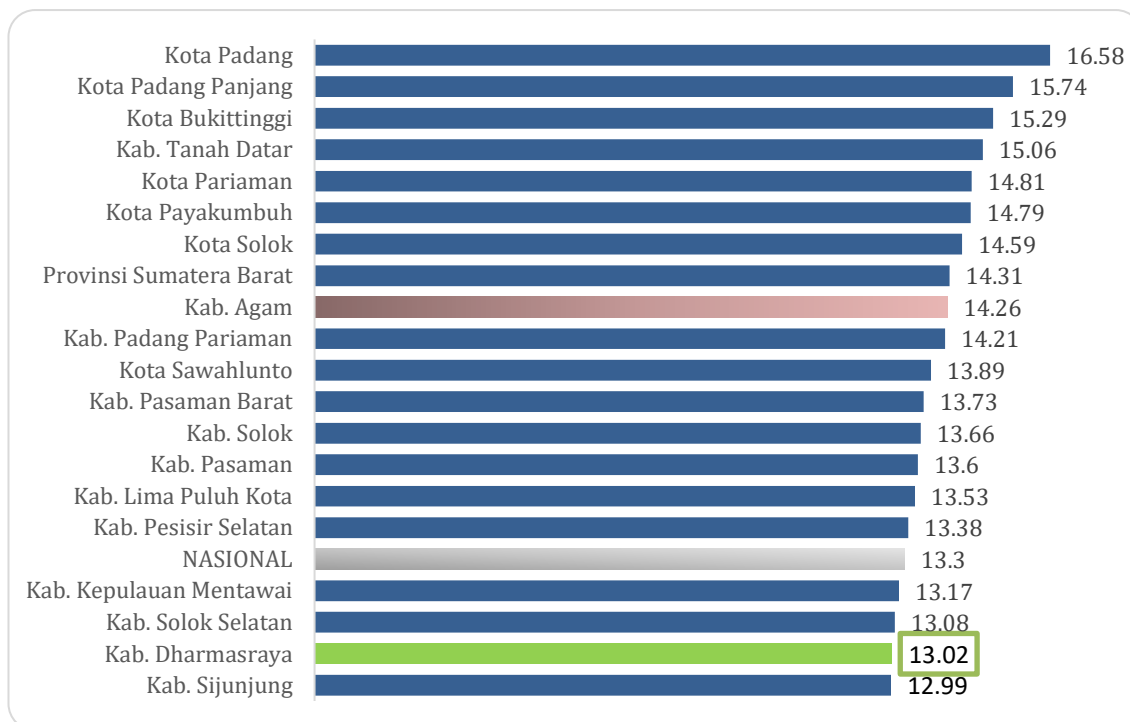
Tabel 3.28 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Harapan Lama Sekolah			Tren	Predikat
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
2022	12.44	12.51	100.56%	↑	Memuaskan
2023	12.51	12.68	101.36%	↑	Memuaskan
2024	12.68	12.89	101.66%	↑	Memuaskan
2025	12.89	13.02	101.01	↓	Memuaskan

Sumber Data : BPS diolah oleh Dinas Pendidikan Dharmasraya. 2025

Berdasarkan data Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Dharmasraya tahun 2022–2025, terlihat bahwa realisasi capaian setiap tahun selalu melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja di atas 100 persen dan predikat memuaskan. Capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan persentase sebesar 101,66 persen. Pada tahun 2025, nilai realisasi kembali mengalami peningkatan menjadi 13,02 seiring dengan dinaikkannya target menjadi 12,89. Meskipun target tersebut telah ditingkatkan, capaian kinerja tetap berhasil melampaui 100 persen. Hal ini juga menunjukkan bahwa capaian tersebut telah melampaui target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 12,46.

Grafik 3.8 Perbandingan Kinerja Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional



Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.2025

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, capaian Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 tercatat sebesar 13,02. Meskipun realisasi kinerja tersebut telah melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota lain di Sumatera Barat posisi Kabupaten Dharmasraya masih berada pada peringkat kedua terbawah. Kondisi ini menunjukkan bahwa walaupun target kinerja berhasil dicapai bahkan melebihi 100 persen, namun tingkat capaian indikator tersebut masih relatif lebih rendah dibandingkan sebagian besar daerah lain. Hal ini mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan kemungkinan masih kurang menantang sehingga ke depan perlu dilakukan penyesuaian target yang lebih ambisius agar mampu mendorong peningkatan kinerja yang lebih optimal.

10.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi oleh capaian kinerja Dinas Pendidikan. Pada tahun 2025, terdapat beberapa indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya yang berkontribusi dalam mendukung peningkatan Harapan Lama Sekolah. Beberapa capaian indikator pendukung tersebut dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel 3.29 data APK, APM, dan APS di Kabupaten Dharmasraya tahun 2025

Jenjang Pendidikan	2025			Angka Partisipasi Sekolah
	APM	APK		
SD/MI/Sederajat	98.34	107.77	16-18 Tahun	 78.31
SMP/MTs/Sederajat	80.57	97.09	13-15 Tahun	 96.75
SMA/SMK/MA/Sederajat	60.99	92.59	7-12 Tahun	 98.69

Sumber Data : BPS diolah oleh Dinas Pendidikan Dharmasraya. 2025

Berdasarkan data capaian pendidikan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2025, terlihat bahwa tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang dasar masih tergolong tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/MI sebesar 98,34 dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) mencapai 107,77. Selain itu, Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok usia 7–12 tahun juga sangat tinggi yaitu sebesar 98,69 persen, serta usia 13–15 tahun sebesar 96,75 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah dasar dan menengah pertama telah mengakses pendidikan formal.

Namun demikian, pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi masih terlihat adanya penurunan partisipasi. Hal ini terlihat dari APM jenjang SMA/SMK/MA yang sebesar 60,99 meskipun APK mencapai 92,59. APS pada kelompok usia 16–18 tahun juga tercatat lebih rendah yaitu sebesar 78,31 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian penduduk usia sekolah yang belum melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah atas. Situasi tersebut berpengaruh terhadap capaian indikator Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Dharmasraya, karena semakin tinggi partisipasi pendidikan hingga jenjang menengah dan atas akan semakin mendorong peningkatan rata-rata lama pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh penduduk.

Selain itu, beberapa faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja harapan lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya antara lain:

1. Pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Dharmasraya berperan besar dalam meningkatkan angka harapan lama sekolah. Akses ke fasilitas pendidikan yang layak memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Kebijakan wajib belajar 9 tahun mendorong peningkatan angka harapan lama sekolah karena semakin banyak anak yang menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.
3. Tingginya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan juga menjadi faktor utama. Masyarakat lebih terdorong untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang yang lebih tinggi.

4. Adanya anggaran yang dialokasikan dari APBD dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) turut membantu dalam penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik.

SASARAN STRATEGIS 2.1.3 MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

11. INDIKATOR SASARAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

= PERBANDINGAN (RASIO) CAPAIAN ANTARA IPM PEREMPUAN DENGAN IPM LAKI-LAKI.

= 89.71

11.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.30 Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender berdasarkan target tahun 2025

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2025			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
88.31	89.5	89.71	100.23%	Memuaskan	89.67	100.04

Sumber Data :BPS diolah oleh DINSOSP3APPKB. 2025

Berdasarkan data capaian indikator, kondisi awal tahun 2020 sebesar 88,31. Pada tahun 2025 ditetapkan target 89,5 dengan realisasi 89,71 sehingga capaian kinerja mencapai 100,23 persen dengan predikat memuaskan. Realisasi tersebut juga telah melampaui target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 89,67 atau mencapai 100,04 persen dari target akhir. Tren perkembangan capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.:

Tabel 3.31 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 5 (Lima) Tahun Terakhir

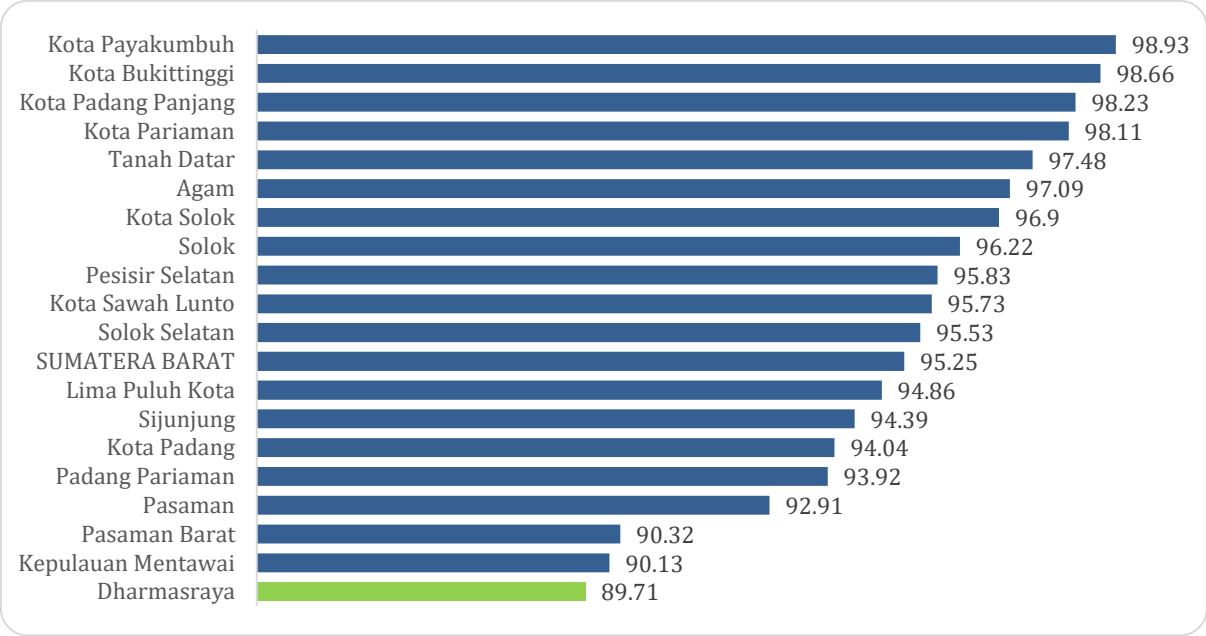
Tahun	Indeks Pembangunan Gender			Tren	Predikat
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
2021	88.35	88.32	99.97%	→	Sangat Berhasil
2022	89	88.56	99.23%	↓	Sangat Berhasil
2023	89.17	88.56	99.32%	↑	Sangat Berhasil
2024	89.34	89.58	100.27%	↑	Memuaskan
2025	89.5	89.71	100.23%	↓	Memuaskan

Sumber Data : BPS diolah oleh DINSOSP3APPKB. 2025

Secara umum, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) selama periode 2021–2025 menunjukkan kinerja yang baik dan relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2024 dan 2025 realisasi IPG telah melampaui target yang ditetapkan dengan predikat

memuaskan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan berjalan dengan baik dan capaian kinerja indikator ini berada pada kategori sangat baik.

Grafik 3.9 Perbandingan Kinerja Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten/kota dengan kategori kesetaraan menengah ada 4 (empat) yaitu Kota Padang, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pasaman. Kabupaten Pasaman Barat ada pada kategori kesetaraan menengah rendah, sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Dharmasraya masih pada kategori kesetaraan gender rendah.

11.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Capaian kinerja ini didukung oleh berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, antara lain:

No	Upaya yang telah dilaksanakan	Keterkaitan dengan Indikator Kinerja	Jenis Dukungan
1	Angka Prevalensi Akses terhadap layanan KB meningkatkan kesehatan reproduksi dan pengambilan keputusan perempuan dalam keluarga sehingga mendukung indikator kesetaraan gender		Dukungan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

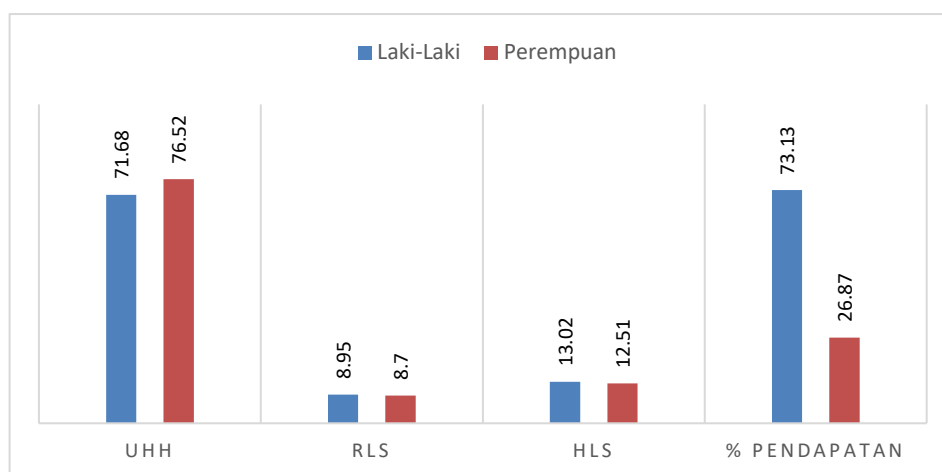
2	Penurunan unmet need sebesar 2.533 (6,68%)	Pemenuhan kebutuhan KB memperkuat hak reproduksi perempuan dan meningkatkan kesetaraan gender dalam kesehatan keluarga	Dukungan pelayanan KB dan edukasi kesehatan reproduksi
---	--	--	--

Sumber : DINSOSP3APPKB. 2025

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan menghitung kualitas dari dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pada dimensi pendidikan digunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dimensi kesehatan menggunakan umur harapan hidup, serta dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran konsumsi. Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG dihitung berdasarkan data pembangunan IPM terpilah jenis kelamin yang dipublikasikan oleh BPS.

Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2021-2025 capaiannya selalu meningkat/ naik dari tahun sebelumnya, artinya implementasi terhadap pembangunan gender di Kabupaten Dharmasraya telah terwujud dan mencapai sasaran dari program kesetaraan gender dalam pembangunan. Hal ini didukung dengan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta komitmen kepala daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat setiap tahun namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Tabel 3.32 Indikator Perhitungan IPG menurut Jenis Kelamin (Usia Harapan Hidup, Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pendapatan) Tahun 2025



Sumber : Catalog Analisis Gender Sumatera Barat, Vol-1, 2024

Berdasarkan data Indikator IPG Kabupaten Dharmasraya, terlihat bahwa meskipun perempuan memiliki usia harapan hidup lebih tinggi dibanding laki-laki (76,52 tahun dibanding 71,68 tahun), serta kesenjangan dalam pendidikan relatif kecil, namun Indeks

Pembangunan Gender (IPG) masih tergolong rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh kesenjangan ekonomi yang sangat besar antara laki-laki dan perempuan.

Persentase pendapatan perempuan hanya mencapai 26,87%, jauh lebih rendah dibanding laki-laki yang mencapai 73,13%. Kesenjangan ini menunjukkan masih terbatasnya akses perempuan terhadap kesempatan ekonomi, baik dalam hal pekerjaan, penghasilan, maupun peran dalam sektor produktif.

Meskipun perempuan memiliki potensi untuk berkontribusi lebih dalam pembangunan, namun ketimpangan dalam akses ekonomi menjadi faktor utama yang menahan peningkatan IPG. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Dharmasraya perlu difokuskan pada peningkatan akses perempuan terhadap pekerjaan, peluang usaha, serta dukungan kebijakan yang mendorong kemandirian ekonomi perempuan.

MISI 3. MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING

Tujuan 3.1 Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing

SASARAN STRATEGIS 3.1.1 MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DAN DAYA SAING DAERAH

12. PDRB PER KAPITA

PDRB PER KAPITA

= JUMLAH NILAI TAMBAH YANG DIHASILKAN OLEH SELURUH UNIT USAHA PER JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN (DATA DHARMASRAYA DALAM ANGKA)

= 62.048 Juta Rupiah

12.1.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.33 Capaian Kinerja PDRB Per Kapita berdasarkan target tahun 2025

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2025			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
40.48	58.71	62.048	105.69%	Memuaskan	47.72	130.03%

Sumber : Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2026 data di olah

Berdasarkan data tersebut, kinerja indikator menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan kondisi awal tahun 2020 sebesar 40,48. Pada tahun 2025, realisasi mencapai 62,048 dari target 58,71 dengan capaian kinerja sebesar 105,69 persen dan predikat memuaskan. Capaian ini juga telah melampaui target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 47,72, dengan persentase pencapaian terhadap target akhir RPJMD mencapai 130,03 persen, yang menunjukkan bahwa kinerja indikator telah berkembang lebih cepat dari yang direncanakan.

Perbandingan beberapa tahun terakhir bertujuan untuk menganalisis tren kinerja, mengidentifikasi efektivitas kebijakan atau program yang telah diterapkan, serta mengevaluasi pencapaian terhadap target yang ditetapkan. Pencapaian PDRB perkapita dari hingga Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

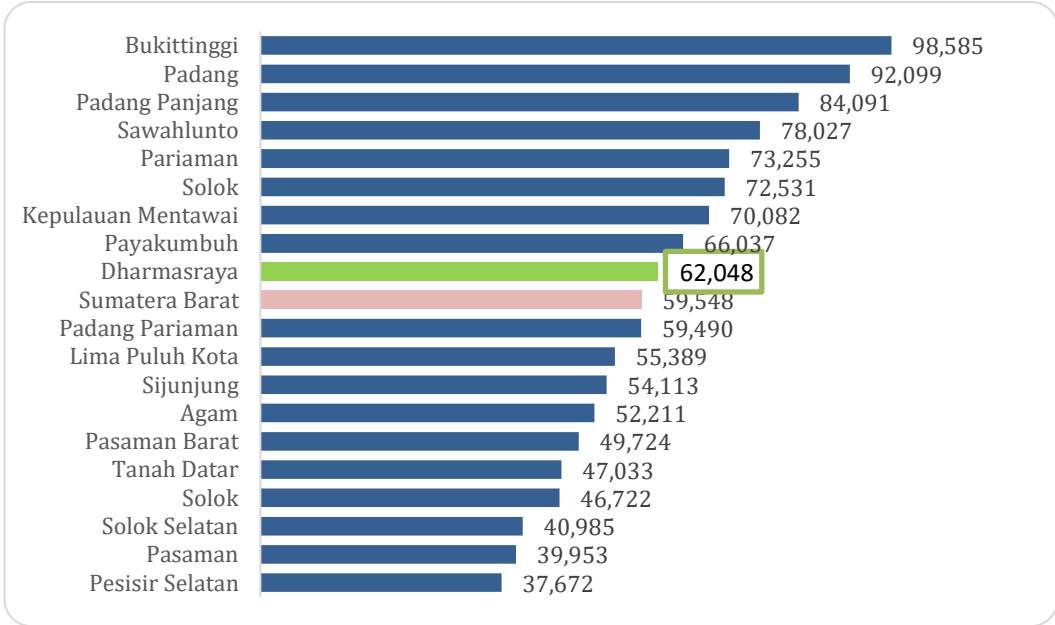
Tabel 3.34 Perbandingan Antara Capaian Kinerja PDRB Per Kapita Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Predikat
2022	43.81	51.885	118.40%	↓	Memuaskan
2023	44.79	55.62	124.19%	↑	Memuaskan
2024	55.95	58.71	104.93%	↓	Memuaskan
2025	58.71	62.048	105.69%	↑	Memuaskan

Sumber: Dharmasraya Dalam Angka data diolah. 2026

PDRB per kapita Kabupaten Dharmasraya menunjukkan tren meningkat selama periode 2022–2025. Realisasi setiap tahun selalu melampaui target yang ditetapkan dengan capaian kinerja di atas 100 persen dan predikat memuaskan, yang menunjukkan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.35 Perbandingan Kinerja PDRB Per Kapita Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat



Sumber data: Publish BPS (Sumatera Barat Dalam Angka. 2026)

Berdasarkan grafik tersebut, nilai PDRB per kapita Kabupaten Dharmasraya sebesar 62,048. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 59,548, sehingga menunjukkan bahwa tingkat aktivitas ekonomi per penduduk di Kabupaten Dharmasraya berada di atas rata-rata provinsi.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya berada pada peringkat ke-9. Posisi ini menunjukkan bahwa capaian PDRB per kapita Dharmasraya berada pada kelompok menengah atas di tingkat provinsi dan masih lebih tinggi dibandingkan beberapa Kabupaten lainnya.. Ini mengindikasikan bahwa masih terdapat peluang peningkatan dalam berbagai sektor ekonomi agar lebih kompetitif secara Nasional.

12.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan PDRB Perkapita yang tertuang dalam perjanjian kerja 100 hari kerja bersama bupati antara lain :

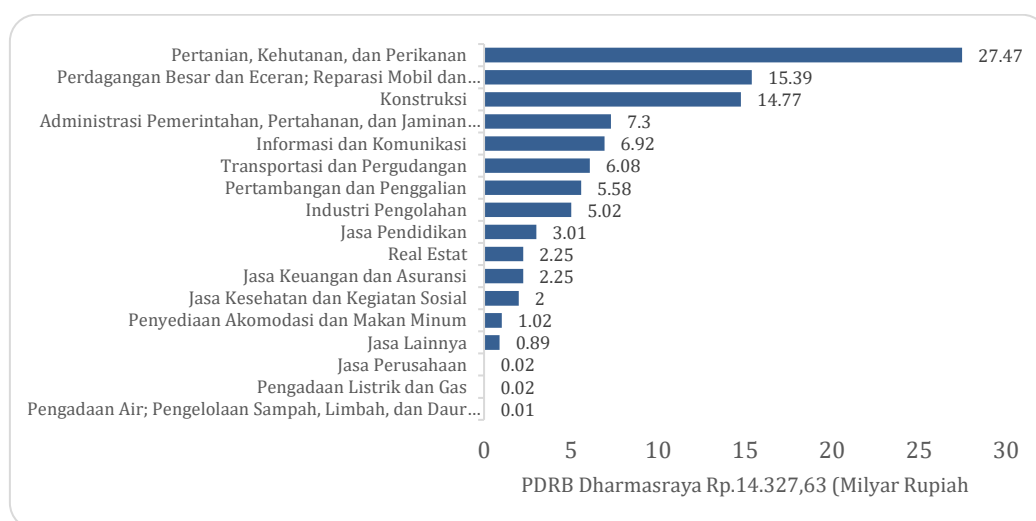
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Analisis Keterkaitan dengan Peningkatan PDRB	Jenis Dukungan
1	Pemetaan Ekonomi Berbasis Wilayah (OVOP)	Penetapan komoditas unggulan nagari dan produk turunan UMKM	Pengembangan komoditas unggulan dan produk turunan meningkatkan produksi dan nilai tambah ekonomi daerah sehingga mendorong kenaikan PDRB.	Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas
2	Implementasi Pilot Project OVOP	Pelaksanaan OVOP di dua nagari	Pelaksanaan OVOP meningkatkan aktivitas produksi dan usaha berbasis potensi lokal yang menambah output ekonomi daerah.	Peningkatan aktivitas produksi lokal
3	Peningkatan PAD – Pasar Rakyat	Pembenahan dan rehabilitasi pasar rakyat prioritas	Revitalisasi pasar meningkatkan aktivitas transaksi dan perputaran ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan sektor perdagangan dalam PDRB.	Peningkatan aktivitas perdagangan
4	Peningkatan Investasi Daerah	Penguatan produk UMKM berbasis OVOP	Penguatan UMKM meningkatkan kapasitas produksi dan penjualan produk lokal sehingga meningkatkan kontribusi sektor industri kecil dan perdagangan terhadap PDRB.	Peningkatan investasi dan pengembangan UMKM
5	Penguatan Kelembagaan	Pembentukan Koperasi Merah	Pembentukan koperasi memperkuat akses pembiayaan	Penguatan kelembagaan

Ekonomi Putih (pilot project) dan pemasaran usaha ekonomi masyarakat sehingga mendorong masyarakat pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah.

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Dharmasraya, 2025

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian indikator PDRB per kapita di Kabupaten Dharmasraya melibatkan beberapa faktor. Keberhasilan pencapaian tersebut disebabkan oleh kebijakan pemerintah daerah dalam mempromosikan investasi. pengembangan sektor ekonomi yang potensial. dan peningkatan infrastruktur. Selain itu. partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya juga dapat memberikan kontribusi positif.

Grafik 3.10 Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2026 (PDRB Dharmasraya)



Sumber: Dharmasraya Dalam Angka, 2026

Struktur PDRB per kapita berdasarkan lapangan usaha menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki kontribusi terbesar, yaitu 27,47%, mengindikasikan bahwa ekonomi daerah masih sangat bergantung pada sektor primer. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi kontributor signifikan kedua dengan 15,39%, diikuti oleh sektor Konstruksi sebesar 14,77%. Sektor-sektor lainnya, seperti Administrasi Pemerintahan (7,3%), Informasi dan Komunikasi (6,92%), serta Transportasi dan Pergudangan (6,08%), juga memberikan kontribusi yang cukup besar. Sementara itu, sektor industri pengolahan hanya menyumbang 5,02%, menunjukkan bahwa hilirisasi industri masih perlu ditingkatkan. Dengan dominasi sektor primer dan perdagangan, diversifikasi ekonomi, terutama melalui peningkatan sektor industri dan jasa, dapat menjadi strategi untuk meningkatkan PDRB per kapita secara lebih berkelanjutan.

Di sisi lain, kegagalan dalam mencapai target PDRB per kapita disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya investasi dalam sektor-sektor ekonomi yang potensial, kendala dalam pengembangan infrastruktur yang memadai, dan kurangnya akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi pasar dan perubahan kebijakan pemerintah pusat juga dapat mempengaruhi pencapaian indikator ini.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan, seperti meningkatkan promosi investasi, mengembangkan sektor ekonomi yang berpotensi, meningkatkan infrastruktur, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing, serta memperkuat kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan implementasi solusi-solusi ini, diharapkan Kabupaten Dharmasraya dapat terus meningkatkan PDRB per kapita dan mencapai target yang ditetapkan dalam waktu yang lebih singkat.

Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai indikator kinerja PDRB perkapita:

1. Pengembangan sektor unggulan. Penting untuk mengidentifikasi dan mengembangkan sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi untuk meningkatkan kontribusi terhadap PDRB perkapita. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan investasi dan pengembangan infrastruktur serta kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor tersebut.
2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan PDRB perkapita. Diperlukan pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan terhadap sumber daya alam tersebut agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan PDRB perkapita. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang berkualitas, serta mendorong adopsi teknologi yang tepat guna untuk meningkatkan efisiensi kerja.
4. Investasi dalam Infrastruktur. Infrastruktur yang baik merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang strategis.
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kesejahteraan merupakan investasi jangka panjang yang dapat memberikan dampak positif terhadap PDRB perkapita. Tenaga kerja yang terampil dan produktif akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
6. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. Program ini memiliki alokasi anggaran yang besar dan bertujuan untuk meningkatkan produksi ikan dalam rangka mendukung sektor perikanan, yang merupakan salah satu sektor potensial dalam meningkatkan PDRB per kapita.

7. Pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, dan penguatan kelembagaan. program ini bertujuan untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.
8. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri. Program ini bertujuan untuk mengembangkan sektor industri lokal, yang dapat menjadi salah satu pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB per kapita.
9. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Melalui kegiatan penyuluhan, program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian, yang merupakan salah satu sektor utama dalam kontribusi terhadap PDRB per kapita.

Alternatif solusi yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas program-program di atas termasuk peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja program, optimalisasi penggunaan anggaran, penguatan kerjasama antar instansi terkait, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, diharapkan program-program tersebut dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam meningkatkan PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan.

13. PDRB RASIO NET EKSPOR TERHADAP PDRB

RASIO NET EKSPOR TERHADAP PDRB	
$= \frac{\text{Jumlah PDRB Perkapita Net Ekspor atas dasar harga berlaku menurut Jenis Pengeluaran}}{\text{PDRB Dharmasraya atas dasar harga berlaku menurut jenis pengeluaran}} * 100\%$	
$= \frac{1.647,48 \text{ (juta Rupiah)}}{15.380,54 \text{ (juta Rupiah)}} * 10.89\%$	

Dharmasraya PDRB perkapita net ekspor Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah 1.647,48 juta rupiah dari total PDRB perkapita Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebesar 15.380,54 juta rupiah. jadi, PDRB perkapita net ekspor di Kabupaten Dharmasraya berkontribusi sekitar 8.83% terhadap total PDRB perkapita. Ini menunjukkan seberapa besar peran ekspor dalam menyumbang pendapatan per kapita di Kabupaten Dharmasraya. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar kontribusi ekspor terhadap ekonomi lokal.

13.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.36 Capaian Kinerja Rasio Net Ekspor Terhadap PDRB berdasarkan target tahun 2025

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2025			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
3.08	8.83%	10.89%	123.32	Memuaskan	3.8	286.55

Sumber Data : Dharmasraya Dalam Angka tahun 2026

Secara garis besar, Kabupaten Dharmasraya berkontribusi terhadap ekspor Provinsi Sumatera Barat. dari data BPS bulan Januari 2024 menunjukkan pola ekspor yang menjanjikan dengan fokus pada beberapa golongan barang utama. Pada bulan tersebut, golongan barang

yang paling banyak diekspor adalah lemak & minyak hewan/nabati (HS 15) sebesar US\$100.01 juta. diikuti oleh berbagai produk karet dan barang dari karet (HS 40) sebesar US\$8.87 juta. dan sari bahan samak dan celup (HS 32) sebesar US\$5.24 juta.

Komoditi Dharmasraya utama untuk mendukung ekspor adalah Produk Karet dan Barang dari Karet (HS 40). Luas Perkebunan Karet di Kabupaten Dharmasraya menurut data BPS tahun 2020 seluas 40.909 hektar atau 409 km². sedangkan luas daerah di Kabupaten Dharmasraya seluas 2.961.19 Km². artinya 13.8% Kawasan di Kabupaten Dharmasraya adalah Perkebunan karet. sehingga sangat berpotensi untuk meningkatkan rasio net ekspor terhadap PDRB

Tabel 3.37 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rasio Net Ekspor Terhadap PDRB Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Predikat
2022	3.25	6.32	194%	↑	Memuaskan
2023	3.4	8.05	236.65%	↑	Memuaskan
2024	8.05	8.83	109.70%	↓	Memuaskan
2025	8.83%	10.89%	123.32	↑	Memuaskan

Sumber : Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2026

Berdasarkan data tersebut, capaian indikator menunjukkan tren peningkatan secara umum selama periode 2021–2025. Realisasi meningkat dari 3,06 pada tahun 2021 menjadi 10,89 pada tahun 2025 dan sebagian besar tahun mampu melampaui target yang ditetapkan. Hal ini tercermin dari capaian kinerja yang selalu berada di atas 100 persen sejak 2022 dengan predikat memuaskan, sehingga menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

13.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Analisis Keterkaitan dengan Peningkatan PDRB	Jenis Dukungan
1	Penguatan Distribusi Komoditas	Keterlibatan koperasi/BUMNag dalam rantai distribusi	Penguatan distribusi memperlancar pemasaran produk lokal dan meningkatkan volume perdagangan daerah yang berkontribusi pada PDRB.	Penguatan perdagangan dan distribusi

Net ekspor barang dan jasa di Kabupaten Dharmasraya memiliki peran dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jika rasio net ekspor terus meningkat, maka peran sektor ekspor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin signifikan.

Sebaliknya, jika nilai ini menurun, maka ketergantungan terhadap impor bisa menjadi tantangan bagi stabilitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, upaya penguatan daya saing produk unggulan serta peningkatan nilai tambah komoditas ekspor menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyebab keberhasilan rasio net ekspor terhadap PDRB Kabupaten Dharmasraya yang dapat dianalisis dari beberapa faktor yang mempengaruhi performa ekspor. antara lain:

1. Kualitas dan Daya Saing Produk Ekspor. Salah satu penyebab utama keberhasilan ekspor Dharmasraya adalah kualitas produk yang baik dan daya saing yang tinggi di pasar internasional. Produk unggulan seperti produk karet (HS 40) Dharmasraya memiliki standar produksi yang tinggi dan dapat bersaing dengan produk sejenis dari daerah lain.
2. Dukungan Kebijakan dan Infrastruktur. antara lain Pembangunan akses jalan tani, irigasi, infrastruktur lainnya merupakan beberapa bentuk adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk fasilitasi perizinan dan insentif pajak, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekspor jaringan transportasi.
3. Inovasi dan Pengembangan Produk. Upaya dalam inovasi produk dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor juga dapat menjadi faktor penting dalam keberhasilan ekspor Dharmasraya. Investasi dalam riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing.

Dengan kombinasi dari faktor-faktor di atas, Kabupaten Dharmasraya telah berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan ekspor, yang pada gilirannya berkontribusi secara signifikan terhadap rasio net ekspor terhadap PDRB. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Namun, dalam pencapaian indikator ini, masih ditemukan beberapa masalah antara lain dalam beberapa kemungkinan, produk ekspor mengalami masalah kualitas atau tidak memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh pasar tujuan. Serta akses pasar atau jaringan distribusi yang efisien masih belum maksimal juga menjadi penyebab kegagalan dalam meningkatkan ekspor di Kabupaten Dharmasraya.

Dari masalah yang ditemui dapat disusun beberapa alternatif Solusi yang telah dan akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja rasio net ekspor terhadap PDRB antara lain

1. Peningkatan kualitas dan standar produk serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar internasional adalah langkah penting untuk meningkatkan daya saing dan keberhasilan ekspor.
2. Diversifikasi pasar ekspor dengan mencari peluang di pasar baru atau mengembangkan kemitraan dengan perusahaan asing dapat membantu mengurangi risiko kegagalan ekspor.

3. Investasi dalam peningkatan infrastruktur dan kemampuan produksi. serta dukungan dalam penerapan inovasi teknologi. akan membantu meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing produk ekspor.

Untuk mencapai kinerja ini, tidak dilaksanakan oleh 1 Perangkat Daerah, hal ini didukung oleh kolaborasi beberapa perangkat daerah, antara lain:

1. Dinas Koperasi. UMKM. Perindustrian. dan Perdagangan. dalam hal memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produksi komoditi ekspor. Hal ini termasuk penggunaan teknologi modern. peningkatan proses produksi. dan pemenuhan standar kualitas. Melalui program pengembangan industri kecil dan menengah. dinas ini membantu UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi dan pemasaran. sehingga mereka dapat memproduksi komoditi ekspor dengan kualitas yang lebih baik. Kerjasama dengan lembaga penelitian atau perguruan tinggi juga dilakukan untuk melakukan riset dan pengembangan terkait inovasi produk dan proses produksi untuk meningkatkan daya saing komoditi ekspor.
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. memberikan fasilitasi dalam proses perizinan dan investasi bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kapasitas produksi atau memperkenalkan inovasi dalam produksi komoditi ekspor. Pelayanan yang cepat. efisien. dan terpadu akan membantu perusahaan untuk segera memulai atau memperluas usahanya tanpa terhambat oleh birokrasi yang berbelit-belit.
3. Dinas Pertanian memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas komoditi pertanian yang diekspor. Mereka dapat memberikan pelatihan tentang teknik bertani yang baik. penggunaan pupuk yang tepat. dan pengendalian hama dan penyakit untuk meningkatkan hasil dan kualitas produk. Pemilihan varietas tanaman yang unggul dan adaptif serta pemantauan secara berkala terhadap kualitas hasil panen juga menjadi tanggung jawab dinas ini.

Rasio net ekspor terhadap PDRB didukung oleh Dinas Terkait antara lain Dinas Koperasi. UMKM. Perindustrian. dan Perdagangan. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. dan Dinas Pertanian dalam hal peningkatan kualitas komoditi ekspor. Program-program pada dinas ini memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian indikator kinerja rasio net ekspor terhadap PDRB di Kabupaten Dharmasraya Berikut adalah analisis mengenai kontribusi masing-masing program:

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. Program ini akan membantu meningkatkan efisiensi distribusi produk-produk ekspor. Sarana distribusi yang baik akan memastikan produk-produk dapat mencapai pasar ekspor dengan cepat dan efisien. mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk.
2. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI). Izin Perluasan Usaha Industri (IUII). Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI). Dengan memberikan

izin usaha industri secara efisien. program ini akan mendorong pertumbuhan sektor industri. Pertumbuhan industri akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produksi barang-barang yang dapat diekspor.

3. Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perizinan. Penguatan Kelembagaan. dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. Program ini akan membantu meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha mikro lokal. Dengan mendorong kemitraan dan kolaborasi antara usaha mikro dengan pihak lain seperti pemerintah. lembaga keuangan. dan perguruan tinggi. program ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan usaha mikro yang berorientasi ekspor.
4. Pembuatan Peta Potensi Investasi. Program ini akan memberikan informasi yang komprehensif tentang potensi investasi di Kabupaten Dharmasraya Dengan menarik investasi ke sektor-sektor yang mendukung ekspor. seperti industri manufaktur dan pertanian. program ini akan meningkatkan produksi barang-barang yang dapat diekspor.
5. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal. Melalui kegiatan promosi penanaman modal. program ini akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Dharmasraya. Investasi baru akan membuka peluang baru untuk pengembangan sektor ekspor dan meningkatkan rasio net ekspor terhadap PDRB.
6. Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu. Dengan menyediakan layanan perizinan yang cepat. mudah. dan terpadu. program ini akan membantu mengurangi birokrasi dan mempercepat proses investasi. Hal ini akan mendorong pertumbuhan sektor ekspor dengan menciptakan lingkungan usaha yang ramah bagi investor.

SASARAN STRATEGIS 3.1.2 MENGURANGI PENGANGGURAN

14. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

= PERSENTASE JUMLAH PENGANGGURAN TERHADAP JUMLAH ANGKATAN KERJA (DATA BPS)

= 5.51%

Indikator ini digunakan untuk menggambarkan persentase angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan terhadap total angkatan kerja di suatu wilayah. Indikator ini penting bagi pemerintah daerah karena mencerminkan kondisi pasar kerja serta kemampuan perekonomian daerah dalam menciptakan dan menyerap kesempatan kerja bagi masyarakat. Melalui indikator ini, pemerintah daerah dapat menilai efektivitas pelaksanaan pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

14.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.38 Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan target tahun 2025

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2025			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
6.07	6	5.51	108.17%	Memuaskan	4.9	87.55%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2025

Berdasarkan data tersebut, tingkat pengangguran terbuka menunjukkan perbaikan dibandingkan kondisi awal tahun 2020 sebesar 6,07. Pada tahun 2025, realisasi tercatat sebesar 5,51 atau lebih rendah dari target 6, dengan capaian kinerja 108,17 persen dan predikat memuaskan. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada pada 87,55 persen terhadap target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 4,9, sehingga masih diperlukan upaya lanjutan untuk terus menurunkan tingkat pengangguran terbuka agar target akhir RPJMD dapat tercapai

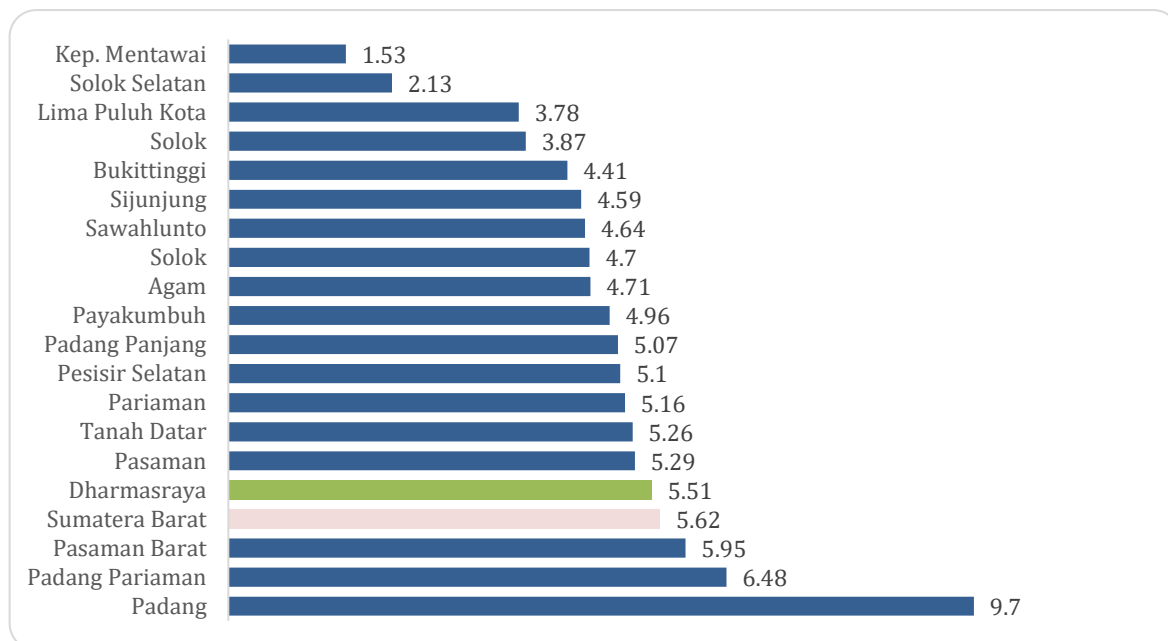
Tabel 3.39 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Predikat
2022	5.68	6.23	90.30%	↓	Sangat Berhasil
2023	5.49	6.22	86.70%	↓	Sangat Berhasil
2024	5.3	6.02	86.42%	↓	Sangat Berhasil
2025	6	5.51	108.71	↑	Memuaskan

Sumber : BPS diolah oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2025

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2022–2025, dapat disimpulkan bahwa kinerja yang dicapai telah memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Meskipun pada beberapa tahun sebelumnya menunjukkan tren penurunan, secara keseluruhan target tetap dapat tercapai dengan predikat sangat berhasil. Pada tahun 2025 terjadi peningkatan capaian kinerja yang menjadikan tahun tersebut sebagai capaian tertinggi dalam periode pengukuran kinerja. Untuk melihat perbandingan kondisi Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik 3.11 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2025



Sumber : Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2026

Berdasarkan data tahun 2025, tingkat pengangguran di Kabupaten Dharmasraya tercatat sebesar 5,51. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 5,62, maka tingkat pengangguran di Kabupaten Dharmasraya berada di bawah rata-rata provinsi. Berdasarkan perbandingan antar Kabupaten/kota, posisi Kabupaten Dharmasraya berada pada peringkat ke-16 dari seluruh Kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Meskipun capaian kinerja telah melebihi target yang ditetapkan, kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Dharmasraya masih tergolong relatif tinggi dibandingkan sebagian daerah lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal dalam peningkatan kesempatan kerja, pengembangan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan sektor ekonomi produktif agar tingkat pengangguran dapat terus ditekan pada tahun-tahun mendatang.

14.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Kabupaten Dharmasraya memiliki penduduk sebesar 240,16 ribu jiwa. Penduduk usia kerja atau biasa disebut tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja Kabupaten Dharmasraya untuk Tahun 2025 berjumlah 135.394. Mata pencaharian penduduk Kabupaten Dharmasraya yaitu sebagai petani, peternak, buruh tani, pedagang, pegawai negeri sipil, pegawai swasta dan sektor jasa.

Kabupaten Dharmasraya memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak, namun faktor pendukung dalam kegiatan ekonomi yang masih kurang dan dengan pendidikan yang relatif rendah sehingga menyebabkan banyak penduduk memilih untuk melakukan pekerjaan apa saja

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini yang menyebabkan banyak penduduk Kabupaten Dharmasraya yang memilih bekerja di sektor informal daripada di sektor formal.

Walau hasil kinerja belum mencapai 100%, namun, beberapa kiat yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya antara lain :

1. Mengadakan kegiatan Skill Development Center (SDC) yaitu lembaga rujukan untuk keterpaduan dan sinegritas kebijakan dan program pengembangan SDM kompetensi. cipta kerja dan potensi tenaga kerja di daerah. dalam rangka penanggulangan pengangguran peningkatan produktivitas dan daya saing serta pertumbuhan ekonomi daerah. SDC memiliki peran dan fungsi sebagai penggerak. promotor dan fasilitator peningkatan kerjasama.koordinasi. keterpaduan dan sinegritas program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan program penciptaan kesempatan kerja.
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan persentase angkatan kerja dan pencari kerja dalam mengasah keterampilan dan memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang atau keahlian masing-masing melalui pelatihan dari BLK
3. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online. dengan indikator jumlah pencari kerja yang terdaftar di SISNAKER.

Namun, meskipun telah melaksanakan berapa kiat, terdapat beberapa permasalahan dalam tercapainya indikator ini termasuk faktor ekonomi. sosial. dan kebijakan. Berikut adalah beberapa penyebab dan alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. Terbatasnya Lowongan Kerja dan Tingginya kebutuhan kerja. salah satu penyebab utama Tingkat Pengangguran yaitu ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang terbatas. Persaingan yang ketat antara para fresh graduate dan tenaga kerja yang berpengalaman juga semakin kuat.
2. Rendahnya kualitas dan ketidaksesuaiannya kualitas pendidikan. Kurangnya akses terhadap pendidikan yang memadai seringkali menyebabkan sebagian besar individu hanya memiliki keterampilan terbatas. membatasi kesempatan mereka untuk mengejar pekerjaan yang lebih kompetitif

Dari permasalahan yang ditemui. dapat disusun beberapa alternatif Solusi untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya antara lain:

1. Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor potensial seperti pariwisata. pertanian. dan industri lokal dapat membuka peluang baru untuk menciptakan lapangan kerja.
2. Maksimalisasi pelatihan pada Balai Latihan Kerja di Kabupaten Dharmasraya sehingga meningkatkan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja dapat

meningkatkan kualifikasi tenaga kerja lokal dan meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja.

3. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui bantuan teknis, akses ke pasar, dan sumber daya finansial dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menciptakan lapangan kerja baru.
4. Pembangunan infrastruktur yang memadai, termasuk transportasi dan teknologi informasi, dapat membuka akses ke wilayah yang terpencil dan meningkatkan konektivitas ekonomi, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja baru.
5. Pemerintah setempat perlu merancang kebijakan yang mendukung investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja, serta memastikan implementasi yang efektif dari kebijakan-kebijakan tersebut.

Melalui implementasi solusi-solusi ini, diharapkan tingkat pengangguran di Dharmasraya dapat dikurangi secara signifikan, menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

SASARAN STRATEGIS 3.1.3 MENGURANGI KEMISKINAN

15. TINGKAT KEMISKINAN

TINGKAT KEMISKINAN = JUMLAH PENDUDUK MISKIN BERDASARKAN PERHITUNGAN OLEH BADAN PUSAT STATISTIK
= 4.61 %

Tingkat kemiskinan merupakan indikator kinerja penting bagi pemerintah daerah karena mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Penurunan tingkat kemiskinan menjadi salah satu tujuan utama pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan ekonomi, serta pengurangan kesenjangan sosial. Melalui indikator ini, pemerintah daerah dapat menilai efektivitas kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan sekaligus merumuskan langkah yang lebih tepat sasaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan pembangunan yang lebih inklusif

15.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.40 Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan berdasarkan target tahun 2025

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2025			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
6.21	5.32	4.61	113.35%	Memuaskan	5.87	121.47%

Sumber Data : BPS diolah oleh DINSOSP3APPKB. 2025

Berdasarkan data tersebut, tingkat kemiskinan menunjukkan perbaikan dibandingkan kondisi awal tahun 2020 sebesar 6,21. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 5,32 dan realisasi berhasil ditekan hingga 4,61 dengan capaian kinerja 113.35 persen serta predikat memuaskan. Karena indikator kemiskinan bersifat semakin rendah semakin baik, maka realisasi yang lebih rendah dari target menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu, capaian tersebut juga telah melampaui target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 5,87 dengan tingkat pencapaian 121,47 persen, yang berarti penurunan tingkat kemiskinan telah melebihi target yang direncanakan.

Tabel 3.41 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (EMPAT) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Predikat
2022	6.08	5.56	108.60%	↑	Memuaskan
2023	6.02	5.56	107.60%	↓	Memuaskan
2024	5.4	5.32	101.40%	↓	Memuaskan
2025	5.32	4.61	113.35%	↑	Memuaskan

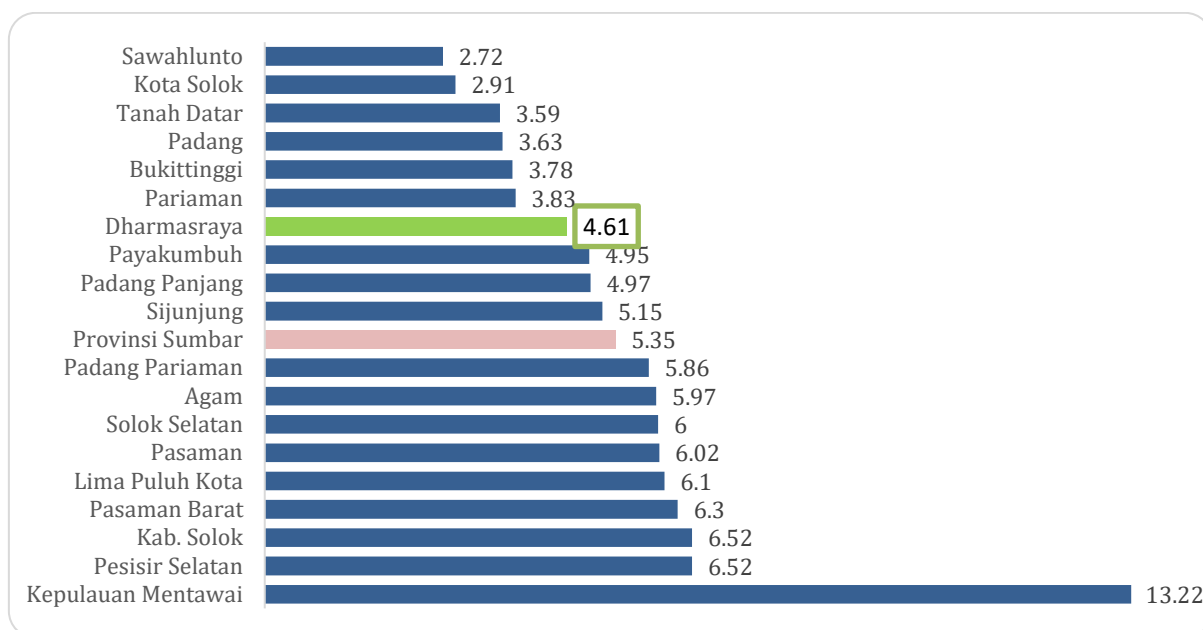
Sumber Data :BPS diolah oleh DINSOSP3APPKB. 2025

Selama periode 2022–2025, kinerja indikator tingkat kemiskinan menunjukkan capaian yang baik dengan realisasi yang selalu lebih rendah dari target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja berada di atas 100 persen dan memperoleh predikat memuaskan. Secara umum kondisi ini menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025 tercatat sebagai capaian terbaik selama empat tahun terakhir, dengan realisasi sebesar 4,61 yang merupakan nilai terendah sekaligus menghasilkan capaian kinerja tertinggi yaitu 113,35 persen.

Meskipun capaian indikator kinerja penurunan kemiskinan di Dharmasraya telah melebihi 100 persen dari target yang ditetapkan, namun Dharmasraya berada di peringkat ke 7 dari 19 Kabupaten kota, posisi peringkat tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan masih perlu terus ditingkatkan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat beberapa daerah yang mampu mencapai tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan Dharmasraya. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah tetap sangat diperlukan dalam memperkuat berbagai kebijakan dan program pengentasan kemiskinan, seperti melalui peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta perluasan program perlindungan sosial agar tingkat kemiskinan di Dharmasraya dapat terus menurun dan posisinya dapat semakin membaik dibandingkan Kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat.

Capaian angka kemiskinan di Kabupaten /kota di Sumatera barat dapat dilihat pada grafik dibawah in:

Grafik 3.12 Tingkat Kemiskinaan Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2025



Sumber : BPS Sumatera Barat, 2025

Berdasarkan grafik persentase penduduk miskin tahun 2025 pada Kabupaten/kota di Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya memiliki tingkat kemiskinan sebesar 4,61 persen. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 5,35 persen, maka tingkat kemiskinan di Dharmasraya berada di bawah rata-rata provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat kemiskinan di Dharmasraya relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi. Dalam perbandingan dengan seluruh Kabupaten/kota di Sumatera Barat, Dharmasraya menempati urutan ke-7 dengan tingkat kemiskinan terendah dari total 19 Kabupaten/kota. Beberapa daerah yang memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah dari Dharmasraya antara lain Sawahlunto, Kota Solok, Tanah Datar, Kota Padang, Bukittinggi, dan Kota Pariaman.

15.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan antara lain Pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan yang di bentuk dengan Keputusan Bupati Dharmasraya. Dengan adanya Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya ada beberapa Hal yang telah dilakukan diantaranya:

1. Melakukan verifikasi dan validasi data;
2. Saling berkoordinasi melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing Tim;
3. Melakukan advokasi dan kerja sama dengan perusahaan serta lembaga dan perbankan yang ada di Kabupaten Dharmasraya untuk melakukan penanganan kemiskinan melalui CSR.

Selain itu, beberapa kegiatan dan upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan, di antaranya:

1. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan Memberikan bantuan ekonomi bagi masyarakat miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dalam bentuk sosialisasi peningkatan ekonomi, pendampingan petugas sosial, serta monitoring dan evaluasi.
2. Program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) dan Kewirausahaan untuk mendorong masyarakat miskin untuk berwirausaha sebagai solusi jangka panjang dalam mengatasi kemiskinan.
3. Bantuan Sosial dan Jaminan Kesejahteraan dengan memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin yang telah diseleksi oleh Kementerian Sosial, menyediakan makanan dan pakaian bagi masyarakat miskin, termasuk kelompok rentan seperti lansia terlantar dan penyandang disabilitas.
4. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar untuk memastikan masyarakat miskin mendapatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan.
5. Memberikan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan dan Korban Bencana Alam dan Sosial
6. Pendataan dan Verifikasi Masyarakat Miskin dengan melakukan pendataan dan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara rutin untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

Semakin rendah angka kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya membuktikan semakin baik penanganan yang sudah dilakukan, selain itu dalam mencapai pengentasan kemiskinan, pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan beberapa upaya yang tertuang dalam perjanjian 100 hari kerja bupati antara lain:

Tabel 3.42 Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja pengentasan kemiskinan

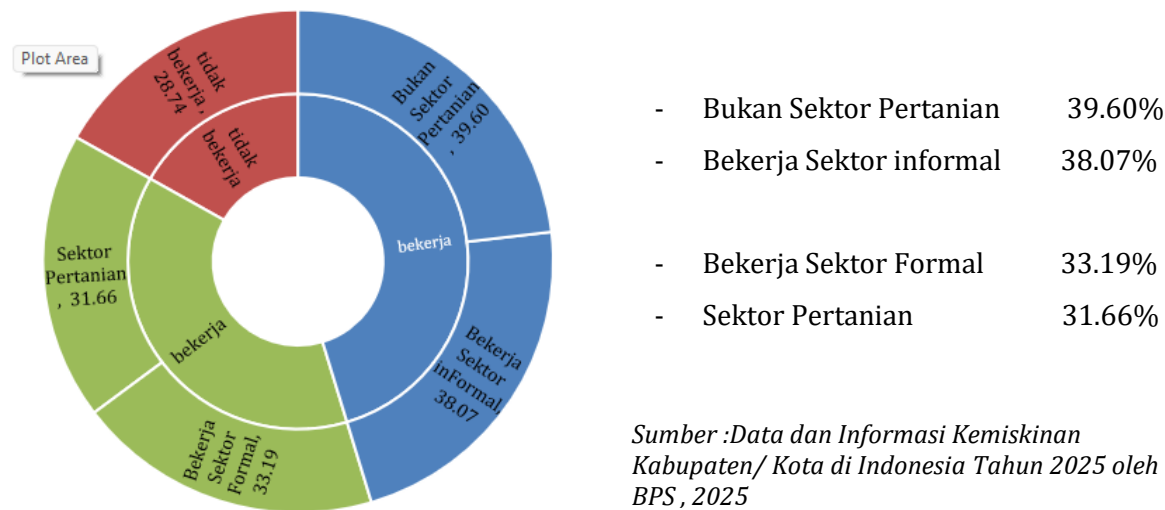
No	Upaya yang telah dilaksanakan	Keterkaitan dengan Indikator Kinerja	Jenis Dukungan
1	Bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin (11 penerima manfaat di 11 kecamatan)	Bantuan modal usaha meningkatkan pendapatan keluarga miskin sehingga mendukung penurunan tingkat kemiskinan daerah	Dukungan pemberdayaan ekonomi masyarakat
2	Perbaikan pendataan sosial (ground checking 13.822 dari 15.595 rumah tangga atau 88,63%)	Data yang akurat membuat program bantuan lebih tepat sasaran sehingga meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan	Dukungan sistem data terpadu kesejahteraan sosial
3	Pelayanan Program	Memperluas akses masyarakat	Dukungan layanan

Kesejahteraan Sosial Gratis di 11 kecamatan dengan 3.120 masyarakat dilayani terhadap pelayanan sosial sehingga mendukung penanggulangan kemiskinan sosial masyarakat

Sumber : Dinsos P3APKB, 2025

Tingkat kemiskinan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas masyarakat usia produktif yang bekerja. Semakin banyak penduduk usia produktif yang memiliki pekerjaan layak, semakin besar kontribusi mereka dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menggerakkan roda perekonomian. Sebaliknya, jika banyak dari mereka yang menganggur atau bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah, maka angka kemiskinan cenderung meningkat. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan, akses terhadap lapangan kerja, serta dukungan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi faktor kunci dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Grafik 3.13 Persentase Penduduk Miskin Dharmasraya Usia 15 Tahun ke Atas menurut Status Bekerja, 2025



Sebagian besar penduduk miskin di Kabupaten Dharmasraya yang berusia 15 tahun ke atas bekerja di luar sektor pertanian (39.60%) dan di sektor informal (38.07%), yang umumnya memiliki pendapatan tidak stabil dan minim perlindungan sosial. Sementara itu, pekerja di sektor formal mencapai 33.19%, sedangkan yang bekerja di sektor pertanian sebesar 31.66%. Tingginya proporsi penduduk miskin di sektor informal menunjukkan bahwa ketidakpastian pekerjaan dan rendahnya akses terhadap pekerjaan yang layak menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Dharmasraya. Kondisi ini menegaskan perlunya upaya peningkatan akses terhadap lapangan pekerjaan yang lebih stabil, produktif, dan berkelanjutan guna menekan angka kemiskinan secara efektif.

Tabel 3.43 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2, dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	2025
----	----------------	------

		Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
1	Kepulauan Mentawai	474.879	1,88	0,46
2	Pesisir Selatan	600.161	0,97	0,11
3	Solok (Kab.)	579.500	0,63	0,10
4	Sijunjung	574.991	0,66	0,14
5	Tanah Datar	564.372	0,21	0,02
6	Padang Pariaman	590.495	0,80	0,18
7	Agam	570.317	0,67	0,10
8	Lima Puluh Kota	593.402	0,63	0,10
9	Pasaman	524.533	0,66	0,12
10	Solok Selatan	558.817	0,93	0,22
11	Dharmasraya	633.451	0,55	0,12
12	Pasaman Barat	669.360	0,85	0,14
13	Padang	767.616	0,60	0,16
14	Solok (Kota)	593.520	0,35	0,07
15	Sawahlunto	545.725	0,33	0,12
16	Padang Panjang	660.705	0,43	0,05
17	Bukittinggi	685.824	0,44	0,11
18	Payakumbuh	674.813	0,54	0,09
19	Pariaman	634.304	0,44	0,07
	Sumatera Barat	729.806	0,74	0,16

Sumber : Dharmasraya dalam angka tahun 2026

Berdasarkan data tahun 2025 pada tabel tersebut, Kabupaten Dharmasraya memiliki garis kemiskinan sebesar Rp633.451 per kapita per bulan, yang tergolong relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa Kabupaten lain seperti Pasaman (Rp524.533), Solok Selatan (Rp558.817), dan Tanah Datar (Rp564.372). Garis kemiskinan yang lebih tinggi ini menunjukkan bahwa biaya minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Dharmasraya relatif lebih besar, sehingga standar pengeluaran yang digunakan untuk menentukan seseorang tergolong miskin juga lebih tinggi. Dari sisi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Dharmasraya memiliki nilai 0,55, yang menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada pada jarak tertentu dari garis kemiskinan. Nilai ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat (0,74), yang mengindikasikan bahwa jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Dharmasraya tidak terlalu dalam dibandingkan kondisi provinsi secara keseluruhan.

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Dharmasraya sebesar 0,12, juga lebih rendah dibandingkan nilai provinsi 0,16. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Dharmasraya tidak terlalu besar, sehingga tingkat kesenjangan dalam kelompok masyarakat miskin relatif lebih kecil. Berdasarkan indikator tersebut, dapat

diindikasikan bahwa meskipun Dharmasraya memiliki garis kemiskinan yang relatif tinggi, kedalaman dan keparahan kemiskinan di daerah ini masih berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian penduduk miskin di Dharmasraya kemungkinan berada tidak terlalu jauh di bawah garis kemiskinan, sehingga berpotensi lebih mudah keluar dari kondisi kemiskinan apabila didukung oleh kebijakan yang tepat, seperti peningkatan kesempatan kerja, penguatan sektor ekonomi lokal, serta program perlindungan sosial yang tepat sasaran.

MISI 4. Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien

Tujuan 4.1 Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik

SASARAN STRATEGIS 4.1.1 BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL



16. INDEKS PERILAKU ANTIKORUPSI

INDEKS PERILAKU ANTIKORUPSI = PENILAIAN YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN PENGAWAS KEUANGAN (BPK)
= 3.85

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat perilaku dan kebijakan anti-korupsi di suatu negara atau wilayah tertentu. IPAK mengukur sejauh mana tindakan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, lembaga, dan masyarakat dalam mencegah, mendeteksi, dan menindak korupsi.

Penggunaan IPAK memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi anti-korupsi suatu daerah. memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan serta merancang strategi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi.

16.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.44 Capaian Kinerja Indeks Perilaku Antikorupsi berdasarkan target tahun 2025

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2025			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
2.9	3.578	3.85*	108.17%	Memuaskan	3.6	106.94%

Ket : Menggunakan Indek Perilaku Antikorupsi Nasional

Sumber : BPS Nasional tahun , 2026

Peningkatan signifikan dalam Indeks Perilaku Antikorupsi juga bisa dianggap sebagai hasil dari implementasi kebijakan yang tepat. pemantauan yang ketat. serta pendidikan dan pelatihan yang terus menerus terkait dengan etika dan integritas. Selain itu. transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan keputusan yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran juga berperan dalam mencapai capaian yang memuaskan ini.

Tabel 3.45 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Perilaku Antikorupsi Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Predikat
2022	3.02	3.9	129.14%	↑	Memuaskan
2023	3.322	3.92	118.00%	↓	Memuaskan
2024	3.92	3.83	97.70%	↓	Sangat Berhasil
2025	3.578	3.85	108.17%	↑	Memuaskan

Sumber :Badan Pusat Statistik. 2025

Tingginya capaian kinerja Indeks Perilaku Antikorupsi selama tiga tahun terakhir ini mencerminkan efektivitas dari berbagai kebijakan dan program yang diterapkan dalam rangka pencegahan korupsi di Kabupaten Dharmasraya. Upaya-upaya seperti peningkatan pemahaman akan hukum dan regulasi terkait korupsi. pengawasan yang ketat terhadap proses pengelolaan dana publik. serta promosi nilai-nilai integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat menjadi faktor utama dalam pencapaian ini.

16.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 untuk mencapai target Indeks Perilaku Antikorupsi antara lain diwujudkan melalui komitmen pemerintah daerah yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja 100 Hari Kerja Bupati antara lain:

Tabel 3.46 Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Indeks Perilaku Antikorupsi tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Analisis Keterkaitan dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi	Jenis Dukungan
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDM APIP	Kapabilitas APIP melalui pelaksanaan audit ketaatan terhadap kecamatan dan nagari serta audit tujuan tertentu	Pelaksanaan audit ketaatan memperkuat fungsi pengawasan internal sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan mencegah potensi penyimpangan.	Penguatan pengawasan internal pemerintah
2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Monitoring LHKPN	Monitoring LHKPN meningkatkan transparansi harta kekayaan penyelenggara negara sehingga mendorong budaya integritas dan akuntabilitas.	Penguatan transparansi pejabat publik
5	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Sosialisasi Saber Pungli dan Gratifikasi	Sosialisasi meningkatkan pemahaman ASN dan masyarakat mengenai praktik pungutan liar dan gratifikasi sehingga mendorong perilaku antikorupsi.	Edukasi dan pencegahan korupsi
6	Audit Internal	Pelaksanaan audit aset pada Sekretariat Daerah, RSUD Sungai Dareh, Dinas PU, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Kumperdag, Dinas Pangan, Badan Keuangan Daerah, dan OPD lainnya	Audit internal terhadap pengelolaan aset dan kinerja OPD meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pengendalian dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah sehingga mencegah potensi penyimpangan.	Penguatan pengawasan pengelolaan aset dan keuangan daerah

Sumber : Inspektorat Dharmasraya , 2025

Kebijakan dan langkah-langkah yang diimplementasikan oleh Kabupaten Dharmasraya telah membawa kesuksesan dalam meningkatkan Indeks Perilaku Anti Korupsi. Berikut adalah analisis beberapa penyebab keberhasilan:

1. Penilaian Zona integritas Kabupaten Dharmasraya yang telah mencapai nilai Wilayah Zona Integritas dari Kementrian PAN RB
2. Publikasi data melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah). data publik di Kabupaten Dharmasraya dapat diakses secara transparan oleh masyarakat. Transparansi ini membuka peluang bagi masyarakat untuk mengawasi dan memantau penggunaan dana publik. sehingga meminimalkan potensi praktik korupsi.
3. Pengawasan oleh inspektorat. Peran aktif inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai aspek pemerintahan menjadi penopang penting dalam mencegah dan menindak potensi tindak korupsi. Pengawasan yang efektif dapat memberikan sinyal jelas bahwa praktik korupsi tidak akan ditoleransi.
4. Tingkatkan level Aparat Pengawas Instansi Pemerintah di Dharmasraya sudah mencapai level 3. hal ini menunjukkan kapasitas dan kompetensi yang baik dalam melakukan pengawasan. Ini memastikan bahwa penegakan aturan dan standar integritas tinggi dijalankan secara konsisten.
5. Penanganan laporan temuan secara efektif. Penanganan laporan temuan dengan cepat dan tepat menunjukkan responsif nya pemerintah terhadap masalah korupsi. Tindakan yang transparan dan tegas memberikan sinyal bahwa pelanggaran etika dan hukum tidak akan ditoleransi.
6. Pengawasan terhadap perencanaan kinerja. pengukuran kinerja. pelaporan kinerja. dan monitoring pelaksanaan kinerja. Pengawasan yang menyeluruh terhadap seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah memastikan akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik. Dengan demikian. potensi kecurangan dan korupsi dapat diminimalkan.

Dengan implementasi berbagai langkah ini secara komprehensif. Kabupaten Dharmasraya telah berhasil membangun lingkungan yang tidak hanya bersih dari korupsi. tetapi juga transparan. akuntabel. dan berintegritas tinggi, selain itu, Penggunaan Sumber Daya di Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan indeks perilaku anti-korupsi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. termasuk implementasi kebijakan dan penggunaan sumber daya yang tepat. Berikut adalah analisisnya:

1. Peningkatan Transparansi melalui Website PPID. Ketersediaan website PPID Dharmasraya (<https://ppid.dharmasrayakab.go.id>) memberikan aksesibilitas yang lebih luas kepada publik untuk mengakses informasi terkait dengan kebijakan. anggaran. dan program pemerintah. Dengan demikian. masyarakat dapat lebih mudah memantau dan mengawasi penggunaan sumber daya publik. yang dapat mengurangi peluang praktik korupsi.

2. Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Level 3. Keberadaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah level 3 menandakan adanya sistem pengawasan yang matang dan berkualitas di Kabupaten Dharmasraya. Dengan memiliki jabatan fungsional seperti auditor dan pengawas Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan secara efektif terhadap setiap aktivitas pemerintah, termasuk penggunaan sumber daya, sehingga meminimalkan risiko penyelewengan atau korupsi.
3. Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) memiliki peran penting dalam memastikan keterbukaan informasi di pemerintahan. Dengan mengelola website PPID, informasi yang terkait dengan kegiatan pemerintah menjadi lebih mudah diakses oleh publik. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi penggunaan sumber daya publik.

Dengan adanya implementasi kebijakan dan penggunaan sumber daya yang efisien, Kabupaten Dharmasraya dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari korupsi. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahannya. Dengan demikian, indeks perilaku anti-korupsi dapat terus meningkat, menciptakan pemerintahan yang lebih berintegritas dan berkelanjutan.

16.3 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang disebutkan memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi di Kabupaten Dharmasraya. Berikut adalah analisisnya:

1. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu. Program ini memberikan fokus pada pengawasan terhadap area-area yang dianggap memiliki risiko tinggi terkait dengan praktik korupsi. Dengan mengidentifikasi dan memprioritaskan area-area tersebut, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mencegah dan menanggulangi potensi praktik korupsi. Langkah ini membantu meningkatkan efektivitas pengawasan dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi.
2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan. Program ini menciptakan landasan kebijakan yang kuat untuk pengawasan internal dan eksternal di Kabupaten Dharmasraya. Dengan merumuskan kebijakan teknis yang jelas dan terarah, pemerintah dapat memberikan panduan yang diperlukan bagi para pelaksana pengawasan. Langkah ini membantu memastikan konsistensi dan standar yang tinggi dalam pelaksanaan pengawasan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik.
3. Penyelenggaraan Pengawasan Internal. Melalui program ini, pemerintah dapat memastikan bahwa lembaga-lembaga pemerintah di Kabupaten Dharmasraya memiliki

mekanisme pengawasan internal yang efektif. Pengawasan internal yang kuat dapat membantu mendeteksi dan mencegah praktik korupsi di tingkat operasional, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik. Langkah ini memberikan jaminan bahwa setiap kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas.

Dengan menggabungkan program-program ini dan kegiatan-kegiatan lain yang sejalan, Kabupaten Dharmasraya dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya bersih dari korupsi, tetapi juga transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Langkah-langkah ini membantu membangun fondasi yang kuat bagi tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahannya.

17. OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

= HASIL EVALUASI/OPINI BPK RI PADA TAHUN -N TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN -1N

= WTP

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan kepada pemerintah daerah menandakan bahwa entitas tersebut telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengelola keuangan publik. Hal ini mencerminkan tingkat kedisiplinan dan transparansi yang tinggi dalam penyusunan laporan keuangan, serta menunjukkan bahwa entitas tersebut telah mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku. Opini WTP menjadi prestasi yang membanggakan bagi pemerintah daerah, karena menunjukkan bahwa pengelolaan dana publik dilakukan dengan integritas, akuntabilitas, dan efisiensi yang tinggi, serta memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa sumber daya publik dikelola dengan baik.

Prestasi ini juga menjadi indikasi bahwa pemerintah daerah telah berhasil menjalankan tugasnya dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, serta membangun fondasi yang kuat bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Opini WTP juga menciptakan kepercayaan yang lebih besar dari pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, dan masyarakat umum, terhadap kinerja dan integritas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menggunakan opini WTP sebagai landasan untuk terus meningkatkan praktik pengelolaan keuangan yang baik, serta memperkuat hubungan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

17.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.47 Capaian Kinerja Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan berdasarkan target tahun 2025

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2025			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			

WTP	WTP	WTP	100%	Memuaskan	WTP	100%
------------	-----	-----	------	-----------	-----	------

Sumber Data :Badan Keuangan Dharmasraya (BPK).2025

Dari tabel yang disajikan. dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Dharmasraya telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam indikator kinerja terkait opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangannya. Capaian 100% opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menunjukkan bahwa laporan keuangan Kabupaten Dharmasraya telah dianggap memadai. transparan. dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Tabel 3.48 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2022	WTP	WTP	100%
2023	WTP	WTP	100%
2024	WTP	WTP	100%
2025	WTP	WTP	100%

Sumber : Badan Keuangan Dharmasraya. 2025

Dari Tabel 17.2.1. terlihat bahwa Kabupaten Dharmasraya telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2021-2024, Capaian kinerja ini menunjukkan konsistensi dan keunggulan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan selama tiga tahun terakhir.

Dengan mencapai opini WTP sebanyak 100% setiap tahunnya. Kabupaten Dharmasraya menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap transparansi. akuntabilitas. dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Capaian ini juga mencerminkan integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan publik. serta memberikan keyakinan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan Kabupaten Dharmasraya dapat diandalkan dan dapat dipercaya.

Dengan demikian. kesimpulan dari tabel tersebut adalah Kabupaten Dharmasraya telah mempertahankan kualitas dan konsistensi dalam penyusunan laporan keuangan selama tiga tahun terakhir. yang tercermin dari capaian opini WTP yang mencapai 100% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi dalam mengelola keuangan publik.

17.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Keputusan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kabupaten Dharmasraya yang diberikan melalui oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Barat menegaskan bahwa tidak ditemukan ketidakpatuhan atau kekurangan yang signifikan dalam laporan keuangan tersebut. Opini WTP

dari BPK mengindikasikan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah berhasil mencapai tingkat memuaskan dalam mempertahankan kualitas dan transparansi laporan keuangannya. yang tercermin dari opini WTP yang diberikan oleh BPK RI. Hal ini menjadi pencapaian yang penting dan membanggakan bagi Kabupaten Dharmasraya. serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan public.

Penyebab keberhasilan laporan keuangan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian karena Kabupaten Dharmasraya telah melaporkan keuangan yang disebut di atas. menyajikan secara wajar. dalam semua hal yang material. posisi keuangan Pememerintah Kabupaten Dharmasraya tanggal 31 Desember 2024. dan realisasi anggaran. perubahan saldo anggaran lebih. operasional. arus kas. serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, beberapa penyebab keberhasilan Kabupaten Dharmasraya yang lainnya antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah berhasil mengalokasikan sumber daya dengan efisien untuk menyusun laporan keuangan yang tepat dan akurat. Proses ini melibatkan penyiapan data. analisis. dan dokumentasi yang cermat. serta memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan secara akurat posisi keuangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Internal dalam rangka pengawasan internal yang efektif dan peningkatan kapasitas staf keuangan telah membantu memastikan efisiensi penggunaan sumber daya dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan memiliki tim yang terlatih dan kompeten. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat mengurangi biaya overhead dan meningkatkan produktivitas dalam proses persiapan laporan keuangan.
3. Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah membantu dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan menerima dan menerapkan rekomendasi BPK secara tepat waktu. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat meminimalkan risiko penundaan atau ketidaksempurnaan dalam proses audit. sehingga menghemat sumber daya yang diperlukan untuk penyelesaian laporan keuangan.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan dan pelaporan keuangan telah membantu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan mengadopsi sistem yang terintegrasi dan otomatis. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk pengolahan data. serta meminimalkan kesalahan manusia dalam proses tersebut.

Program-program yang dialokasikan seperti Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah. Koordinasi dan

Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah. dan Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki peran yang krusial dalam mendukung pencapaian indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah memberikan landasan yang kuat untuk pengumpulan. penyimpanan. dan pengolahan data keuangan. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi. proses pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat. sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan yang diajukan kepada BPK.

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah serta Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah membantu dalam menjamin bahwa anggaran pemerintah daerah dialokasikan dengan tepat sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu. pengelolaan perbendaharaan yang baik juga memastikan kelancaran dalam pengeluaran dan penerimaan keuangan daerah. yang mencerminkan akuntabilitas dan transparansi.

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mendukung proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan menjalankan proses akuntansi yang tepat dan tepat waktu. Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dapat memastikan bahwa laporan keuangannya memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah juga memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya keuangan daerah dengan baik. Dengan mengatur pengelolaan aset dan keuangan dengan efisien. Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dapat meningkatkan transparansi. meminimalkan risiko penyelewengan. dan meningkatkan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan.

18. HASIL EVALUASI AKIP

HASIL EVALUASI AKIP	=	NILAI YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENTRIAN PAN RB
		BERDASARKAN HASIL PENILAIAN EVALUASI SISTEM
		AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
		= B (67.42)

Indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen penting dalam menilai tingkat akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui indikator ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan tujuan pembangunan serta berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), indikator SAKIP menjadi dasar untuk menggambarkan keterkaitan antara perencanaan,

pelaksanaan program, penggunaan anggaran, dan capaian kinerja, sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat serta pemangku kepentingan.

18.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.49 Perbandingan antara target kinerja Hasil Evaluasi AKIP dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2025			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
B 63.44	(BB) 70	67.42	96.31	Sangat Baik	A (80)	84.28

Sumber data : Kemenpan diolah oleh Bagian Organisasi. 2025

Capaian nilai SAKIP tahun 2025 sebesar 67,42 atau 96,31% dari target 70, sehingga termasuk kategori sangat baik. Jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2020 sebesar 63,44 (predikat B), capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja serta telah mencapai 84,28% dari target akhir RPJMD tahun 2026 yaitu predikat A dengan nilai 80, sehingga menggambarkan progres yang positif menuju target yang telah ditetapkan. Untuk melihat tren kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

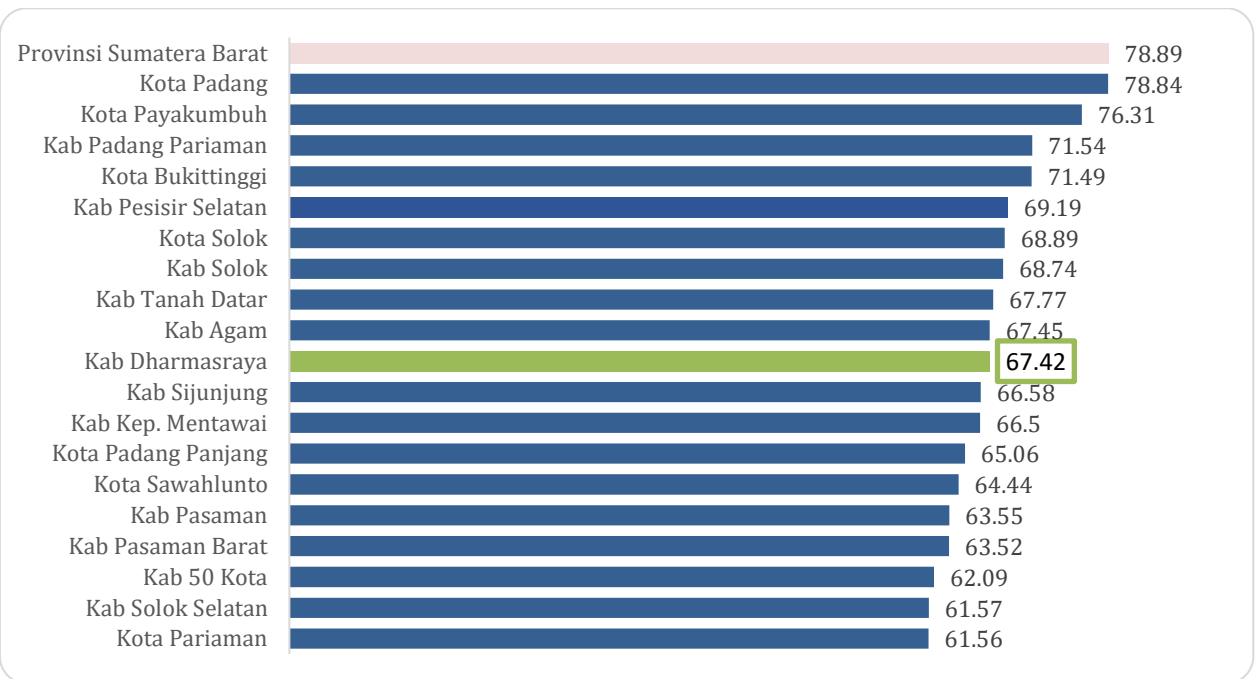
Tabel 3.50 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Predikat
2022	70	64.07	91.53%	↑	Sangat Berhasil
2023	70	64.65	92.35%	↑	Sangat Berhasil
2024	70	67.24	96.06%	↑	Sangat Berhasil
2025	(BB) 70	67.42	96.31%	↑	Sangat Berhasil

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. 2025

Berdasarkan data tahun 2022–2025, capaian nilai SAKIP menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Realisasi meningkat dari 64,07 pada tahun 2022 menjadi 67,42 pada tahun 2025, dengan capaian kinerja yang selalu berada di atas 90 persen dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2025, realisasi mencapai 67,42 atau 96,31 persen dari target 70 dengan predikat sangat berhasil, sehingga menunjukkan bahwa upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah terus mengalami perbaikan dan bergerak ke arah yang positif.

Grafik 3.14 Nilai SAKIP Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2025



Sumber : Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat, 2026

Berdasarkan grafik nilai evaluasi SAKIP Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, Kabupaten Dharmasraya memperoleh nilai 67,42 dan berada pada peringkat ke-10 dari 19 Kabupaten/kota. Posisi ini menempatkan Dharmasraya pada kelompok tengah di antara daerah lain di Sumatera Barat. Nilai tersebut masih berada di bawah beberapa daerah dengan capaian lebih tinggi seperti Kota Padang, Kota Payakumbuh, dan Kota Bukittinggi, namun juga berada di atas beberapa daerah lainnya seperti Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten 50 Kota, Kota Pariaman, dan Kabupaten Solok Selatan. Meskipun demikian, capaian Dharmasraya sudah cukup mendekati ambang nilai 70 yang merupakan batas menuju penguatan predikat BB. Dengan realisasi sebesar 67,42, Kabupaten Dharmasraya masih memerlukan peningkatan sekitar 2,58 poin untuk mencapai nilai 70, sehingga upaya perbaikan dalam implementasi SAKIP, khususnya pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja, masih perlu terus ditingkatkan agar dapat mendorong peningkatan nilai pada evaluasi berikutnya.

18.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Berikut adalah tabel yang menunjukkan perkembangan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2023 hingga 2025. Tabel ini mencakup empat komponen utama yang dinilai, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal, beserta bobot masing-masing komponen serta perubahan nilai dari tahun ke tahun.

Tabel 3.51 Komponen Penilaian SAKIP

No	Komponen yang dinilai	bobot	Nilai		
			2023	2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30	22.28	22.75	22,85
2	Pengukuran Kinerja	30	18.64	19.54	19.54
3	Pelaporan Kinerja	15	10.81	11.52	11.60
4	Evaluasi Internal	25	12.92	13.43	13.43
Nilai Hasil Evaluasi		100	64.07	64.65	67.42
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	B

Sumber Data :LHE AKIP oleh Kementerian PAN-RB. 2025

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk mencapai kinerja ini antara lain :

1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja di Kabupaten Dharmasraya telah didukung melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk perencanaan dan penganggaran, serta penggunaan aplikasi e-Kinerja dalam mendukung penjenjangan kinerja organisasi hingga individu. Pemanfaatan sistem tersebut bertujuan memastikan proses perencanaan kinerja tersusun secara terukur, terarah, dan selaras dengan visi dan misi Bupati. Integrasi berbagai aplikasi yang didukung oleh penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga turut mendorong efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja di Kabupaten Dharmasraya didukung melalui pemanfaatan aplikasi e-SAKIP (e-sakip.dharmasraya.go.id) untuk memantau capaian kinerja perangkat daerah serta aplikasi e-Kinerja BKN untuk memonitor kinerja individu aparatur. Proses pemantauan dilakukan secara berkala guna memastikan ketercapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penerapan mekanisme reward dan punishment dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dimana salah satu bentuk penghargaan yang diberikan adalah penilaian kinerja dengan kategori sangat baik serta pemberian angka kredit bagi aparatur yang menunjukkan kinerja selaras dengan tujuan dan sasaran organisasi.

3. Pelaporan Kinerja

Penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan secara transparan, akurat, dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance. Proses pelaporan didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem e-SAKIP Kabupaten Dharmasraya yang mengintegrasikan tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja. Pemanfaatan sistem ini memungkinkan pengolahan dan pemantauan data kinerja

secara lebih cepat dan terintegrasi, sehingga proses evaluasi serta perbaikan kebijakan dapat dilakukan secara lebih responsif. Selain itu, pelaporan kinerja telah disusun secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, disampaikan tepat waktu oleh perangkat daerah, serta dipublikasikan kepada masyarakat melalui PPID Kabupaten Dharmasraya sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

4. Evaluasi Internal

Evaluasi internal kinerja di Kabupaten Dharmasraya dilakukan secara rutin untuk memastikan seluruh perangkat daerah menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja secara optimal. Proses evaluasi dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Dharmasraya melalui kegiatan evaluasi dan pengawasan internal yang disertai dengan pemberian rekomendasi perbaikan kepada perangkat daerah. Selain itu, monitoring pelaksanaan kinerja juga dilakukan secara berkala setiap triwulan dengan dukungan aplikasi pemantauan kinerja, sehingga tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dapat dipantau secara lebih sistematis dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya perlu melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan Perencanaan Kinerja

Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan memastikan keterkaitan yang jelas antara dokumen perencanaan, program dan kegiatan, serta penganggaran yang berorientasi pada hasil (outcome) sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

2. Optimalisasi Pengukuran Kinerja

Meningkatkan sistem pengukuran dan pemantauan kinerja perangkat daerah agar dapat menggambarkan kontribusi setiap unit kerja secara lebih terukur terhadap pencapaian sasaran strategis daerah, serta mendorong peningkatan disiplin, kinerja, dan motivasi aparatur dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja

Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi kinerja yang terintegrasi guna mendukung proses pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan kinerja yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel sebagai dasar dalam pengambilan keputusan berbasis data.

4. Penguatan Evaluasi Akuntabilitas Internal

Meningkatkan efektivitas pengawasan dan evaluasi internal melalui peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memastikan penerapan prinsip akuntabilitas

kinerja berjalan secara konsisten di seluruh perangkat daerah serta menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan dan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.

19. NILAI LPPD

NILAI LPPD	= SKOR EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH YANG DI KELUARKAN OLEH KEMENTRIAN DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH
	= 2.7029

LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) merupakan laporan yang memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. termasuk di dalamnya tentang pelaksanaan pembangunan. pelayanan publik. serta pemanfaatan sumber daya dan keuangan daerah. Nilai LPPD pemerintah daerah dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor. termasuk kualitas penyelenggaraan pemerintahan. efektivitas program pembangunan. kualitas pelayanan publik. serta transparansi dan akuntabilitas penggunaan sumber daya publik.

Secara umum. semakin tinggi nilai LPPD suatu pemerintah daerah. semakin baik pula penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dalam aspek transparansi. akuntabilitas. dan efektivitas penggunaan sumber daya publik. Oleh karena itu. nilai LPPD merupakan indikator penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dan memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

19.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.52 Capaian Kinerja LPPD berdasarkan target tahun 2025

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2025			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
3.5138	3.8	2.7029	71.13%	Cukup Berhasil	3.9000	69.46

Sumber Data : Bagian Pemerintahan. 2025

Pada kondisi awal tahun 2020, nilai kinerja tercatat sebesar 3,5138. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 3,8 dengan realisasi yang dicapai sebesar 2,7029, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 71,13 persen dengan predikat cukup berhasil. Sementara itu, target akhir RPJMD tahun 2026 ditetapkan sebesar 3,9000. Dengan capaian tersebut, progres terhadap target akhir RPJMD telah mencapai 69,46 persen, yang menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan kinerja agar target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai secara optimal.

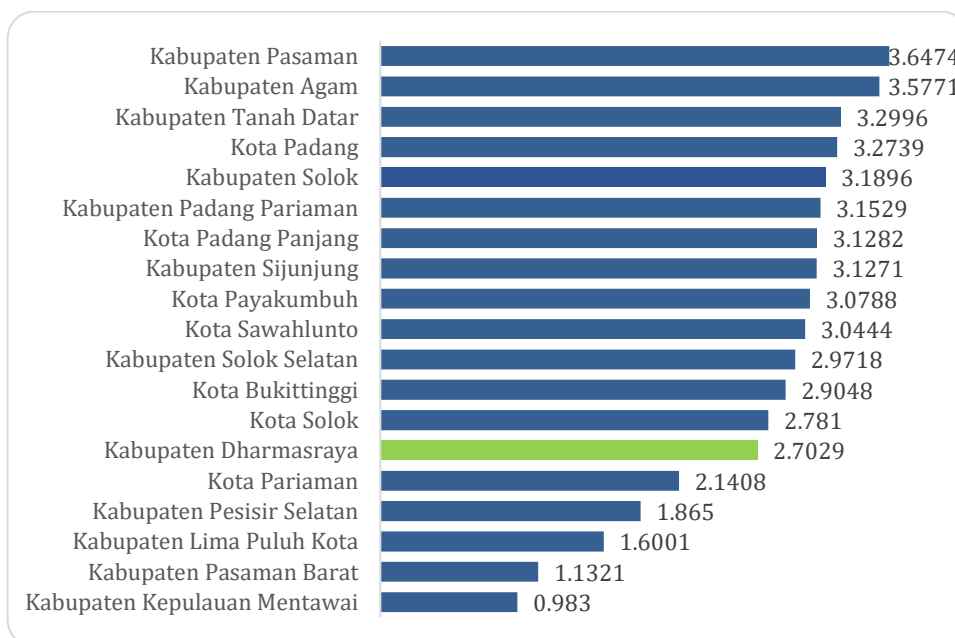
Tabel 3.53 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Nilai LPPD Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Predikat
2021	3.6	3.51	97.20%	→	Sangat Berhasil
2022	3.65	3.51	96.20%	↓	Sangat Berhasil
2023	3.7	3.5036	94.69%	↓	Sangat Berhasil
2024	3.75	3.5036	93.43%	↓	Sangat Berhasil
2025	3.8	2.7029	71.13%	↓	Cukup Berhasil

Sumber Data : Bagian Pemerintahan. 2025

Berdasarkan data tahun 2021–2025, capaian kinerja secara umum masih berada di bawah target yang ditetapkan. Pada tahun 2021–2024 capaian kinerja masih berada pada predikat sangat berhasil meskipun menunjukkan tren menurun. Sementara itu pada tahun 2025 realisasi menurun menjadi 3,27029 dari target 3,8 dengan capaian 71,13 persen dan predikat cukup berhasil. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan kinerja agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Grafik 3.15 Nilai LPPD Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2025



Sumber :Kepmendagri nomor 100.2.1.7 - 2109 tahun 2025

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan LPPD pada Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, nilai Kabupaten Dharmasraya tercatat sebesar 2,7029. Nilai ini menempatkan Kabupaten Dharmasraya pada peringkat ke-14 dari 19 Kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Jika dibandingkan dengan daerah lain, nilai Dharmasraya masih berada di kelompok menengah ke bawah. Beberapa daerah memiliki capaian yang jauh lebih tinggi, seperti Kabupaten Pasaman (3,6474), Kabupaten Agam (3,5771), dan Kabupaten Tanah Datar (3,2996). Bahkan beberapa kota seperti Kota Padang (3,2739) juga memiliki nilai lebih tinggi dari Dharmasraya. Namun demikian, nilai Dharmasraya masih lebih baik dibandingkan beberapa daerah dengan nilai terendah, seperti Kota Pariaman (2,1408), Kabupaten Pesisir Selatan (1,8650), Kabupaten Lima Puluh Kota (1,6001), Kabupaten Pasaman Barat (1,1321), dan Kabupaten Kepulauan Mentawai (0,983).

Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Dharmasraya masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Barat. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah menjadi faktor penting untuk mendorong peningkatan nilai LPPD pada periode evaluasi berikutnya.

19.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Analisis dengan Nilai AKIP	Keterkaitan Jenis Dukungan
1	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Reviu LKPD meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sehingga meminimalkan potensi praktik korupsi.	Penguatan akuntabilitas keuangan daerah
2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Reviu LPPD memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan sehingga memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.	Penguatan tata kelola pemerintahan

Sumber : Inspektorat Dharmasraya, 2025

Penurunan nilai **LPPD Kabupaten Dharmasraya** pada periode terakhir menunjukkan adanya tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi ini terutama disebabkan oleh belum sepenuhnya selarasnya indikator utama dalam LPPD dengan program dan kegiatan yang tercantum dalam **RPJMD**, sehingga beberapa capaian kinerja yang dilaporkan

belum secara optimal merepresentasikan hasil pembangunan daerah. Ketidaksinkronan tersebut berdampak pada penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, meskipun berbagai program telah dilaksanakan.

Selain itu, dalam proses penyusunan LPPD masih dijumpai kendala berupa keterlambatan pengiriman data dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Bagian Pemerintahan sebagai koordinator penyusunan laporan di tingkat Kabupaten. Keterlambatan ini berpotensi menghambat proses konsolidasi data serta mempengaruhi ketepatan waktu dan kualitas laporan yang disampaikan. Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan sumber daya, padatnya aktivitas perangkat daerah, serta koordinasi yang belum optimal antar-OPD.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah melakukan beberapa langkah perbaikan, antara lain memperkuat koordinasi dan komunikasi antar-OPD dalam proses pengumpulan data, meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai pentingnya ketepatan waktu penyampaian data, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui **aplikasi SI ELPPD** yang dikelola oleh operator pada Bagian Pemerintahan. Melalui pembaruan data secara berkala pada aplikasi tersebut, proses pengumpulan, verifikasi, dan pengolahan data dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Pemanfaatan sistem informasi ini juga mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena data kinerja terdokumentasi dengan lebih baik dan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi serta perumusan kebijakan pembangunan. Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan ke depan terjadi peningkatan kualitas penyelarasan antara indikator kinerja LPPD dengan RPJMD, sehingga kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Dharmasraya dapat kembali meningkat dan memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

SASARAN STRATEGIS 4.1.2 BIROKRASI YANG BERKUALITAS

20. INDEKS KELEMBAGAAN

TIDAK ADA PENILAIAN INDEKS KELEMBAGAAN SEHINGGA TIDAK DAPAT DILAKUKAN ANALISA LEBIH LANJUT

21. INDEKS SPBE

INDEKS SPBE = NILAI INDEKS YANG MEREPRESENTASIKAN TINGKAT PELAKSANAAN SPBE SECARA KESELURUHAN. = 3.61 (Data Sementara menggunakan angka tahun sebelumnya karena belum ada publikasi nilai SPBE di tahun 2025)

21.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.54 Capaian Kinerja Indeks SPBE berdasarkan target tahun 2025

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2025			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
1.09	3.61	3.61*	100%	Memuaskan	3	120.3%

Keterangan : * Data Sementara

Sumber Data : Dinas Komunikasi Informatika.2025

Berdasarkan data tersebut, indikator yang diukur menunjukkan kinerja sangat baik. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 3,61 dan berhasil direalisasikan 3,61, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% dengan predikat memuaskan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 3, maka realisasi tahun 2025 telah mencapai 120,3%, yang berarti target akhir RPJMD telah terlampaui sebelum periode perencanaan berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah berjalan secara efektif, untuk melihat tren selama beberapa terakhir, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.55 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks SPBE Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 5 (Lima) Tahun Terakhir

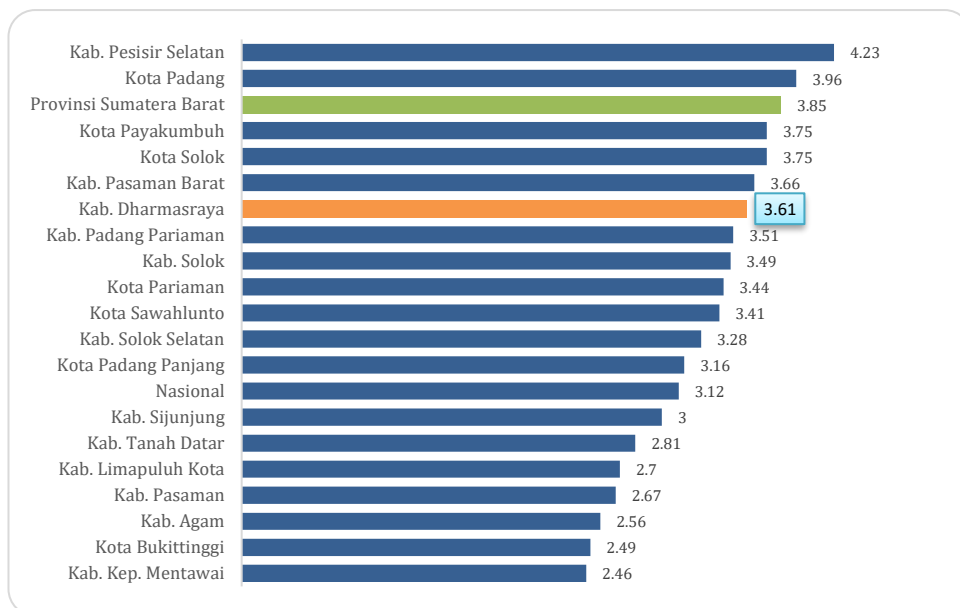
Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Predikat
2021	1.625	1.09	67.08%	→	Cukup Berhasil
2022	1.9	2.41	127.89%	↑	Memuaskan
2023	2.41	2.83	117.43	↑	Memuaskan
2024	2.83	3.61	127.56%	↓	Memuaskan
2025	3.61	3.61*	100%	↓	Memuaskan

Keterangan : * Data Sementara

Sumber Data : Dinas Komunikasi Informatika.2025

Pada tahun 2025 realisasi tetap berada pada angka 3,61 sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 100%. Meskipun secara persentase terjadi penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya karena target yang semakin meningkat, kinerja indikator ini tetap berada pada kategori memuaskan. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 3, capaian tahun 2025 telah mencapai sekitar 120,3% dari target tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja indikator sebenarnya sudah melampaui target pembangunan jangka menengah daerah meskipun persentase capaian tahunannya terlihat menurun.

Grafik 3.16 Indeks SPBE Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat Tahun 2025



Sumber Data : Kepmenpan RB No.633/2024

Berdasarkan grafik, Kabupaten Dharmasraya meraih skor Indeks SPBE sebesar 3.61, menempatkannya di peringkat ke-6 dari seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Dharmasraya berada di atas Kabupaten Padang Pariaman (3.51) dan Kabupaten Solok (3.49), namun masih berada di bawah Kabupaten Pesisir Selatan (4.23), Kota Padang (3.96), serta Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan (3.85). Capaian ini menunjukkan bahwa Dharmasraya telah berhasil meningkatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan baik, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan agar dapat mencapai peringkat lebih tinggi di masa mendatang.

21.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Beberapa upaya tersebut tertuang dalam program 100 Hari Kerja bersama Bupati antara lain:

Tabel 3.56 Upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai kinerja Peningkatan Indeks SPBE

No	Indikator Kinerja	Target	Analisis Keterkaitan dengan Indeks SPBE	Jenis Dukungan
1	Layanan pengaduan masyarakat berbasis WhatsApp (Lapor Kak	100%	Sistem pengaduan digital mempermudah masyarakat menyampaikan aspirasi dan meningkatkan respons pemerintah	Digitalisasi layanan pengaduan

	Annisa)		secara elektronik sehingga mendukung peningkatan layanan publik berbasis SPBE.	masyarakat
2	Pengembangan aplikasi pemerintahan (Dasawisma Online, Absensi Online/ABON)	80%	Pengembangan aplikasi pemerintahan mendukung digitalisasi proses administrasi dan pelayanan internal pemerintah yang menjadi komponen dalam evaluasi layanan SPBE.	Pengembangan aplikasi pemerintahan
3	Integrasi layanan internet seluruh OPD dan kecamatan	80%	Konektivitas internet yang terintegrasi menjadi infrastruktur utama dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik antar perangkat daerah.	Penguatan infrastruktur TIK pemerintah
4	Optimalisasi Srikandi dan Tanda Tangan Elektronik	95%	Pemanfaatan aplikasi Srikandi dan Tanda Tangan Elektronik mendukung digitalisasi persuratan dan proses administrasi pemerintahan yang merupakan indikator penting dalam penerapan SPBE.	Digitalisasi tata naskah dinas dan layanan administrasi
5	Platform data statistik nagari (Satu Data – pilot project 4 nagari)	80%	Pengembangan platform data nagari mendukung integrasi data pemerintahan dan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia yang menjadi bagian dari manajemen data SPBE.	Integrasi dan pengelolaan data pemerintah
6	Portal e-SAKIP untuk pelaporan kinerja dan anggaran	100%	Penerapan sistem pelaporan kinerja secara elektronik meningkatkan transparansi dan efisiensi tata kelola pemerintahan yang mendukung implementasi SPBE.	Digitalisasi sistem manajemen kinerja
7	Pembangunan tower telekomunikasi di wilayah blank signal	±100%	Pembangunan jaringan telekomunikasi memperluas akses internet masyarakat dan perangkat daerah sehingga mendukung implementasi layanan pemerintahan berbasis elektronik.	Penguatan infrastruktur jaringan digital

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Dharmasraya, 2025

Dari tahun 2021. Nilai Indeks SPBE Kabupaten Dharmasraya berada di angka 1.09 (kurang) dan menduduki peringkat kedua terendah di Propinsi Sumatera Barat. pada tahun

2022 sudah mulai mengalami peningkatan berada pada indeks 2.41 (kurang). dan pada Tahun 2025 mengalami kenaikan yang cukup significant yaitu di angka 3.61 (Sangat baik). Adapun usaha yang dilakukan dalam upaya meningkatkan angka indeks SPBE yang telah dilakukan adalah dengan melengkapi Data dan Dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan dokumen evaluasi SPBE dari Kemenpan RB. seperti Dokumen Regulasi SPBE. Kebijakan yang telah dimiliki. sistem Manajemen SPBE serta Layanan SPBE yang telah diterapkan dalam sistem pemerintahan Kabupaten Dharmasraya.

Untuk mendukung kinerja ini, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah membentuk tim yang berperan penting dalam penilaian indeks SPBE. pada tahun 2022. belum ada Peraturan Daerah terkait SPBE. namun di tahun 2023 telah terbit peraturan Daerah terkait SPBE. tim terdiri dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Sekretariat Daerah. Inspektorat. serta OPD lainnya yang terkait dalam mendukung peningkatan SPBE di Kabupaten Dharmasraya. selain itu Perlu keseriusan serta kerjasama seluruh Perangkat Daerah yang terkait dalam Evaluasi SPBE untuk mewujudkan Sistem pemerintahan berbasis elektronik.

keberhasilan peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Pemanfaatan Sistem Digital dalam Administrasi dan Layanan Publik
 - a. Dinas Kominfo mendorong penggunaan sistem digital dalam layanan administrasi dan layanan publik, baik yang didukung langsung maupun tidak langsung oleh instansi tersebut.
 - b. Tahun 2023 terdapat 77 layanan berbasis elektronik, meningkat menjadi 111 layanan pada Tahun 2025 dengan capaian 179%, yang dikategorikan sebagai memuaskan.
2. Integrasi Layanan dengan Domain Pemerintah Daerah
 - a. Pada Tahun 2025, dari 111 layanan SPBE, terdapat 40 aplikasi dan 71 website yang telah terintegrasi dalam domain dharmasrayakab.go.id.
 - b. Integrasi ini membantu meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas layanan digital di lingkungan pemerintahan.
3. Dukungan Anggaran dan Infrastruktur
 - a. Peningkatan sistem berbasis elektronik ini juga ditunjang dengan serapan anggaran yang baik, meskipun fokusnya lebih pada pemeliharaan jaringan daripada peningkatan infrastruktur baru.
 - b. Pendanaan tambahan juga diperoleh melalui APB Nagari, yang membantu memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
4. Tantangan Sumber Daya Manusia dan Solusi yang Diterapkan

- a. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan jumlah dan kemampuan programmer untuk mengembangkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan OPD.
- b. Untuk mengatasi kendala ini, Dinas Kominfo telah mengambil langkah-langkah seperti pelatihan teknis dan optimalisasi sumber daya yang tersedia.

Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan peningkatan SPBE di Kabupaten Dharmasraya didukung oleh digitalisasi layanan, integrasi sistem, pendanaan yang memadai, serta upaya adaptasi terhadap keterbatasan sumber daya manusia.

Program atau kegiatan yang menunjang pencapaian indikator Indeks SPBE di Kabupaten Dharmasraya adalah adopsi aplikasi dan layanan berbasis elektronik di seluruh perangkat daerah. Melalui penerapan teknologi informasi. Kabupaten Dharmasraya dapat meningkatkan efisiensi. transparansi. dan kualitas layanan publik. Beberapa program dan kegiatan yang dapat diidentifikasi dalam konteks ini meliputi:

1. Implementasi Aplikasi Administrasi Publik: Penggunaan aplikasi administrasi publik memungkinkan perangkat daerah untuk mengelola data. proses administrasi. dan layanan publik secara lebih efisien. Contohnya adalah penggunaan aplikasi untuk pengelolaan kepegawaian. keuangan. perizinan. dan layanan publik lainnya.
2. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi informasi menjadi kunci untuk meningkatkan adopsi dan pemanfaatan aplikasi berbasis elektronik. Melalui pelatihan yang tepat. pegawai di berbagai perangkat daerah dapat memahami dan menggunakan aplikasi tersebut secara efektif.
3. Penyediaan Infrastruktur TIK: Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai menjadi prasyarat penting dalam mendukung penggunaan aplikasi dan layanan berbasis elektronik. Ini termasuk penyediaan jaringan internet yang cepat dan stabil serta perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan.
4. Monitoring dan Evaluasi: Pentingnya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi aplikasi dan layanan berbasis elektronik tidak bisa diabaikan. Dengan melakukan evaluasi. Kabupaten Dharmasraya dapat mengidentifikasi kendala. masalah. dan area yang perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan aplikasi tersebut.

22. INDEKS PROFESIONALISME ASN

INDEKS PROFESIONALISME ASN

= PENILAIAN KUALITAS ASN BERDASARKAN KESESUAIAN KUALIFIKASI. KOMPETENSI. KINERJA DAN KEDISIPLINAN PEGAWAI ASN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL

= 82.23

Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah daerah adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat profesionalisme dan kinerja ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Indeks ini mencakup berbagai aspek, termasuk kompetensi, integritas, etika kerja, kedisiplinan, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan lingkungan kerja.

Tingkat profesionalisme ASN pemerintah daerah menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Dengan memiliki ASN yang profesional, pemerintah daerah dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan roda pemerintahan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi terhadap Indeks Profesionalisme ASN merupakan bagian yang penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

22.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.57 Capaian Kinerja Indeks Profesionalisme ASN berdasarkan target tahun 2025

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2025			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
58.04	82.77	82.23	99.35%	Sangat Baik	77	106.79

Sumber : BKPSDM Dharmasraya, 2025

Kondisi awal indikator pada tahun 2020 sebesar 58,04. Pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 82,77 dengan realisasi mencapai 82,23 sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 99,35% dengan predikat sangat baik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 77, maka capaian tahun 2025 telah mencapai sekitar 106,79%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja indikator tersebut tidak hanya mendekati target tahunan, tetapi juga telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD

Tabel 3.58 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Predikat
2021	62	62.86	101.40%	→	Memuaskan
2022	65	71.7	110.30%	↑	Memuaskan
2023	71.7	71.7	100%	↓	Sangat Berhasil
2024	71.7	82.77	115.44%	↑	Memuaskan
2025	82.77	82.23	99.35%	↓	Sangat Berhasil

Sumber : BKPSDM Dharmasraya, 2025

Berdasarkan data tahun 2021–2025, capaian indikator menunjukkan kinerja yang relatif baik dan cenderung meningkat hingga tahun 2024. Realisasi pada tahun 2021 mencapai 62,86 dengan capaian 101,40%, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 71,7 dengan capaian 110,30%. Pada tahun 2023 realisasi tetap sebesar 71,7 dengan capaian 100%, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 82,77 dengan capaian 115,44%. Pada tahun 2025 realisasi tercatat sebesar 82,23 dari target 82,77 dengan capaian kinerja 99,35% dan predikat sangat berhasil. Meskipun secara persentase terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut tetap menunjukkan kinerja yang baik. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 77, realisasi tahun 2025 telah mencapai sekitar 106,79%, sehingga indikator ini dapat dikatakan telah melampaui target RPJMD sebelum akhir periode perencanaan.

Komponen penilaian yang mendukung pencapaian indeks profesionalisme ASN dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.59 Indeks Profesionalisme ASN Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN 2025

No	Nama Instansi	Jumlah PNS	Kualifikasi (25)	Kompetensi (40)	Kinerja (30)	Disiplin (5)	IP ASN	Kategori
1	Kab. Sijunjung	3,013	20.96	34.60	25.97	5.00	86.53	tinggi
2	Kota Pariaman	2,290	21.86	33.52	24.86	5.00	85.24	tinggi
3	Kab. Tanah Datar	3,844	20.93	32.36	25.57	5.00	83.86	tinggi
4	Kab. Dharmasraya	2,871	20.93	30.80	25.50	5.00	82.23	tinggi
5	Kab. Pesisir Selatan	4,909	20.76	30.60	25.79	5.00	82.15	tinggi
6	Kota Padang Panjang	1,705	21.82	29.40	25.20	4.99	81.42	tinggi
7	Kota Bukittinggi	2,185	21.78	28.82	25.52	5.00	81.12	tinggi
8	Kab. Pasaman	3,346	20.83	29.69	25.42	5.00	80.94	sedang
9	Kota Padang	6,586	21.28	28.79	25.77	5.00	80.84	sedang
10	Kota Solok	1,808	22.28	28.38	25.10	5.00	80.76	sedang
11	Kota Payakumbuh	2,415	21.62	28.34	25.71	4.99	80.66	sedang
12	Kab. Solok	4,058	20.75	29.20	25.51	5.00	80.46	sedang
13	Kab. Solok Selatan	3,054	21.22	28.97	25.20	5.00	80.39	sedang
14	Kab. Agam	4,683	20.78	28.35	25.16	5.00	79.30	sedang
15	Kota Sawahlunto	1,777	21.59	27.25	25.32	5.00	79.16	sedang
16	Kab. Pasaman Barat	4,080	21.10	27.82	24.64	5.00	78.56	sedang
17	Kab. Limapuluh Kota	5,040	20.60	28.15	24.81	5.00	78.56	sedang
18	Kab. Padang Pariaman	4,843	20.66	27.79	24.40	5.00	77.85	sedang
19	Kab. Kep. Mentawai	2,281	21.27	25.08	21.97	5.00	73.32	sedang
Provinsi Sumatera Barat		14,610	21.55	32.24	26.28	5.00	85.07	tinggi

Sumber Data: Laporan Hasil Pengukuran IPASN, BKN Regional XII .2025

22.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Tabel 3.60 Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja Indeks Profesionalisme ASN

Sasaran Strategis	Indikator	Keterkaitan dengan Indikator Kinerja	Jenis Dukungan
Peningkatan kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (Latsar 1 orang, tugas belajar 38 orang, pengembangan kompetensi melalui pelatihan 1% dan pendidikan 47,5%)	Pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan meningkatkan kapasitas, profesionalitas, dan keahlian ASN sehingga mendukung peningkatan Indeks Profesionalitas ASN pada dimensi kompetensi	Dukungan peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan
Peningkatan kinerja ASN	Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu (87%)	Penyusunan SKP tepat waktu mencerminkan pengelolaan kinerja ASN yang terukur dan akuntabel sehingga berkontribusi pada peningkatan Indeks Profesionalitas ASN pada dimensi kinerja	Dukungan sistem manajemen kinerja ASN
Penempatan ASN berbasis kompetensi	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi (46,5%), termasuk pelantikan PPPK 277 orang, JPT 1 orang, pejabat administrator dan pengawas 18 orang	Penempatan ASN sesuai kompetensi mendukung penerapan sistem merit dalam manajemen ASN yang menjadi komponen penting dalam peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	Dukungan manajemen talenta dan sistem merit
Peningkatan disiplin ASN	Penanganan kasus disiplin ASN (disiplin ringan 7 orang, sedang 2 orang, berat 3 orang)	Penegakan disiplin ASN meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan etika kerja ASN sehingga memperkuat dimensi disiplin dalam Indeks Profesionalitas ASN	Dukungan pengawasan dan penegakan disiplin ASN
Penguatan sistem kehadiran dan kedisiplinan ASN	Implementasi presensi digital melalui Presensi Simpegnas BKN dengan absensi 4 kali sehari	Sistem presensi digital meningkatkan pengawasan kedisiplinan dan akuntabilitas ASN yang berdampak pada peningkatan Indeks Profesionalitas ASN pada aspek disiplin	Dukungan digitalisasi manajemen kepegawaian

				dan tata kelola kepegawaian	
Penerapan sistem dalam ASN	merit mutasi	Pelaksanaan job fit 18 orang dan proses mutasi berbasis kebutuhan organisasi	Mutasi berbasis kinerja dan kompetensi memperkuat penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN yang menjadi indikator penting dalam Indeks Profesionalitas ASN	Dukungan kebijakan manajemen talenta ASN	
Penguatan sistem penilaian kinerja dan TPP ASN		Penyusunan rangkuman kondisi TPP dan SOP tunjangan pegawai berbasis kinerja	Integrasi antara disiplin, kinerja, dan pembayaran TPP meningkatkan motivasi dan profesionalitas ASN sehingga mendukung peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	Dukungan kebijakan manajemen kinerja dan sistem insentif ASN	

Sumber : BKPSDM Dharmasraya, 2025

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) secara keseluruhan tercatat sebesar 82,77. Dalam kontribusinya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyumbang nilai lebih tinggi dengan skor 83,19, melampaui rata-rata IP ASN. Sementara itu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) memiliki nilai 74,97, yang berada di bawah rata-rata IP ASN. Hal ini menunjukkan bahwa PNS berperan lebih besar dalam meningkatkan tingkat profesionalitas ASN dibandingkan dengan P3K. dalam pencapaian nya beberapa faktor penyebab keberhasilan antara lain:

1. Pengembangan Kompetensi ASN

- Peningkatan jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi.
- Sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada ASN mengenai pentingnya pengembangan kompetensi.
- Program pelatihan seperti Diklat PKA/PKN, uji kompetensi, dan pelatihan dasar bagi CPNS.
- Fasilitasi tugas belajar dan izin belajar bagi ASN.

2. Dukungan Anggaran

- Alokasi Dana Mandatory sebesar 0,16% dari APBD atau Rp 1,55 miliar untuk mendukung pengembangan kompetensi ASN.
- Upaya peningkatan pemahaman Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengenai pentingnya peningkatan kompetensi ASN.

3. Kolaborasi dengan Pihak Ketiga

- Kerja sama dengan BKD Provinsi Riau untuk pelaksanaan uji kompetensi ASN.
- Kerja sama dengan BPSDM Bukittinggi untuk pelaksanaan Diklat PIM bagi pejabat eselon II dan III.

- c. Kerja sama dengan UPT BKN Padang dalam pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah.

Dalam mencapai indikator kinerja indeks profesionalitas ASN. dapat di simpulkan penyebab Keberhasilan Pencapaian Indikator antara lain:

1. Kualifikasi ASN sudah bertambah
2. Kompetensi ASN sudah meningkat
3. Kinerja ASN sudah Profesional
4. Kedisiplinan ASN sudah patuh dan taat

Selain keberhasilan pencapaian. terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja ini antara lain keterbatasan Anggaran untuk meningkatkan Kualitas. Kompetensi. Kinerja dan Kedisiplinan Pegawai ASN. Dari masalah yang teridentifikasi. dapat disusun solusi antara lain Meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk menambah Alokasi Anggaran untuk meningkatkan Kualifikasi, kompetensi, kinerja dan Kedisiplinan Pegawai ASN.

Pencapaian ini didukung oleh profesionalisme ASN baik PNS maupun P3K di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya secara umum serta pelaksanaan program dan kegiatan khususnya yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia, kegiatan tersebut antara lain Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Fungsional. Kepemimpinan dan Pra jabatan. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.

SASARAN STRATEGIS 4.1.3 PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

23. PUBLIK SERVICE INDEKS

PUBLIK SERVICE INDEKS

= NILAI YANG DI KELUARKAN OLEH KEMENTRIAN PAN RB UNTUK MENGGAMBARAKAN PENILAIAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN DHARMASRAYA
=4.25

Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator penting dalam mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pelayanan publik mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, yang diukur melalui berbagai aspek seperti ketersediaan layanan, kecepatan respons, tingkat kepuasan masyarakat, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan. Melalui pengukuran dan analisis indeks ini, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang masih perlu ditingkatkan serta merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat

hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.

23.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.61 Capaian Publik Servis Indeks berdasarkan target tahun 2025

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2025			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
2.85	3.3	4.25	128.79%	Memuaskan	3.4	125%

Sumber Data : Kepmenpan RB No.3/2026 diolah oleh Bagian Organisasi.2025

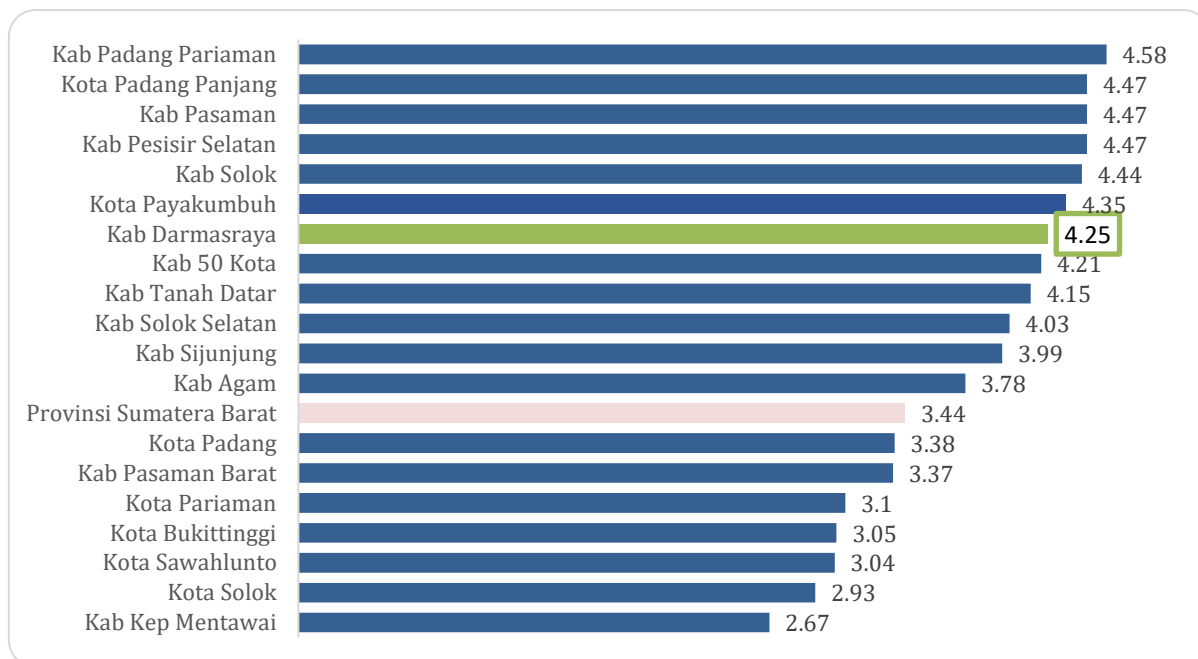
Berdasarkan data tersebut, Indeks Pelayanan Publik menunjukkan peningkatan dibandingkan kondisi awal tahun 2020 sebesar 2,85. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 3,3 dan realisasi mencapai 4,25 sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 128,79 persen dengan predikat memuaskan. Capaian ini juga telah melampaui target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 3,4 dengan tingkat pencapaian 125 persen, yang menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di daerah terus mengalami peningkatan dan telah melampaui target yang direncanakan.

Tabel 3.62 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Publik Service Indeks Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Tren	Predikat
2022	3.02	3.93	129.70%	↑	Memuaskan
2023	3.12	3.86	123.70%	↓	Memuaskan
2024	3.21	3.21	100%	↓	Sangat Berhasil
2025	3.3	4.25	128.79%	↑	Memuaskan

Sumber Data : Bagian Organisasi. 2025

Tabel 3.63 Hasil Indeks Pelayanan Publik 2025 Kabupaten/ Kota Se- Provinsi Sumatera Barat



Sumber :Kepmenpan RB No 3/2026

Berdasarkan grafik Indeks Pelayanan Publik tahun 2025, Kabupaten Dharmasraya memperoleh nilai 4,25 dan berada pada peringkat ke-7 dari 19 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Posisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Dharmasraya telah berada pada kelompok menengah atas dan berada jauh di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang bernilai sekitar 3,44. Penilaian pelayanan publik sendiri dilakukan untuk mengukur kepatuhan dan kualitas penyelenggaraan layanan pemerintah kepada masyarakat, dan seluruh pemerintah daerah di Sumatera Barat pada penilaian terbaru telah berada pada kategori zona hijau atau kualitas tinggi.

Pencapaian tersebut menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2024, ketika Kabupaten Dharmasraya masih berada pada peringkat ke-18 dari 19 Kabupaten/kota di Sumatera Barat. Lonjakan peringkat hingga masuk posisi ke-7 menggambarkan adanya perbaikan yang cukup drastis dalam kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, baik dari aspek pemenuhan standar pelayanan, peningkatan kualitas layanan, maupun upaya pembenahan sistem pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan ini menjadi indikator positif bahwa reformasi pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil yang nyata.

23.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Indeks pelayanan publik atau publik indeks service di Kabupaten Dharmasraya mengalami penurunan pencapaian, khususnya pada IPP RSUD Sungai Dareh, hal ini disebabkan oleh

kurangnya SDM di Kabupaten Dharmasraya yang mampu melakukan pembinaan dalam peningkatan capaian kinerja ini, selain itu, anggaran yang dialokasikan ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah tidak rasional untuk mencapai kinerja ini secara maksimal.

Pada tahun sebelumnya kabupaten Dharmasraya menduduki posisi ke 2 terendah se Sumatera Barat, namun di tahun 2025, Kabupaten Daharmasraya mampu mencapai peringkat ke 7 se Sumatera Barat, hal tersebut dicapai melalui upaya yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pembinaan kepada Perangkat Daerah yang dilakukan penilaian oleh Kementerian PAN RB atau perangkat daerah lokus penilaian
2. Pendampingan pengisian kuesioner penilaian indeks pelayanan publik di 3 Perangkat Daerah yang telah di tetapkan.
3. Koordinasi antara Perangkat Daerah lokus dan Tim penilai yang di fasilitasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
4. Pelaksanaan Pembinaan terhadap perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik untuk memperbaiki kualitas pelayanan tidak hanya kualitas dokumen pelayanan, seperti pemenuhan sarana prasarana dan Peningkatan SDM pemberi Layanan Publik.

24. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT = Hasil dari Survey yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terkait kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya

$$\begin{aligned} \text{IKM Dharmasraya} &= \frac{\text{rata-rata kepuasan masyarakat di perangkat daerah}}{\text{jumlah perangkat daerah yang melakukan survey kepuasan}} \times 100 \\ &= \frac{3417.74}{38} \times 100 = 89.94 \end{aligned}$$

24.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel di bawah ini menyajikan data mengenai Indeks Kinerja terkait Kepuasan Masyarakat. Data ini mencerminkan evaluasi kinerja suatu pemerintahan atau organisasi dalam memenuhi harapan dan kebutuhan Masyarakat

Tabel 3.64 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan target tahun 2025

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2025			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
79	85	89.94	105.81%	Memuaskan	85	105.81

Sumber: Hasil pengolahan data primer. IKM Tahun 2025 oleh Bagian Organisasi

Kondisi awal indikator pada tahun 2020 sebesar 79. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 85 dengan realisasi mencapai 89,94 sehingga capaian kinerja sebesar 105,81% dengan predikat memuaskan. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa kinerja indikator tidak hanya melampaui target tahunan, tetapi juga telah melampaui target akhir RPJMD tahun 2026 yang

ditetapkan sebesar 85. Dengan demikian, hingga tahun 2025 capaian indikator telah mencapai sekitar 105,81% terhadap target akhir RPJMD, yang menandakan bahwa kinerja indikator ini telah melampaui sasaran yang direncanakan sebelum berakhirnya periode RPJMD.

Tabel 3.65 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Predikat
2022	81	83.7	103.33	↑	Memuaskan
2023	83.7	84.35	102.77	↓	Memuaskan
2024	84.35	84.65	100.35	↓	Memuaskan
2025	85	89.94	105.81%	↑	Memuaskan

Sumber: Hasil pengolahan data primer. IKM Tahun 2025 oleh Bagian Organisasi

Berdasarkan data tahun 2022–2025, capaian indikator menunjukkan kinerja yang konsisten baik dan cenderung melampaui target setiap tahunnya. Pada tahun 2022 realisasi mencapai 81 dari target 80 dengan capaian 101,25% dan predikat memuaskan. Kinerja kemudian meningkat pada tahun 2023 dengan realisasi 83,7 dari target 81 sehingga capaian mencapai 103,33%. Pada tahun 2024 realisasi sebesar 84,35 dari target 83,7 dengan capaian 102,77%, dan kembali meningkat menjadi 84,65 dari target 84,35 dengan capaian 100,35%. Pada tahun 2025 realisasi meningkat signifikan menjadi 89,94 dari target 85 dengan capaian 105,81% dan predikat memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja indikator tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi juga telah melampaui target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 85

24.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Keberhasilan dalam pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dipengaruhi oleh kinerja sembilan unsur pelayanan, yaitu: (1) persyaratan, (2) sistem, mekanisme, dan prosedur, (3) waktu penyelesaian, (4) biaya/tarif, (5) spesifikasi jenis produk pelayanan, (6) kompetensi pelaksana, (7) perilaku pelaksana, (8) penanganan pengaduan, saran, dan masukan, serta (9) sarana dan prasarana. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, hanya tiga unsur pelayanan yang memperoleh respons dengan kategori sangat baik atau baik, yaitu unsur persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, serta biaya/tarif.

Sementara itu, unsur yang dominan terhadap belum optimal nya pencapaian IKM adalah: (1) sarana dan prasarana, yang dikeluhkan pada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Camat Koto Baru, Kantor Camat Sitiung, Puskesmas Koto Baru, dan RSUD Sei Dareh; (2) kompetensi pelaksana, yang menjadi keluhan pada empat unit pelayanan publik, yaitu Dinas Pendidikan, Kantor Wali Nagari IV Koto Pulau

Punjung, Dinas Sosial P3PPKB, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (3) perilaku pelaksana, yang dikeluhkan pada Dinas Sosial P3PPKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kantor Wali Nagari IV Koto Pulau Punjung; dan (4) penanganan pengaduan, saran, dan masukan, yang dikeluhkan pada Kantor Wali Nagari Koto Baru, Kantor Wali Nagari IV Koto Pulau Punjung, serta Puskesmas Koto Baru.

Sebagai upaya perbaikan, unit pelayanan publik yang masih mendapat nilai rendah dalam aspek penanganan pengaduan, saran, dan masukan diharapkan dapat melakukan pembenahan dengan membuka kanal pengaduan yang lebih inklusif, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pengguna layanan. Selain itu, diperlukan penguatan kontrak kinerja antara unit pelayanan publik dengan masyarakat melalui penerapan *citizen charter* sebagai bentuk konkret komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Upaya lainnya mencakup peningkatan alokasi anggaran pada tiga unsur utama, yakni: (1) penanganan pengaduan, saran, dan masukan, (2) peningkatan kompetensi pelaksana, serta (3) perbaikan sarana dan prasarana.

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target indeks kepuasan Masyarakat adalah :

1. Transformasi pelayanan publik menuju SPBE
2. Pemanfaatan media sosial dan media pajang luar sekitar UPP dalam sosialisasi dan diseminasi informasi pelayanan publik
3. Pembentukan Tim Satsus (Satuan Khusus) yang bertugas menjawab dan dan menjelaskan pengaduan. saran dan masukan yang diberikan dan dipublikasikan kembali di media sosial UPP atau media pajang luar ruang yang ada di UPP sehingga masyarakat tahu bagaimana perkembangan pengaduan. saran dan masukan yang mereka sampaikan ke UPP
4. Kebijakan pengaturan angkutan umum dalam menjangkau UPP
5. Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 22 Tahun 2019 yang menjadi panduan bagi BAPPERIDA dalam membangun kinerja maupun kualitas pelayanan publik. sekaligus menjadi pedoman publik untuk melakukan pemantauan. evaluasi. serta penilaian.
6. Reviu secara periodik dilakukan untuk mengidentifikasi komponen yang berkinerja rendah dan hasil reviu dimanfaatkan sebagai input perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
7. Penyelenggaraan layanan oleh UPP telah dilengkapi dengan Standar Pelayanan

Hambatan yang mempengaruhi capaian nilai indeks kepuasan Masyarakat di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 :

1. Belum optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pelayanan publik. terutama pelayanan publik yang banyak dikunjungi masyarakat seperti Dinas Pendidikan. Dinas Dukcapil. Dinas PMPTSP dan layanan di Puskesmas
2. Informasi pelayanan publik yang diselenggarakan Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) belum sepenuhnya dipahami masyarakat
3. Kualitas sarana dan prasarana di UPP belum memadai
4. Kualitas SDM UPP publik masih ada yang kurang responsif. kurang kompeten. kurang ramah serta terlalu lambat dalam melakukan pelayanan.
5. Umpan balik atau penanganan pengaduan. saran. masukan Masyarakat pengguna layanan belum terkelola sebagaimana mestinya
6. Akses lokasi UPP susah dijangkau kendaraan umum

Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk memperbaiki kinerja antara lain:

1. Sosialisasi dan diseminasi informasi pelayanan publik dengan memanfaatkan media sosial dan media pajang luar sekitar UPP seperti pemberitahuan informasi layanan melalui web UPP. facebook. dan WA pada layanan RSUD Sei. Dareh
2. Upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana dengan pengadaan sarana parasana. serta optimalisasi pemeliharaan secara berkala.
3. Peningkatan kompetensi pegawai (SDM) UPP secara periodik melalui pendidikan ataupun pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsi UPP.
4. Melengkapi seluruh kegiatan UPP dengan Standar Operation Procedure (SOP) dan Standar Pelayanan
5. Melakukan perbaikan layanan sesuai hasil evaluasi dari hasil capaian IKM tahun sebelumnya

Tujuan 4.2 Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari
--

SASARAN STRATEGIS 4.2.1 MENINGKATNYA KETAHANAN SOSIAL. EKONOMI DAN LINGKUNGAN NAGARI
--

Perhitungan rata-rata indeks ekonomi, sosial, dan lingkungan/ekologi dilakukan secara bersamaan seiring adanya perubahan metodologi pengukuran indeks desa setelah terbitnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. Regulasi tersebut mengubah kerangka pengukuran sebelumnya pada Indeks Desa Membangun menjadi sistem penilaian yang lebih komprehensif dengan memasukkan tiga dimensi utama, yaitu indeks ekonomi, indeks sosial, dan indeks lingkungan/ekologi sebagai komponen pembentuk Indeks Desa. Oleh karena itu, analisis

terhadap ketiga indeks tersebut dilakukan secara terpadu agar dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai tingkat perkembangan dan ketahanan desa.

25. RATA-RATA INDEKS KETAHANAN SOSIAL

RATA-RATA INDEKS KETAHANAN SOSIAL

= NILAI KETAHANAN SOSIAL YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENTRIAN DESA

=0.8041

26. RATA-RATA INDEKS KETAHANAN EKONOMI

RATA-RATA INDEKS KETAHANAN EKONOMI

= NILAI INDEKS KETAHANAN EKONOMI YANG DI KELUARKAN OLEH KEMENTRIAN DESA

= 0.7582

27. RATA-RATA INDEKS KETAHANAN EKOLOGI / LINGKUNGAN

RATA-RATA INDEKS KETAHANAN EKOLOGI / LINGKUNGAN

= NILAI INDEKS KETAHANAN EKOLOGI YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENTRIAN DESA

=0.7068

27.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.66 Capaian Kinerja berdasarkan target tahun 2025

Rata Indeks Ketahanan	Kondisi Awal (2020)	Tahun 2025			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian			
Sosial	0.8108	0.8651	0.8041	92.95%	Sangat Baik	0.8607	100.51
Ekonomi	0.6917	0.7798	0.7582	97.23%	Sangat Baik	0.7343	106.2
Ekologi	0,5833	0.7154	0.7154	98.8	Sangat Baik	0.6192	115.54

Sumber : KEMENDES DPTT diolah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2025

Dari tabel diatas menunjukkan hasil yang sangat baik pada tahun 2025. Indeks ketahanan sosial meningkat dari kondisi awal tahun 2020 sebesar 0,8108 dengan target tahun 2025 sebesar 0,8651, dan realisasi mencapai 0,8041 dengan tingkat capaian 92,92 persen serta predikat sangat baik. Capaian tersebut juga telah melampaui target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 0,8607 dengan tingkat pencapaian 100,51 persen.

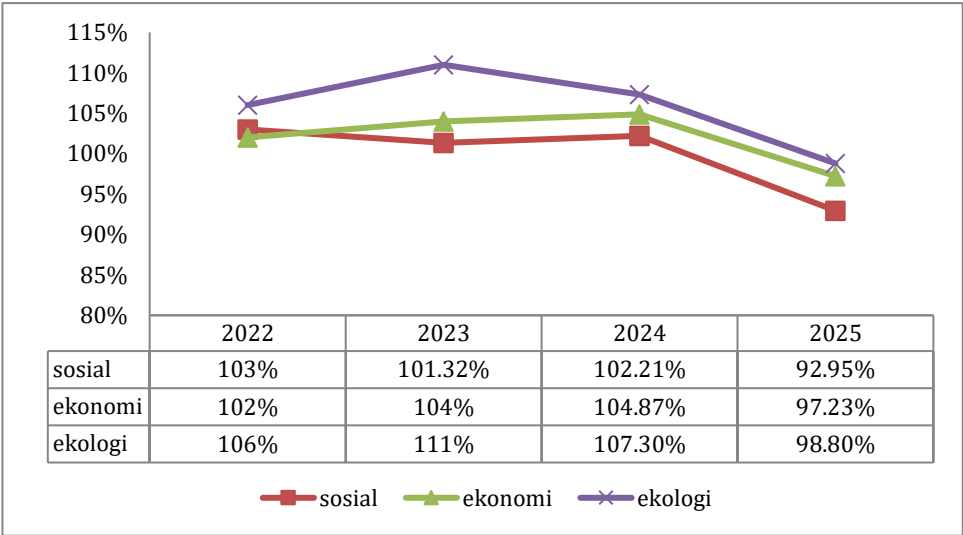
Pada dimensi ketahanan ekonomi, nilai indeks meningkat dari 0,6917 pada tahun 2020 dengan target tahun 2025 sebesar 0,7798, dan realisasi mencapai 0,7582 dengan capaian

kinerja 97,23 persen dan predikat sangat baik. Realisasi ini juga telah melampaui target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 0,7343 dengan tingkat pencapaian 106,2 persen.

Sementara itu, indeks ketahanan ekologi atau lingkungan menunjukkan peningkatan yang signifikan dari kondisi awal 0,5833 pada tahun 2020 menjadi 0,7154 pada tahun 2025. Nilai ini sesuai dengan target tahun 2025 dengan capaian kinerja 98,8 persen dan predikat sangat baik, serta telah melampaui target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 0,6192 dengan tingkat pencapaian 115,54 persen.

Secara keseluruhan, capaian ketiga indeks tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan nagari telah berjalan dengan baik dan bahkan telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Grafik 3.17 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2025

Tren capaian indeks ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi nagari pada periode 2022–2024 menunjukkan kinerja yang relatif tinggi dan sebagian besar berada di atas target. Namun pada tahun 2025 terjadi penurunan capaian pada ketiga dimensi tersebut. Penurunan ini tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kondisi ketahanan nagari, melainkan dipengaruhi oleh perubahan metodologi pengukuran indeks desa setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa.

Melalui regulasi tersebut, pengukuran yang sebelumnya menggunakan pendekatan Indeks Desa Membangun dengan tiga indikator utama, yaitu ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi/lingkungan, mengalami perubahan menjadi sistem pengukuran Indeks Desa yang lebih komprehensif. Dalam metode baru ini, indikator penilaian diperluas menjadi enam dimensi, yaitu dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas, dan dimensi tata kelola pemerintahan.

Penambahan dimensi penilaian tersebut menyebabkan standar pengukuran menjadi lebih luas dan kompleks, sehingga mempengaruhi hasil capaian pada tahun 2025. Dengan adanya dimensi baru yang turut diperhitungkan dalam penilaian, capaian indeks pada masing-masing aspek menjadi lebih ketat dibandingkan metode sebelumnya. Oleh karena itu, penurunan capaian pada tahun 2025 lebih disebabkan oleh perubahan metodologi dan perluasan indikator penilaian, bukan semata-mata karena menurunnya kondisi ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan nagari.

27.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Ekologi nagari antara lain:

1. Terpenuhinya sebagian besar layanan dasar masyarakat di nagari, seperti ketersediaan sarana kesehatan, akses pendidikan dasar, fasilitas sanitasi yang layak, serta dukungan infrastruktur dasar berupa listrik dan jaringan komunikasi yang memadai.
2. Kuatnya modal sosial masyarakat yang tercermin dari budaya gotong royong, toleransi antarwarga, serta keberadaan sistem keamanan lingkungan seperti pos ronda yang mendukung terciptanya kondisi sosial yang kondusif.
3. Aksesibilitas wilayah yang relatif baik, ditunjukkan dengan tersedianya jaringan jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat sehingga mendukung mobilitas masyarakat serta kelancaran distribusi barang dan jasa.
4. Tersedianya kelembagaan ekonomi masyarakat, seperti koperasi serta Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMDes/BUMNag), yang berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat nagari.
5. Mulai tersedianya fasilitas mitigasi bencana di beberapa nagari, baik berupa peralatan keselamatan maupun jalur evakuasi bencana, yang mendukung peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko bencana serta memperkuat ketahanan lingkungan.
6. Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa yang diarahkan pada program prioritas pembangunan desa, seperti program padat karya tunai, penanganan stunting, ketahanan pangan, bantuan langsung tunai (BLT), serta penguatan ekonomi nagari melalui pengembangan BUMDes/BUMNag.
7. Penguatan tata kelola pembangunan nagari melalui sosialisasi dan pelatihan kepada perangkat nagari terkait prioritas penggunaan Dana Desa serta mekanisme penyaluran Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pemanfaatannya dapat lebih tepat sasaran dan mendukung peningkatan indikator pembangunan desa.
8. Dukungan koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi ke

nagari, serta penyampaian data perkembangan Indeks Desa kepada perangkat daerah terkait sebagai dasar perumusan langkah perbaikan terhadap indikator yang masih perlu ditingkatkan.

9. Pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, serta dukungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam proses pengumpulan dan penginputan data Indeks Desa, sehingga kualitas data yang dilaporkan lebih akurat dan dapat menggambarkan kondisi nagari secara objektif.

Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2025 mencakup beberapa program utama, yaitu:

1. Program Padat Karya Tunai
2. Penanganan Stunting
3. Ketahanan Pangan
4. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
5. Peningkatan Ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

Sementara itu, Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya rapat koordinasi lintas OPD dalam percepatan pengumpulan data IDM, monitoring dan evaluasi di tingkat kecamatan terkait entry data IDM, serta pendampingan terhadap Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam proses entry data IDM.

Dengan langkah-langkah strategis yang telah diambil, diharapkan peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Dharmasraya dapat terus berlanjut, sehingga target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.

Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian indeks ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi nagari merupakan hasil sinergi antara ketersediaan layanan dasar, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, optimalisasi pemanfaatan Dana Desa, serta koordinasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan nagari yang berkelanjutan.

MISI 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan

Tujuan 5.1 Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (*Green Development*)

SASARAN STRATEGIS 5.1.1 OPTIMALISASI PERENCANAAN TATA RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

28. KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG

KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG

$$= \frac{\text{Jumlah Luas Pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan (ha)}}{\text{Luas Ruang Budidaya Potensial yang relevan untuk kegiatan berizin (ha)}} * 100\%$$

$$= \frac{21.236 \text{ Ha}}{77.686 \text{ Ha}} * 100\% = 27.17\%$$

28.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Dharmasraya diukur melalui perbandingan antara luas rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dengan luas ruang budidaya yang berpotensi untuk dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan sejauh mana pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui mekanisme perizinan telah selaras dengan arahan pemanfaatan ruang sebagaimana ditetapkan dalam dokumen rencana tata ruang. capaian Kesesuaian pemanfaatan ruang Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.67 Capaian Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan target tahun 2025

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2025			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
0	10	27.34%	136.68%	Memuaskan	35 %	78.1%

Sumber :Dinas PUPR Dharmasraya. 2025

Pada tahun 2025 target ditetapkan sebesar 10% dengan realisasi 27,17%, sehingga capaian kinerja mencapai 136,68% dan memperoleh predikat memuaskan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 35%, realisasi tersebut telah mencapai sekitar 78,1% dari target akhir yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan kinerja yang baik serta kemajuan yang signifikan menuju pencapaian target RPJMD. Untuk melihat tren perkembangan kinerja beberapa tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.68 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Predikat
2022	10%	7.45%	74.50%	↓	Cukup Berhasil
2023	10%	7.74%	77.41%	↑	Cukup Berhasil
2024	10%	10.89%	108.90%	↑	Memuaskan
2025	20%	27.34%	136.68%	↑	Memuaskan

Sumber :Dinas PUPR Dharmasraya. 2025

Berdasarkan data tahun 2022–2025, capaian kinerja menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2022 dan 2023 capaian masih berada di bawah target dengan persentase 74,50% dan 77,41%. Selanjutnya pada Tahun 2025 capaian kinerja melampaui target, masing-masing sebesar 108,90% dan 136,68%, dengan predikat memuaskan. Secara keseluruhan, kinerja menunjukkan perbaikan dan peningkatan yang konsisten.

28.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Dharmasraya diukur melalui perbandingan antara luas rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dengan luas ruang budidaya yang berpotensi untuk dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan sejauh mana pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui mekanisme perizinan telah selaras dengan arahan pemanfaatan ruang sebagaimana ditetapkan dalam dokumen rencana tata ruang.

Luas rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan di Kabupaten Dharmasraya sampai dengan tahun berjalan tercatat sebesar 21.110 hektare. Luas tersebut mencerminkan ruang yang telah memperoleh rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang dan dinyatakan sesuai dengan peruntukan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043, luas kawasan budidaya di Kabupaten Dharmasraya ditetapkan sebesar 270.754 hektare. Dari total kawasan budidaya tersebut, terdapat 68.633 hektare kawasan hutan produksi serta 7.905 hektare Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang pemanfaatannya telah diatur secara khusus sesuai dengan fungsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, ruang budidaya di luar kawasan hutan produksi dan LP2B yang secara teoritis masih memiliki potensi untuk dimanfaatkan bagi berbagai kegiatan pembangunan diperkirakan mencapai sekitar 194.216 hektare. Namun demikian, dalam praktik pemanfaatan ruang di daerah, tidak seluruh ruang budidaya tersebut memerlukan penerbitan rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang. Sebagian ruang telah dimanfaatkan untuk kegiatan eksisting seperti permukiman masyarakat, fasilitas umum, serta penggunaan lain yang telah berlangsung sebelum penetapan rencana tata ruang atau tidak memerlukan proses perizinan pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, dalam pengukuran indikator ini digunakan pendekatan ruang budidaya yang relevan terhadap kegiatan yang memerlukan rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang, yaitu ruang yang berpotensi dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan dan investasi yang memerlukan proses perizinan. Berdasarkan pendekatan tersebut, ruang budidaya yang berpotensi untuk kegiatan berizin diperkirakan sekitar 77.686 hektare atau sekitar 40 persen dari total ruang budidaya yang masih tersedia untuk dimanfaatkan.

Dengan mempertimbangkan luas rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan sebesar 21.110 hektare, maka capaian persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Kabupaten Dharmasraya mencapai sekitar 27 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang telah berjalan dengan cukup baik dan berkontribusi dalam memastikan

bahwa kegiatan pemanfaatan ruang yang memerlukan perizinan telah dilaksanakan sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya.

Dalam pencapaian keberhasilan kinerja Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan indikator kesesuaian rencana Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dengan melakukan langkah seperti Ketersediaan anggaran yang mendukung. Rekomendasi tata ruang adalah keterangan yang berisi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan rencana pemanfaatan ruang di suatu lokasi/kawasan untuk menyatakan bahwa lokasi/lahan suatu kegiatan telah sesuai atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Rekomendasi penataan ruang merupakan wujud dari upaya pengendalian ruang.

Tujuannya untuk menjamin setiap tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang (yang telah diperdakan) dapat tercapai. Setiap kegiatan pelanggaran tata ruang dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana, sehingga setiap kegiatan alih fungsi lahan harus dibarengi dengan rekomendasi tata ruang yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

Berdasarkan Permendagri 116 tahun 2007 tentang koordinasi penyelenggaraan ruang. Tugas pengendalian pemanfaatan ruang salah satunya adalah :

1. Memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang Kabupaten dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
2. Memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.
3. Hal diatas merupakan dasar dalam setiap penerbitan rekomendasi penataan ruang.

masalah atau kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja kesesuaian pemanfaatan ruang adalah :

1. Bangunan yang belum berizin dan tidak mengajukan izin, serta tidak sesuai atau menyalahi ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya.
2. Permasalahan terkait perubahan fungsi bangunan rumah menjadi toko/ ruko di perumahan terhadap potensi pendapatan daerah dari IMB

Dari masalah yang ditemui, solusi yang dilakukan adalah: harus diadakan tim verifikasi izin pemanfaatan ruang sehingga ada memonitor atau pengawasan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya.

SASARAN STRATEGIS 5.1.2 MENINGKATNYA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

29. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Menggambarkan kualitas lingkungan di suatu daerah dengan pertimbangan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)

$$\begin{aligned} \text{IKLH Perhitungan Kabupaten} &= (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL}) \\ \text{IKLH} &= (0.376 \times 68.70) + (0.405 \times 78.77) + (0.219 \times 69.22) \\ \text{IKLH} &= 25.83 + 31.90 + 15.16 \\ \text{IKLH} &= 72.89 \end{aligned}$$

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pemerintah daerah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah yang dikelola oleh pemerintah daerah. IKLH ini mencakup berbagai aspek lingkungan hidup, seperti kualitas udara, air, tanah, keberlanjutan sumber daya alam, biodiversitas, serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

29.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.69 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berdasarkan target tahun 2025

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2025			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
67.94	66.47	72.89	109.66	Memuaskan	66.55	109.53%

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Dharmasraya, 2025

Berdasarkan data capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2025, nilai realisasi tercatat sebesar 72,89, meningkat dibandingkan kondisi awal tahun 2020 yang berada pada angka 67,94. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 66,47, sehingga realisasi tersebut menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 109,66 persen dengan predikat memuaskan. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya telah melampaui target yang telah ditetapkan untuk tahun berjalan.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 66,55, realisasi tahun 2025 juga telah melampaui target tersebut dengan tingkat pencapaian sebesar 109,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya telah berjalan dengan baik dan mampu mencapai target kinerja lebih cepat dari yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

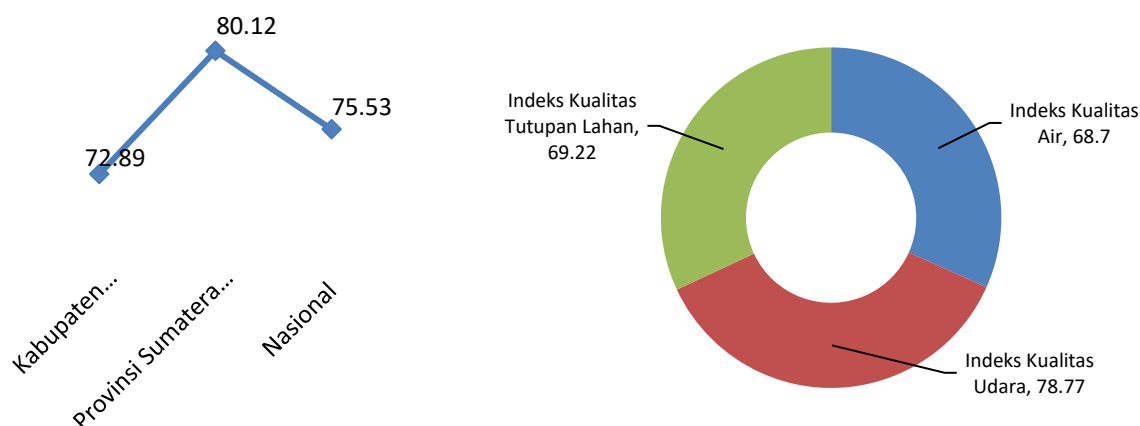
Tabel 3.70 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Predikat
2021	64.45	61.12	94.83	➡	Memuaskan
2022	64.93	63.23	97.38	⬆	Memuaskan
2023	65.47	63.48	96.96	⬇	Memuaskan
2024	66	65.79	99.68	⬆	Memuaskan
2025	66.47	72.89	109.66	⬆	Memuaskan

Berdasarkan data capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya tahun 2021–2025, tren capaian kinerja menunjukkan pola fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2021 capaian kinerja tercatat sebesar 94,83 persen, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 97,38 persen. Pada tahun 2023 capaian sedikit menurun menjadi 96,96 persen, namun kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 99,68 persen. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2025 dengan capaian kinerja sebesar 109,66 persen dari target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023, tren capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya selama periode tersebut menunjukkan kecenderungan meningkat dan secara konsisten berada pada predikat memuaskan.

Untuk melihat capaian kinerja Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Grafik 3.18 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2025



Sumber Data :Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. 2025

Pada tahun 2025, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Dharmasraya tercatat sebesar 72,89. Jika dibandingkan dengan capaian pada tingkat provinsi dan nasional, nilai tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 80,12 serta rata-rata nasional sebesar 75,53. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya berada pada kategori cukup baik, namun masih terdapat kesenjangan capaian apabila dibandingkan dengan kondisi lingkungan hidup di tingkat provinsi maupun nasional.

Dilihat dari komponen pembentuknya, nilai Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Dharmasraya merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 78,77, yang menunjukkan bahwa kondisi kualitas udara relatif baik. Sementara itu, Indeks Kualitas Air tercatat sebesar 68,7 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 69,22. Kedua komponen ini memiliki nilai yang lebih rendah

dibandingkan kualitas udara sehingga menjadi faktor yang paling mempengaruhi nilai IKLH Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan.

Meskipun capaian kinerja indikator pada tahun 2025 telah mencapai 100 persen terhadap target yang ditetapkan, namun secara komparatif nilai IKLH Kabupaten Dharmasraya masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup masih perlu terus dilakukan, khususnya pada aspek kualitas air dan pengelolaan tutupan lahan, agar nilai IKLH Kabupaten Dharmasraya dapat semakin meningkat dan mendekati bahkan melampaui capaian nasional.

29.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Salah satu indikator utama dalam keberhasilan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Dharmasraya adalah Indeks Kualitas Udara (IKU). Keberhasilan dalam menjaga kualitas udara yang baik di wilayah ini didukung oleh beberapa faktor berikut:

1. Efektivitas pengawasan terhadap industri yang beroperasi di Kabupaten Dharmasraya, sehingga dapat memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan.
2. Keberadaan vegetasi hijau yang cukup melimpah di sepanjang Jalan Lintas Sumatra, yang berperan dalam menyerap polutan dan meningkatkan kualitas udara.
3. Program penghijauan yang telah dilaksanakan di lingkungan perkantoran, sehingga menciptakan ruang terbuka hijau yang berkontribusi terhadap kualitas udara yang lebih baik.
4. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga vegetasi hijau di lingkungan perumahan, yang turut membantu mengurangi emisi gas pencemar udara.

Meskipun terdapat berbagai capaian positif, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam pengelolaan lingkungan, antara lain:

1. Aktivitas masyarakat di sepanjang aliran sungai, seperti penambangan pasir, batu, dan emas yang dilakukan tanpa izin, yang berpotensi menyebabkan pencemaran air serta degradasi lingkungan.
2. Alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan sawit, yang mengakibatkan berkurangnya kawasan hutan sebagai penyerap karbon dan penyangga ekosistem.
3. Kurangnya sistem pengelolaan limbah domestik, di mana masih ditemukan praktik pembuangan limbah langsung ke sungai, baik berupa buang air besar sembarangan, limbah kotoran ternak (sapi dan kerbau), maupun limbah rumah tangga yang tidak melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

Untuk mengatasi kendala tersebut, berbagai strategi dan solusi telah dirancang guna meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Dharmasraya, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan serta dampak negatif pencemaran.
2. Edukasi berkelanjutan terkait pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan, baik melalui program pemerintah maupun kerja sama dengan lembaga terkait.
3. Penguatan program penghijauan, dengan memberikan penyuluhan serta distribusi bibit gratis kepada masyarakat, instansi, dan sekolah guna meningkatkan tutupan vegetasi serta memperbaiki kualitas udara dan ekosistem.

Sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan berbagai upaya sebagai berikut:

2. Akreditasi laboratorium daerah, sehingga biaya pemeriksaan sampel dapat dikembalikan ke daerah sebagai sumber PAD. Dengan demikian, layanan pengujian kualitas lingkungan dapat lebih optimal dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
3. Penguatan pengawasan terhadap perusahaan, terutama yang berpotensi menghasilkan limbah, guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan serta menekan tingkat pencemaran.

Untuk memastikan implementasi strategi yang efektif dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan, beberapa langkah konkret yang akan dilakukan meliputi:

1. Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang menghasilkan limbah, baik limbah padat, cair, maupun pencemar udara, guna memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan mencegah dampak negatif terhadap masyarakat.
2. Memperluas program penghijauan, dengan memberikan penyuluhan serta distribusi bibit gratis kepada masyarakat, instansi, dan sekolah, guna menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.
3. Penerbitan surat edaran larangan penebangan pohon di sepanjang Jalan Lintas Sumatra, kawasan sekolah, serta lingkungan perumahan, guna menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas udara.
4. Penataan lahan tambang masyarakat, agar dapat dilakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih optimal dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Dengan implementasi strategi yang terstruktur dan berkelanjutan ini, diharapkan kualitas lingkungan di Kabupaten Dharmasraya dapat terus meningkat, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dari sektor lingkungan dapat lebih dioptimalkan.

SASARAN STRATEGIS 5.1.3 OPTIMALISASI BENCANA DAERAH	PENYELENGGARAAN	PENANGGULANGAN
--	------------------------	-----------------------

30. INDEKS RESIKO BENCANA DAERAH

INDEKS RESIKO BENCANA DAERAH
= INDEKS YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH YANG MENGGAMBARAKAN TENTANG TINGKAT RESIKO KEJADIAN BENCANA DI SUATU DAERAH
=134.81*

Indeks Resiko Bencana Daerah (IRBD) adalah suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu daerah. Indeks ini mencakup berbagai faktor seperti geografis, sosial, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan yang memengaruhi potensi terjadinya bencana serta dampak yang mungkin timbul.

30.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.71 Capaian Kinerja Indeks Resiko Bencana Daerah berdasarkan target tahun 2025

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2025			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
143.2	115	134.81*	82.77	Sangat Baik	110	81.79

Ket: * Data Sementara

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dharmasraya. 2025

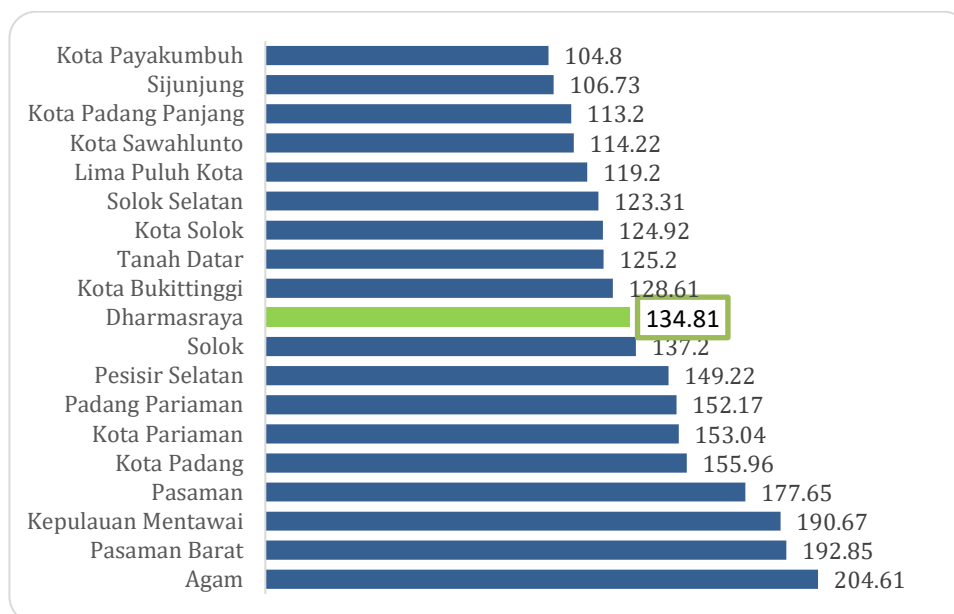
Capaian kinerja Indeks Risiko Bencana Daerah menunjukkan penurunan dari 143,2 pada tahun 2020 menjadi 130,03 pada Tahun 2025, mendekati target yang ditetapkan sebesar 130 dengan capaian 99,98%. Dengan predikat "Sangat Baik," tren ini mencerminkan upaya mitigasi bencana yang berjalan efektif. Namun, untuk mencapai target akhir RPJMD 2026 sebesar 110, masih diperlukan strategi berkelanjutan, mengingat pencapaian saat ini baru mencapai 81,79% dari target akhir. Untuk melihat tren perkembangan kinerja beberapa tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.72 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Resiko Bencana Daerah Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Predikat
2021	135	137.2	98.37%	➡	Sangat Berhasil
2022	130	137.69	94.09%	⬇	Sangat Berhasil
2023	125	140	92.15%	⬆	Sangat Berhasil
2024	125	134.81	99.98%	⬆	Sangat Berhasil
2025	115	134.81*	82.77%	⬇	Sangat Berhasil

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dharmasraya. 2025

Grafik 3.19 Indeks Kualitas Bencana Daerah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

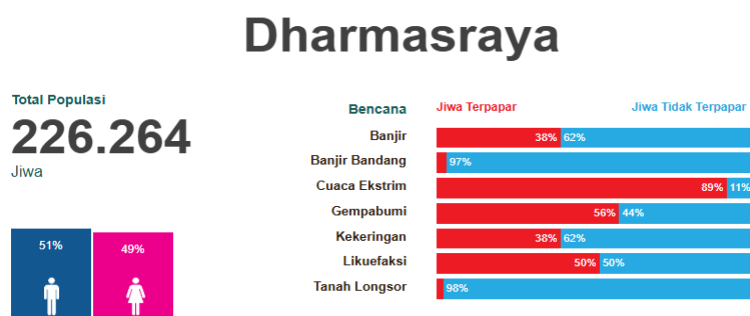


Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Indeks kinerja Kabupaten Dharmastraya sebesar 130,03 menunjukkan bahwa meskipun mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, capaian ini masih lebih baik dibanding beberapa daerah dengan nilai indeks yang lebih tinggi, seperti Padang Pariaman dan Pasaman Barat. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang berada di 144,38, Dharmastraya masih memiliki tantangan untuk terus menekan angka indeks agar menunjukkan kinerja yang lebih optimal. Tren yang stabil dan sedikit meningkat dari tahun sebelumnya mengindikasikan adanya perbaikan, namun upaya lebih lanjut tetap diperlukan untuk memastikan kinerja semakin membaik.

30.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Grafik 3.20 Tingkat Paparan Penduduk Dharmastraya terhadap Berbagai Bencana



Sumber ; Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Kabupaten Dharmastraya memiliki total populasi 226.264 jiwa, dengan distribusi gender yang hampir seimbang (51% laki-laki dan 49% perempuan). Dari sisi risiko bencana, mayoritas penduduk paling terdampak oleh cuaca ekstrem (89%), banjir bandang (97%), dan tanah

longsor (98%), menunjukkan bahwa wilayah ini sangat rentan terhadap kondisi cuaca ekstrem dan bencana hydrometeorology. Sementara itu, bencana seperti gempa bumi (56%) dan likuefaksi (50%) juga memiliki tingkat paparan yang signifikan, meskipun lebih rendah dibandingkan bencana hydrometeorology. Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan sangat penting untuk mengurangi dampak terhadap masyarakat, terutama dalam menghadapi perubahan iklim dan kondisi lingkungan yang semakin dinamis.

Penurunan indeks risiko bencana di Kabupaten Dharmasraya melibatkan berbagai sumber daya yang dapat berperan dalam proses pencapaian kinerja. Berikut ini beberapa sumber daya yang penting dalam pencapaian penurunan indeks risiko bencana daerah:

1. Keterampilan, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana sangat penting. Pelatihan kesiapsiagaan, edukasi tentang tindakan mitigasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana dapat memainkan peran kunci dalam menurunkan risiko bencana.
2. Alokasi anggaran yang cukup untuk mengimplementasikan program-program pengurangan risiko bencana seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana, pengembangan sistem peringatan dini, dan rehabilitasi pasca-bencana sangat penting. Dana ini dapat berasal dari pemerintah, lembaga internasional, sektor swasta, dan sumbangan masyarakat.
3. Penggunaan teknologi seperti sistem peringatan dini, pemetaan risiko bencana, dan sistem informasi geografis (SIG) dapat membantu dalam memprediksi, memantau, dan mengurangi dampak bencana. Teknologi juga dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang lebih tahan bencana, seperti bangunan yang dirancang untuk menahan gempa atau banjir.
4. Kerjasama antar lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga riset, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat penting dalam mengurangi risiko bencana. Jaringan ini dapat memfasilitasi pertukaran informasi, sumber daya, dan pengalaman terkait pengurangan risiko bencana.
5. Kebijakan yang kuat dan peraturan yang diterapkan secara efektif dapat mempromosikan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan, manajemen lahan, penggunaan sumber daya alam, dan pembangunan infrastruktur.

Kombinasi yang efektif dari sumber daya-sumber daya ini dapat membantu dalam mencapai penurunan indeks risiko bencana di Kabupaten Dharmasraya, serta meningkatkan ketahanan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja ini antara lain

1. Langkah-langkah untuk menegakkan peraturan daerah terkait pengurangan risiko bencana bisa mencakup pengawasan terhadap pembangunan yang sesuai dengan standar tahan

bencana. pelaksanaan zonasi risiko bencana. dan penegakan aturan terkait penggunaan lahan yang aman dari risiko bencana.

2. Pencegahan. Pengendalian. Pemadaman. Penyelamatan. dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota. Program ini bisa mencakup pembentukan tim pemadam kebakaran. pelatihan untuk masyarakat tentang tindakan pencegahan kebakaran. peningkatan infrastruktur pemadam kebakaran. dan pengadaan peralatan pemadam kebakaran yang memadai.
3. Inspeksi berkala terhadap peralatan proteksi kebakaran seperti hydrant. alat pemadam api. dan alarm kebakaran untuk memastikan bahwa peralatan tersebut dalam kondisi baik dan siap digunakan saat dibutuhkan.
4. Melakukan investigasi terhadap kejadian kebakaran untuk mengidentifikasi penyebabnya dan mengambil tindakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
5. Melakukan pelatihan kepada masyarakat tentang tindakan pencegahan kebakaran. cara menggunakan peralatan pemadam kebakaran. serta mengorganisir komunitas untuk saling membantu dalam situasi kebakaran.
6. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Program ini mencakup upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum di daerah. termasuk pencegahan terhadap tindak kriminal yang dapat menyebabkan kebakaran atau situasi bencana lainnya.
7. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota. Menyediakan informasi tentang potensi risiko bencana di daerah. tanda-tanda peringatan dini. dan langkah-langkah kesiapsiagaan yang harus diambil oleh masyarakat.
8. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. Menyelenggarakan program pencegahan bencana seperti pelatihan evakuasi. simulasi tanggap darurat. dan kampanye kesadaran bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
9. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Memiliki rencana dan tim yang siap untuk melakukan operasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan cepat dan efisien saat terjadi bencana.

30.3 Rekomendasi Perbaikan yang dapat dilaksanakan

Berdasarkan analisa data capaian kinerja indeks resiko bencana daerah, dapat disusun rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja antara lain:

Prioritas 1 : Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan

Prioritas 2 : Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu

Prioritas 3 : Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik

Prioritas 4 : Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana

Prioritas 5 : Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana

Prioritas 6 : Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana

Prioritas 7 : Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Tabel 3.73 Rekomendasi Perbaikan Indeks Resiko Bencana Daerah

Prioritas	Uraian
Prioritas 1	1. Penguatan Aturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
	2. Penguatan Aturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	3. Optimalisasi Penerapan Aturan dan Mekanisme Forum PRB
	4. Penguatan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan
	5. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana
	6. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana
	7. Penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	8. Penguatan Forum PRB
	9. Studi Banding Legislatif dan Eksekutif untuk Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah
Prioritas 2	1. Penyusunan Peta Bahaya, Peta Kerentanan, Peta Kapasitas dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan
	2. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
	3. Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah
	4. Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB
	5. Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang, dan Berlanjut
	6. Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah - Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah
	7. Penyediaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah - Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik
	8. Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana
	9. Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana
Prioritas 3	1. Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah
	2. Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat
	3. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi Bencana Lintas Lembaga
	4. Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana
	5. Pembangunan Desa Tangguh Bencana
Prioritas 4	1. Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana
	2. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah
	3. Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana

		- Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana - Penguatan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan - Penguatan Aturan Daerah tentang Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemantauan Area Hulu DAS untuk Deteksi dan Pencegahan Bencana Banjir Bandang - Pembangunan/Revitalisasi tanggul, embung, waduk, dan taman kota di daerah berisiko banjir
		- Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori - Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air - Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai - Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng - Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Konservasi Vegetatif DAS
Prioritas	5	
		- Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi Bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi - Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Daerah - Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi Bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi - Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Daerah - Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi - Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah - Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi Bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi - Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah - Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi Bencana Banjir Bandang melalui Perencanaan Kontijensi - Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang Daerah
Prioritas	6	
		- Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana - Perencanaan Pemulihan Infrastruktur Penting Pasca Bencana - Perencanaan Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana - Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan Penghidupan Masyarakat Pasca Bencana - Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana - Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana - Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana - Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban - Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana - Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan Bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat terdampak Bencana
Prioritas	7	

MISI 6. Meningkatkan Nilai-Nilai Agama, Adat Dan Budaya Yang Mencerminkan Kepribadian Daerah

Tujuan 6.1 Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai agama, adat, dan budaya

SASARAN STRATEGIS 6.1.1 MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

31. PERSENTASE PENINGKATAN ZAKAT

PERSENTASE PENINGKATAN ZAKAT

$$\frac{(\text{Jumlah Zakat Tahun } n - \text{jumlah zakat tahun sebelumnya})}{\text{Jumlah Zakat tahun sebelumnya}} * 100\%$$

$$\text{PERSENTASE PENINGKATAN ZAKAT} = \frac{(7.113.452.003 - 5.904.401.542)}{5.904.401.542} * 100\% = 20.48\%$$

31.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.74 Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Zakat berdasarkan target tahun 2025

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2025			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
2	20	20.48	102.39	Memuaskan	2	1023.86%

Sumber Data :Baznas diolah oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat. 2025

Terdapat beberapa faktor yang mungkin mendukung pencapaian ini. Pertama, upaya dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan manfaatnya bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Kedua, adanya program-program edukasi dan promosi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran zakat dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat oleh lembaga-lembaga terkait, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembayaran zakat.

Meskipun capaian ini sangat memuaskan, tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat di masa mendatang. Ini termasuk upaya untuk terus meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan kepercayaan masyarakat, serta memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana zakat

untuk manfaat yang maksimal bagi kaum duafa dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 3.75 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Zakat Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2023	2	6.31	315.5%
2024	6	19.39	323.09%
2025	20	20.48	102.39

Sumber Data :Baznas diolah oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat. 2025

Berdasarkan data capaian indikator kinerja tahun 2023–2025, terlihat bahwa realisasi kinerja secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 target indikator ditetapkan sebesar 2, sementara realisasi mencapai 6,31 atau sebesar 315,5% dari target. Pada tahun 2024 target meningkat menjadi 6 dengan realisasi 19,39, sehingga capaian kinerja mencapai 323,09%. Capaian yang jauh melampaui target pada dua tahun berturut-turut tersebut menunjukkan bahwa potensi kinerja yang dicapai sebenarnya jauh lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan sebelumnya.

Mempertimbangkan tren capaian tersebut, pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian target secara signifikan dengan menaikkan target menjadi 20, atau sekitar 10 kali lipat dibandingkan target tahun 2023. Penetapan target yang lebih tinggi ini bertujuan agar target kinerja menjadi lebih realistis dan menantang sesuai dengan kapasitas capaian yang ada. Meskipun target telah dinaikkan secara signifikan, realisasi pada tahun 2025 tetap mampu melampaui target yaitu sebesar 20,48 atau 102,39%, yang menunjukkan bahwa kinerja tetap berada pada kategori sangat baik serta mencerminkan peningkatan kapasitas pencapaian indikator secara berkelanjutan.

Tren peningkatan yang signifikan ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang luar biasa dalam partisipasi masyarakat dalam membayar zakat di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat. efektivitas program-program edukasi. dan promosi yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta lembaga-lembaga terkait seperti Badan Amil Zakat Nasional Dharmasraya.

Tabel 3.76 Penyaluran Badan Amil Zakat Kabupaten Dharmasraya

No	Uraian	Sub-Total (Rp)	Total (Rp)
1	PENERIMAAN ZIS TAHUN 2025		7.113.452.003
2	PENERIMAAN ZIS	7.113.452.003	
	1. ZAKAT	7.014.632.920	

	Penerimaan zakat Maal Perorangan	381.258.639
	Penerimaan zakat maal-perorangan Via UPZ	6.633.374.281
	Penerimaan zakat fitrah	-
	2. INFAQ SEDEKAH	98.819.083
	infak sedekah tidak terikat	81.346.083
	infak sedekah terikat	17.473.000
3	PENYALURAN DANA ZIS	
	1. PENYALURAN ZAKAT	7.519.361.276
	Penyaluran dana zakat kepada Fakir	232.800.000
	Penyaluran dana zakat kepada Miskin	4.836.707.701
	Penyaluran dana zakat kepada amil (hak amil)	876.829.115
	Penyaluran dana zakat kepada Muallaf	23.800.000
	Penyaluran dana zakat kepada Gharimin	177.295.460
	Penyaluran dana zakat kepada Fisabilillah	1.369.829.000
	Penyaluran dana zakat kepada Ibnu Sabil	2.100.000
	2. PENYALURAN INFAQ SEDEKAH	112.066.867
	penyaluran infak sedekah tidak terikat	84.830.000
	penyaluran infak sedekah terikat	10.094.000
	penyaluran infak kepada amil (hak amil)	17.142.867
4	JUMLAH PENYALURAN ZIS	7.631.428.143
	1. ZAKAT	7.519.361.276
	2. INFAQ SEDEKAH	112.066.867
	SALDO	(517.976.140)

Sumber data : Baznas diolah Bagian Kesejahteraan Rakyat Dharmasraya, 2025

31.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan 5 Program penyaluran bantuan amil zakat yang dihimpun oleh Baznas, antara lain Dharmasraya Cerdas, Dharmasraya Sehat, Dharmasraya Makmur, Dharmasraya Peduli, Dharmasraya Taqwa, selain itu, beberapa upaya yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar zakat. Mereka dapat mengkoordinasikan program-program edukasi dan promosi zakat. serta memfasilitasi kerja sama dengan lembaga-lembaga amil zakat untuk memperluas cakupan program tersebut.
2. Baznas Dharmasraya memiliki peran kunci dalam mengumpulkan. mengelola. dan mendistribusikan dana zakat. Mereka dapat mengoptimalkan upaya pengumpulan zakat

melalui program-program promosi dan edukasi. serta memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan.

3. Ulama dan tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat dalam agama Islam. Mereka dapat memberikan ceramah, khutbah, dan nasehat kepada jamaah untuk mendorong mereka membayar zakat secara rutin.
4. Media massa, baik cetak maupun online, dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan edukasi tentang zakat kepada masyarakat luas. Liputan, artikel, dan iklan yang mengangkat tema zakat dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat.
5. Sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya juga dapat memainkan peran dalam meningkatkan kesadaran tentang zakat. Mereka dapat menyelenggarakan program-program pendidikan agama yang mencakup materi tentang zakat, serta mendorong siswa untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat dengan membayar zakat secara konsisten.

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian indikator persentase peningkatan zakat pada Tahun 2025, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, dapat disajikan sebagai berikut:

1. Penyebab Keberhasilan
 - a. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan manfaatnya bagi kaum duafa serta pembangunan sosial ekonomi.
 - b. Efektivitas Program Promosi dan Edukasi: Program-program promosi dan edukasi yang efektif telah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran zakat dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi.
2. Faktor Penghambat
 - a. Target Kinerja yang Tidak Realistis. Target kinerja awal yang ditetapkan terlalu rendah, tidak mencerminkan potensi pertumbuhan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat.
 - b. Keterbatasan sumber daya dalam melaksanakan program promosi dan edukasi tentang zakat serta dalam memastikan efisiensi pengelolaan dana zakat.
3. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:
 - a. Dilakukan perubahan target kinerja agar lebih sesuai dengan potensi pertumbuhan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat. Hal ini dilakukan untuk mencapai konsistensi antara target yang ditetapkan dengan kondisi aktual serta memotivasi kinerja yang lebih tinggi.

- b. Meningkatkan intensitas dan efektivitas program-program promosi dan edukasi tentang zakat untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang peran dan manfaat zakat serta meningkatkan partisipasi dalam pembayarannya.
- c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk memperluas cakupan program promosi dan edukasi, serta memastikan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dengan melakukan perubahan target kinerja yang lebih realistis dan mengoptimalkan program promosi dan edukasi serta pengelolaan dana zakat, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat dan mencapai pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Program dan kegiatan penunjang yang efektif merupakan faktor kunci dalam pencapaian indikator kinerja persentase zakat di Kabupaten Dharmasraya. Berikut adalah analisis beberapa program dan kegiatan yang dapat berkontribusi dalam mencapai target tersebut:

1. Program Edukasi Zakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat dalam Islam dan manfaatnya bagi kaum duafa serta pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Melalui seminar, ceramah, workshop, dan kegiatan edukasi lainnya, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kewajiban zakat serta dampak positifnya bagi kesejahteraan sosial.
2. Promosi zakat dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, spanduk, brosur, dan kampanye publik lainnya. Tujuan dari promosi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar zakat serta memberikan informasi tentang cara pembayaran zakat yang mudah dan transparan.
3. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Baznas Dharmasraya dan lembaga amil zakat lainnya untuk mengoptimalkan pengumpulan dan distribusi zakat. Melalui sinergi ini, dana zakat dapat dikelola secara efektif dan tepat sasaran, serta digunakan untuk program-program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.
4. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan yang memungkinkan penghimpunan zakat langsung dari gaji ASN. Langkah ini tidak hanya meningkatkan partisipasi ASN dalam membayar zakat, tetapi juga menciptakan budaya dan kesadaran zakat di kalangan pegawai negeri.
5. Dilakukan monitoring dan evaluasi terus-menerus terhadap pelaksanaan program-program zakat untuk memastikan efektivitasnya. Data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan ini digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian strategi guna meningkatkan pencapaian indikator kinerja persentase zakat di masa mendatang.

Dengan mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah disebutkan di atas secara terencana dan berkelanjutan, diharapkan persentase zakat di Kabupaten Dharmasraya dapat

terus meningkat. sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

32. PERSENTASE MDA/TPA/TPSA YANG AKTIF

Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif

$$= \frac{\text{Jumlah MDA/TPA/TPSA yang Aktif}}{\text{Jumlah seluruh MDA/TPA/TPSA}} * 100\%$$

$$= \frac{38}{42} * 100\% = 90.48 \%$$

32.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.77 Capaian Kinerja Persentase MDA/TPA/TPSA Yang Aktif berdasarkan target tahun 2025

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2025			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
75	100	90.48	90.48	Sangat Baik	100	90.48%

Sumber Data : Bagian Kesra. 2025

Capaian yang sangat baik ini menandakan adanya kesuksesan dalam mempertahankan partisipasi masyarakat dalam kegiatan MDA/TPA/TPSA. Dengan demikian, program-program yang dilaksanakan telah efektif dalam menarik minat dan keterlibatan masyarakat. yang mungkin mencerminkan kualitas implementasi yang baik dan strategi komunikasi yang efektif. Ini adalah indikasi positif untuk keberlanjutan program-program tersebut dan menunjukkan adanya potensi untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat di masa mendatang.

Tabel 3.78 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase MDA/TPA/TPSA Yang Aktif Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	77	70	90 %
2022	80	80	100 %
2023	85	90.48	106.4 %
2024	90.47	90.48	100.01%
2025	100	90.48	90.48

Sumber Data : Bagian Kesra. 2025

Berdasarkan data Tahun 2021–2025, capaian indikator kinerja menunjukkan tren peningkatan hingga Tahun 2023. Pada Tahun 2021 capaian sebesar 90%, meningkat pada Tahun 2022 menjadi 100%, dan pada Tahun 2023 melampaui target dengan capaian 106,4%. Pada Tahun 2024 capaian relatif stabil dengan realisasi 90,48% dari target 90,47% (100,01%).

Namun pada Tahun 2025 capaian menurun menjadi 90,48% dari target 100%. Secara umum, realisasi indikator cenderung stagnan pada angka 90,48, sementara target terus

meningkat setiap tahun. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar aspek yang mempengaruhi indikator tersebut bukan merupakan kewenangan langsung Pemerintah Daerah, melainkan berada dalam kewenangan Kementerian Agama. Oleh karena itu, intervensi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah relatif terbatas dan lebih bersifat koordinatif serta fasilitatif, sehingga peningkatan capaian indikator tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah.

32.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai indikator persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif dapat memberikan wawasan penting dalam mengevaluasi efektivitas program-program tersebut. Beberapa penyebab yang mungkin memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator tersebut antara lain:

1. Keberhasilan dalam meningkatkan persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif sering kali tergantung pada sejauh mana masyarakat menyadari pentingnya peran mereka dalam kegiatan tersebut dan seberapa aktif mereka berpartisipasi. Kegagalan dapat terjadi jika kesadaran masyarakat rendah atau jika ada hambatan yang menghalangi partisipasi aktif.
2. Kegagalan juga dapat disebabkan oleh kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan program-program yang ditujukan untuk meningkatkan persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif. Ini bisa termasuk kurangnya koordinasi antar stakeholder, kurangnya sumber daya yang memadai, atau kurangnya pemantauan dan evaluasi terhadap program-program tersebut.
3. Keberhasilan dalam mencapai indikator tersebut juga tergantung pada keterlibatan dan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Kegagalan bisa terjadi jika tidak ada komitmen yang cukup dari pihak-pihak terkait atau jika tidak ada koordinasi yang baik antara mereka.
4. Faktor-faktor sosial-ekonomi dan budaya juga dapat memengaruhi keberhasilan dalam mencapai persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif. Misalnya, kondisi ekonomi yang sulit atau perubahan budaya di masyarakat dapat memengaruhi tingkat partisipasi dalam kegiatan tersebut.

Beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan atau dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif antara lain:

1. Melakukan kampanye pendidikan dan kesadaran yang menyasar masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya peran mereka dalam MDA/TPA/TPSA dan mendorong partisipasi aktif.
2. Memperbaiki kualitas pelaksanaan program-program yang ada dengan memperbaiki koordinasi, alokasi sumber daya yang lebih baik, dan meningkatkan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program tersebut.

3. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga-lembaga masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan dukungan dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan MDA/TPA/TPSA.
4. Merancang program-program yang sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi dan budaya lokal untuk meningkatkan relevansi dan daya tarik partisipasi masyarakat.

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif mencerminkan sejauh mana sumber daya yang tersedia telah digunakan secara optimal untuk mencapai target yang ditetapkan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam analisis efisiensi ini meliputi:

1. Alokasi Anggaran yang Efektif untuk program-program yang bertujuan meningkatkan persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif. Penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan yang direncanakan.
2. Pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal, termasuk personel yang terlibat dalam pelaksanaan program-program terkait MDA/TPA/TPSA. Hal ini mencakup penempatan yang tepat, pelatihan yang diperlukan, dan manajemen kinerja yang efisien.
3. Penggunaan Infrastruktur dan Teknologi yang Tepat dalam mendukung kegiatan MDA/TPA/TPSA. Perlu dipastikan bahwa infrastruktur dan teknologi yang tersedia digunakan secara optimal untuk mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi.
4. Penetapan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk terus memantau kinerja program-program terkait MDA/TPA/TPSA. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, dapat diidentifikasi potensi perbaikan dan peningkatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam upaya mencapai kinerja persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif, program Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat memainkan peran penting dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam kehidupan masyarakat. Program ini dirancang untuk tidak hanya meningkatkan kesejahteraan fisik, tetapi juga spiritual masyarakat.

Melalui program ini, berbagai kegiatan seperti pelatihan, ceramah, dan kegiatan sosial dilaksanakan dengan pendekatan yang berbasis nilai-nilai agama. Misalnya, pembentukan MDA/TPA/TPSA dilakukan dengan memperkuat pemahaman dan praktik keagamaan, serta memfasilitasi kegiatan sosial yang menggalang partisipasi masyarakat. Hal ini tidak hanya memperkaya aspek keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antar warga. Melalui pendekatan yang holistik, program ini tidak hanya menciptakan kegiatan yang bermanfaat secara spiritual, tetapi juga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan MDA/TPA/TPSA secara keseluruhan.

Dengan demikian, program Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat telah terbukti menjadi salah satu upaya yang efektif dalam mencapai kinerja persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif sambil memperkuat nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat.

SASARAN STRATEGIS 6.1.2 MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN PENERAPAN NILAI NILAI AGAMAN, ADAT DAN BUDAYA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

33. JUMLAH NAGARI BERADAT DAN BERBUDAYA

JUMLAH NAGARI BERADAT DAN BERBUDAYA	
=	JUMLAH NAGARI BERADAT DAN BERBUDAYA YANG DITETAPKAN OLEH SURAT KEPUTUSAN BUPATI
=	2 Nagari

33.1 Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.79 Capaian Kinerja Jumlah Nagari Beradat Dan Berbudaya berdasarkan target tahun 2025

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2025			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
-	2	2	100	Memuaskan	17	11.76%

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. 2025

Dalam hal ini, terdapat kesenjangan antara target dan realisasi yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Masih perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memahami penyebab dari ketidaksesuaian ini dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan jumlah nagari beradat dan berbudaya di Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 3.80 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Jumlah Nagari Beradat Dan Berbudaya Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	1	-	0 %
2022	3	2	66.66 %
2023	4	2	50 %
2024	3	2	66.67%
2025	2	2	100%

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. 2025

Berdasarkan data Tahun 2021–2025, capaian indikator kinerja belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Realisasi indikator sejak Tahun 2022 hingga 2024 relatif stagnan pada angka 2 indikator setiap tahun, meskipun target yang ditetapkan berbeda. Pada Tahun

2025 capaian tercatat 100% karena target ditetapkan hanya 2 indikator dan seluruhnya terealisasi. Namun demikian, secara substantif kondisi ini menunjukkan capaian yang masih stuck atau tidak berkembang.

Capaian tersebut juga masih cukup jauh dari target yang ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran, yang berdampak pada terbatasnya pelaksanaan program dan kegiatan pendukung, sehingga peningkatan indikator kinerja belum dapat dicapai secara optimal.

33.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dalam rangka mendorong terwujudnya Nagari yang beradab dan berbudaya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2025 telah melaksanakan sejumlah upaya yang tertuang dalam Program 100 Hari Kerja Bupati terpilih periode 2025–2030. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelestarian adat dan budaya daerah, yang implementasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.81 Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai nagari beradab dan berbudaya

No	Upaya yang dilaksanakan	Indikator Keberhasilan	Realisasi / Keterangan	Kontribusi terhadap Nagari Beradab dan Berbudaya	Jenis Dukungan
1	Pembinaan Lembaga Adat dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah	Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Dokumen penetapan WBTB <i>Alek Bajawek</i> telah didokumentasikan dan dimasukkan ke Dapobud	Memberikan pengakuan resmi terhadap tradisi adat sehingga mendukung pelestarian budaya lokal dan memperkuat identitas nagari	Langsung
2	Pembinaan Lembaga Adat dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah	Penetapan Dokumen Cagar Budaya	Target 5 dokumen, masih dalam proses koordinasi dengan BPK Wilayah III dan Tim TACB	Melindungi situs, benda, dan kawasan bersejarah yang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat nagari	Langsung
3	Pengembangan Seni dan Budaya Nagari	Program hibah pengembangan seni dan budaya per nagari	Program hibah diubah menjadi program unggulan Bupati untuk pengembangan seni dan budaya	Mendukung aktivitas kesenian, tradisi, dan kegiatan adat di tingkat nagari sehingga memperkuat kehidupan budaya masyarakat	Tidak langsung (pendorong)
4	Penyelenggaraan Event Budaya	Festival budaya sebagai pengganti konser	Festival budaya telah dilaksanakan di Koto Baru dan kegiatan malam nasyid	Menjadi sarana promosi budaya lokal serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya	Tidak langsung

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. 2025

Analisis penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja jumlah nagari beradat dan berbudaya merupakan hal yang penting untuk memahami sejauh mana upaya pemeliharaan dan pengembangan nagari berjalan secara optimal. Berikut adalah beberapa poin analisis yang relevan:

1. Efisiensi penggunaan anggaran dalam proyek-proyek pemeliharaan dan pengembangan nagari beradat dan berbudaya perlu dievaluasi.
1. Ketersediaan dan penempatan sumber daya manusia yang tepat dalam proyek-proyek pemeliharaan dan pengembangan nagari harus dievaluasi.
2. Evaluasi terhadap penggunaan teknologi dan metode kerja dalam proyek-proyek pemeliharaan dan pengembangan nagari perlu dilakukan.
3. Analisis terhadap kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), komunitas lokal, atau institusi pendidikan juga penting.
4. Sistem monitoring dan evaluasi perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa progress dalam mencapai kinerja jumlah nagari beradat dan berbudaya dapat terukur dengan jelas.

Program Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, meskipun memiliki anggaran yang cukup besar, menunjukkan realisasi anggaran yang sedikit di bawah target, mengindikasikan potensi penggunaan sumber daya yang kurang efisien. Program Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota memiliki anggaran yang signifikan, namun realisasi anggaran yang lebih rendah menunjukkan adanya perluasan penggunaan sumber daya yang belum optimal.

Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, meskipun memiliki anggaran lebih rendah, menunjukkan realisasi anggaran yang mendekati target, menandakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Sementara itu, Program Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan realisasi anggaran yang relatif baik, mendekati target yang telah ditetapkan. Kesimpulan nya, sementara beberapa program menunjukkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara optimal untuk mencapai kinerja jumlah nagari beradat dan berbudaya yang diharapkan.

Evaluasi mendalam terhadap implementasi program dan identifikasi potensi perbaikan akan menjadi kunci untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dan pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

3.4 PROGRAM UNGGULAN BUPATI TAHUN 2025 YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA

Sebagai bagian dari upaya percepatan pencapaian target pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melaksanakan berbagai program unggulan Bupati yang diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pembangunan tahun 2025. Program-program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pelaksanaan program unggulan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian indikator kinerja pemerintah daerah yang telah ditetapkan. Adapun program unggulan Bupati yang mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.82 Progul Bupati Tahun 2025 Yang Mendukung Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur

Program Unggulan/Kegiatan Strategis	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
DINAS PUPR						
BIDANG BINA MARGA				8,830,000,000	8,732,952,381	
Rehab Jalan Paket II	Rehabilitasi Jalan			3,800,000,000	3,703,397,463	
1. Perbaikan Jalan Penghubung Ampalu - Koto Salak		398.15	m	700,000,000	675,899,940	398.15
2. Perbaikan Jalan Poros Simpang Lawai-Sitiung Lama		252.46	m	500,000,000	481,804,596	252.46
3. Perbaikan Jalan Poros Simpang Microwave		287.57	m	500,000,000	487,992,115	287.57
4. Rehab Jalan Pulai - Simpang Tabek		224.00	m	600,000,000	586,236,425	224.00
5. Rehab Jalan Simpang Blok E - Sipangkur		722.83	m	1,500,000,000	1,471,464,387	722.83
Penanganan Long Segment Simpang Tabek - Padang Laweh (R.108) --> TKD DBH Sawit	Pembangunan Jalan	1.40	Km	3,130,000,000	3,129,999,918	1.40
Dinding Penahan Jalan Simpang Empat Belas Tiumang	Pembangunan Jalan	113.00	M3	150,000,000	149,910,000	113.00

Program Unggulan/Kegiatan Strategis				Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
Belanja TMMN 2025				Pembangunan Jalan	3.70	Km	900,000,000	900,000,000	3.70
Bangunan	Pelengkap	Jalan	Kecamatan	Pemeliharaan Rutin	KDP		200,000,000	199,814,000	KDP
Sembilan Koto				Jalan					
Bangunan	Pelengkap	Jalan	Kecamatan	Pemeliharaan Rutin	Box 1 x 1 : 6 Unit		200,000,000	199,935,000	Box 1 x 1 : 6 Unit
Timpeh				Jalan	Box 0,8 x 0,8 : 10 Unit				Box 0,8 x 0,8 : 10 Unit
					Beton Struktur Fc 20				Beton Struktur Fc 20 Mpa :
					Mpa : 12 m				12 m
					Pasangan Batu : 9 m				Pasangan Batu : 9 m
					Unit				
Pengadaan Box Culvert				Pembangunan	29.00	Unit	200,000,000	199,996,000	29.00
				Jembatan					
Rehab	Jembatan	Kayu	I	Pemeliharaan Berkala	3.00	Unit	150,000,000	149,942,000	3.00
2 Jembatan di Nagari IV Koto Di Bawuah Kec. IX				Jembatan					
1 Jembatan di Nagari Banai Kec. IX Koto									
Rehab	Jembatan	Kayu	II	Pemeliharaan Berkala	3.00	Unit	100,000,000	99,958,000	3.00
1 Jembatan di Nagari Taratak Tinggi				Jembatan					
Kec.Timpeh									
1 Jembatan di Nagari Padukuan Kec. Koto Salak									
1 Jembatan di Nagari Panyubarangan Kec. Timpeh									
							1,900,000,000	1,899,555,000	
CSR Jalan									

Program Unggulan/Kegiatan Strategis	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
- Pengaspalan Jalan Nagari Lubuk Besar ke Kantor Camat (Perkerasan Ruas Jalan Batu Kangkung-Lubuk Besar) oleh PT. TIDAR KERINCI AGUNG (TKA)						
- Perbaikan Jalan Kabupaten Penghubung Koto Salak - Koto Baru (Simpang Wonotiung) oleh PT. DAMASRAYA SAWIT LESTARI (DSL)						
- Pengerasan Jalan Jorong Labu dan Jorong Sungai Limau, Nagari Banai (Ruas Banai-Padang Hilalang) oleh PT.BUKIT RAYA MUDISA (BRM)						
- Perbaikan Jalan Kabupaten, Nagari Tanjung Alam (Ruas Incasi -Tanjung Alam), Perbaikan Jalan Simpang SMKN I Sungai Rumbai - Pasar Sungai Rumbai dan Perbaikan Jalan Abai - Siat – Batas Solok Selatan oleh PT. INCASI RAYA						
- Perbaikan Jalan Simpang SMKN I Sungai Rumbai - Pasar Sungai Rumbai dan Perbaikan Jalan Abai - Siat – Batas Solok Selatan oleh PT. SELAGO MAKMUR PLANTATION (SMP)						
- Perbaikan Jalan Poros Nagari Sitiung - Tabek Panyubarangan (Ruas Sitiung-Pulai, Pulai-Simpang Tabek) dan Perbaikan Jalan dari Nagari Tiumang pada ruas jalan poros utama menuju kantor Camat Tiumang (Khususnya di titik pertigaan masuk sampai jembatan) oleh PT. SUMBAR ANDALAS KENCANA (SAK)						
- Perbaikan Ruas Jalan Lintas Silago – Muaro Momong dan Perbaikan Ruas Jalan Lintas Sungai Dareh – Sungai Kilangan oleh PT. KALI DAREH						
CSR Jembatan						
- Perbaikan Jembatan Koto Balai Sitiung V telah selesai dilaksanakan pada Tanggal 13 November 2025 oleh PT. DHARMSARAYA LESTARINDO (DL) dan PT. ANDALAS WAHANA BERJAYA (AWB).						
- Perbaikan Jembatan Pengairan Kampung Surau oleh PT. BINA PRATAMA SAKATO JAYA						
- Perbaikan jembatan Pulau Anjolai oleh PT. SWARNABUMI ILMAN PERSADA						
- Pembangunan Jembatan Permanen (Jembatan Belly Ranah Palabi) oleh PT. SUMBAR ANDALAS KENCANA (SAK).						

Program Unggulan/Kegiatan Strategis	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
BIDANG CIPTA KARYA				1,002,710,100	880,597,560	
Pembersihan Lahan Pembangunan Sekolah Rakyat (SR)	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10	Ha	199,995,600	199,432,000	10 Ha lahan sekolah rakyat sudah di Land Clearing
Pembongkaran dan Pemindahan aset ALKAL serta Land Clearing Lokasi Baru aset ALKAL			m2	190,008,000	189,647,000	Semua Alat Alkal sudah dipindahkan ke Kantor BKD dan Belakang BLK
Pembuatan Sumur Bor Polres Dharmasraya			m	92,800,000	92,245,000	Sumur Bor kedalaman 70 meter dan Air Bersih
Perencanaan Paket 11					29,555,200	1 Dokumen Perencanaan
Perencanaan Paket 11 Pembongkaran dan Pemindahan aset ALKAL serta Pembersihan Lahan Pembangunan Sekolah Rakyat (SR)	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		m2	25,000,360		
Perencanaan Paket 11 Pembuatan Sumur Bor Polres Dharmasraya			m	4,640,000		
Perencanaan Paket 13 Review Perencanaan Pembangunan Polsek Asam Jujuhan			m2	99,806,500	79,458,560	1 Dokumen Perencanaan
Pengawasan Paket 11					17,720,000	1 Dokumen Pengawasan

Program Unggulan/Kegiatan Strategis	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
Pengawasan Paket 11 Pembongkaran dan Pemindahan aset ALKAL serta Pembersihan Lahan Pembangunan Sekolah Rakyat (SR)	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		m2	14,999,890		
Pengawasan Paket 11 Pembuatan Sumur Bor Polres Dharmasraya			m	2,784,000		
Pembuatan Lapangan Volley di Area Sport Center			m2	20,100,000	20,052,000	2 Lapangan Volley Outdoor
Penyusunan Perencanaan Peningkatan SPAM WTP Koto Baru, WTP Sitiung, WTP Sungai Duo	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem		LS	100,000,000	99,930,000	1 Dokumen Perencanaan
Penyusunan Perencanaan Peningkatan SPAM WTP Pulau Sawah dan WTP Batang Mimpi	Penyediaan Air Minum (SPAM)		LS	100,000,000	99,886,000	1 Dokumen Perencanaan
Penyusunan Studi Kelayakan Peningkatan Kelembagaan UPT SPAM			LS	100,000,000	-	
Perencanaan Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan		LS	100,000,000	99,947,000	1 Dokumen Perencanaan

Program Unggulan/Kegiatan Strategis	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
IBM PAMSIMAS TA 2025 APBN						
Gunung Medan Kec. Sitiung	IBM PAMSIMAS TA 2025 Sumber Air: Sumur Bor Dalam (debit 1.5 lt/dtk)		LS	500,000,000	500,000,000	Penerima Manfaat: 322 Jiwa Target Sambungan Rumah: 80 unit
Sialang Gaung Kec. Koto Baru	IBM PAMSIMAS TA 2025 Sumber Air: Sumur Bor Dalam (debit 1.5 lt/dtk)		LS	500,000,000	500,000,000	Penerima Manfaat: 534 Jiwa Target Sambungan Rumah: 80 unit
Tabek Kec. Timpeh	IBM PAMSIMAS TA 2025 Sumber Air: Air Permukaan Dalam (debit 2.27 lt/dtk)		LS	500,000,000	500,000,000	Penerima Manfaat: 437 Jiwa Target Sambungan Rumah: 80 unit
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						
	Belanja Penambahan Daya		LS	65,000,000	64,858,850	Terpenuhinya Daya Listrik di WTP Batang Mimpi
	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	3	Unit	600,000,000	499,500,000	Tersedianya cadangan Mesin Pompa Air bersih Pada 3 WTP , WTP Batang Mimpi, WTP Sungai Duo, WTP Sitiung

Program Unggulan/Kegiatan Strategis	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
	Belanja Modal Jaringan (Distribusi ke Sambungan Rumah)	540.5	M1	99,992,500	71,000,000	Bertambahnya Jaringan Distribusi Pada 5 WTP di Kabupaten Dharmasraya
	Belanja Pemeliharaan Pompa SPAM	1	Ls	130,000,000	68,792,250	Terpeliharanya Mesin Pompa Pada 5 WTP di Kabupaten Dharmasraya
	Belanja Pemeliharaan Pipa	482	m1	120,500,000	89,978,070	Terpeliharanya Jaringan Pipa pada 5 WTP di Kabupaten Dharmasraya
DINAS PERHUBUNGAN						
Pengawasan dan Penertiban Angkutan Barang Over Dimension Over Loading (ODOL)	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	3	Kegiatan	tanpa pagu	Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang Yang Melebihi Dimensi Dan Tonase Memastikan Kepatuhan Terhadap Aturan Lalu Lintas Dishub Melakukan Pemeriksaan Di Pos Pengawasan, Portal Pembatas, Dan Titik Rawan Pelanggaran	Sebagian kendaraan masih ditemukan membawa muatan melebihi ketentuan Massa Sumbu Terberat (MST) untuk Jalan Provinsi (Kelas II, MST 8 Ton). Faktor dominan adalah keterikatan kontrak dengan pemilik barang yang menuntut efisiensi biaya. tingkat kesadaran pengemudi dan perusahaan angkutan mengenai bahaya

Program Unggulan/Kegiatan Strategis	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
						ODOL masih rendah. Diperlukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk tindak lanjut penegakan hukum.
PAD Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum & Luar Badan Jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12	bulan	tanpa pagu	Target 110,000,000 Pencapaian 110,150,000 (31 Desember 2025) Optimalisasi Pendataan Titik Parkir Potensial. Realisasi Pendapatan Terus Meningkat Setiap Tahun Berkat Pengawasan Intensif	Digitalisasi Sistem Pembayaran Retribusi Parkir Melalui Qris Untuk Transparansi Dan Menghindari Kebocoran PAD Sosialisasi Tarif Resmi Dan Kewajiban Retribusi Pemutakhiran Data Titik Parkir Dan Potensi PAD Pengaturan Jadwal Petugas Dan Pengawasan Terpadu

Tabel 3.83 Progul Bupati Tahun 2025 Yang Mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Perumahan Serta Prasarana Dan Sarana Pada Kawasan Pemukiman

Program Unggulan/Kegiatan Strategis	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
DINAS PERKIMTAN						
Perbaikan rumah tidak layak huni pada kawasan kumuh	ketersediaan rumah layak huni diluar Kawasan	11	unit rumah	627,567,824	627,567,824	selesainya perbaikan RTLH 1 Kecamatan 1 Unit tersebar di 11 kecamatan

Program Unggulan/Kegiatan Strategis	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
	permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10ha					
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PK (penyusunan dokumen rp2kpkpk)		1	paket	429,903,200	429,903,200	Peraturan Bupati NOMOR 10 TAHUN 2025 terkait RP2KPKPK
Pembangunan RTLH	Pembangunan RTLH Program CSR	2	Unit Rumah	70,000,000	70,000,000	Perbaikan Rumah Warga 2 unit PB (pembangunan baru) lokasi IV koto Pulau Punjung
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya		1	paket	4,933,645,700.00	4,933,645,700.00	kegiatan APBN
Pensertipikatkan Aset Tanah Pemda		63	Sertipikat	132,940,000	132,354,250	Sertipikat Tanah Pemda

Tabel 3.84 Progul Bupati Tahun 2025 Yang Mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air

Program Unggulan/Kegiatan Strategis	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
DINAS PUPR				112,325,380,000		
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Utama Kewenangan Daerah (Inpres No. 2 Tahun 2025) — Rp 15.165.000.000 dan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Tersier (Inpres No. 2 Tahun 2025) — Rp				25,559,991,000		Output Peningkatan dan Rehabilitasi saluran sepanjang 2,163 km dengan outcome sebesar 119,15 Ha

Program Unggulan/Kegiatan Strategis	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
10.394.991.000. Kegiatan ini dilaksanakan untuk 8 (delapan) DI yaitu:						
· DI aurduri calau nag. Gunung selasih						
- DI batang asahan/sei patapahan gunung selasih						
- DI Timbulun buyieh nag.banai						
- DI Batang rambah nag.banai						
- DI Lubuk Talaok						
- DI Sarana Baru nag.taratak tinggi						
- DI sei ambacang nag.taratak tinggi						
- DI batanghari						
Jasa Konsultasi Perencanaan Irigasi	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	5	Paket	500,000,000	499,126,760	Perencanaan Irigasi untuk Usulan SIPURI
Pembangunan Pengendalian Banjir Kabupaten Dharmasraya (Tahap II)				56,390,768,000		
Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Batanghari				22,374,621,000		
Pembangunan JIAT				7,500,000,000		

Tabel 3.85 Progul Bupati Tahun 2025 Yang Mendukung Sasaran Strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Program Strategis	Unggulan/Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
DINAS KESEHATAN					1,150,000,000		
MENINGKATKAN AKSES KESEHATAN	MUTU DAN PELAYANAN	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	248,105	org			Terdeteksinya resiko penyakit pada setiap siklus hidup sebanyak 136.651 orang (55,08%)
		Operasi Katarak	42	org			Terlaksananya kegiatan operasi katarak bagi orang yang tidak mampu (37 Orang)
		Sunatan Massal	121	org			Terlaksananya kegiatan sunatan massal pada keluarga miskin (121 Orang)
		1.02.02.2.01.0014 Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	1	unit	650,000,000	643,000,000	Pengadaan Ventilator RSUD Sungai Rumbai
		1.02.02.2.02.0032 Operasional RSUD Sungai Dareh	1	pkt	500,000,000	499,963,929	Terpenuhinya ketersediaan obat di RSUD Sungai Dareh

Tabel 3.86 Progul Bupati Tahun 2025 Yang Mendukung Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat

Program Strategis	Unggulan/Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
DINAS PENDIDIKAN					5,629,093,359		
Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan sarana prasarana sekolah (Ruang kelas, MCK, Laboratorium Komputer) fokus pada pembangunan MCK (pembangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah)		1.01.02.2.01.0006 pembangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah	1	unit	148,500,000.00	148,180,753.00	Pembangunan WC sekolah SDN 05 Koto Baru
			1	unit	153,713,718.58	153,402,696.00	Pembangunan WC sekolah SDN 04 Padang Laweh
		1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1	Ruang	437,754,240.00	382,781,614.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SDN 02 Pulau Punjung
		1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	8	Ruang	218,521,800.00	217,946,589.00	Pembangunan Ruang Kelas Baru: SDN 05 Koto Besar
					218,521,800.00	217,083,683.00	Pembangunan Ruang Kelas Baru: SDN 19 Pulau Punjung
					218,521,800.00	216,811,113.00	Pembangunan Ruang Kelas Baru: SDN 11 Sungai Rumbai

Program Strategis	Unggulan/Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
					218,521,800.00	218,111,297.00	Pembangunan Ruang Kelas Baru: SDN 02 Timpeh
					218,521,800.00	217,238,160.00	Pembangunan Ruang Kelas Baru: SDN 07 Koto Besar
					218,521,800.00	217,340,178.00	Pembangunan Ruang Kelas Baru: SDN 14 Koto Baru
					218,521,800.00	217,251,862.00	Pembangunan Ruang Kelas Baru: . SDN 15 Koto Besar
					218,521,800.00	217,340,590.00	Pembangunan Ruang Kelas Baru: . SDN 03 Koto Besar
					90,300,000.00	89,525,968.00	Pengadaan Mebel Sekolah SDN 19 Pulau Punjung, SDN 15 Koto Baru, SDN 11 Sungai Rumbai, SDN 02 Timpeh, SDN 07 Koto Besar, SDN 14 Koto Baru, dan SDN 03 Tiumang
		1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium			379,687,500.00	345,078,396.00	Pembangunan Labor Komputer SMPN 3 Sitiung
					379,687,500.00	324,534,000.00	Pembangunan Labor Komputer SMPN 3 Sembilan Koto
			120	buah	96,000,000.00	95,900,001.00	Pengadaan mebel sekolah SMPN 3 Sitiung, SMPN 3 Sembilan Koto

Program Strategis	Unggulan/Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
		1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik SD	- 78	Buah	7,293,000		Pengadaan buku bahasa inggris program PKGBI pada 4 sekolah SD
		1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik SMP	- 116	Buah	15,521,000		Pengadaan buku bahasa inggris program PKGBI pada 7 sekolah SMP
		1.01.02.2.01.0042 Penyediaan infrastruktur TIK	4	Unit	47,200,000	0	Kegiatan tidak terlaksana karena kuota pemasangan starlink sudah penuh
Kesejahteraan guru , kader posyandu dan ASN		1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50	Orang/ Kegiatan	150,762,000		Pelatihan guru PJOK dalam Persiapan ekskul PKS tingkat SD dan SMP bersama Polri dan TNI
			30	Orang/ Kegiatan	84,000,000		TOT Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial (KA) untuk guru dengan Ruang Guru
			6	Orang/ Kegiatan	240,000,000	0	Kegiatan pemberian umroh bagi guru dan kepek berprestasi dilakukan di tahun 2026

Program Strategis	Unggulan/Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
		1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100	Orang/ Kegiatan	530,500,000		Pelatihan dan pendidikan keterampilan guru bahasa Inggris
Program ekstrakurikuler Math, Scient, Teknologi, Critical Thinking, Engineering dan English		1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	600	Orang/ Paket	150,000,000		Ektrakurikuler Coding dengan Ruang Guru
			600	Orang/ Paket	270,000,000		Ektrakurikuler Mathcamps dengan
			500	Orang/ Paket	250,000,000		
			300	Orang/ Paket	450,000,000		

Tabel 3.87 Progul Bupati Tahun 2025 Yang Mendukung Sasaran Strategis Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Daya Saing Daerah

Program Strategis	Unggulan/Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
DINAS PERTANIAN					1,382,763,000		
1. Penyediaan Komoditi Jagung	Sarana OVOP	Pendamping Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					

Program Strategis	Unggulan/Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
-	Pengadaan Corn Seller		3	Unit	78,000,000	66,339,100	Terpenuhinya kebutuhan sarana OVOP komoditi jagung
2.	Pemeliharaan Demplot Sawit	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	15	Ha	148,760,000	129,952,184	Terpeliharanya demplot sawit
3.	OVOP Komoditi Ayam	Pengadaan Bibit Ternak dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain					Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana OVOP komoditi ayam
-	Pengadaan Bibit Ayam - Ayam Petelur		2000	Ekor	200,000,000	200,000,000	
-	Pengadaan Bibit Ayam - Ayam KUB		5000	Ekor	50,000,000	48,750,000	
-	Belanja Mesin Pakan		8	Unit	150,400,000	144,300,000	
-	Pembangunan Rumah Pakan Ayam KUB		1	unit	50,000,000	46,102,346	
-	Pembangunan Rumah Pakan Ayam KUB		1	unit	50,000,000	46,099,773	
-	Pengadaan Pakan ternak Ayam Layer		1	Paket	43,536,000	43,025,100	
-	Pengadaan Pakan Ternak Ayam KUB		1	Paket	210,956,000	181,326,400	
-	Pengadaan Pakan Ternak Ayam KUB-PakaN Starter		1	Paket	62,916,000	62,466,000	

Program Strategis	Unggulan/Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
-	Pengadaan Pakan Ternak Kambing		1	Paket	10,000,000	9,838,000	
-	Hibah Uang Pembuatan kandang ayam spesifikasi KUB		50	unit	150,000,000	150,000,000	
-	Hibah Uang Pembuatan kandang ayam spesifikasi Layer		20	unit	75,000,000	75,000,000	
-	Hibah Uang Pembuatan kandang Kambing-		6	Unit	60,000,000	60,000,000	
4.	Pengembangan Pembibitan	UPTD Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak					Terpenuhinya kebutuhan bibit ternak sapi dan pakan ternak di UPTD Pembibitan
-	Pengadaan Pakan Ternak		1	Paket	43,195,000	42,736,000	
-	Pengadaan Sapi		20	Ekor	280,000,000	269,600,000	
5.	Sawah Pokok Murah (SPM)	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota					
-	Pelaksanaan Sekolah Lapang Sawah Pokok Murah		1	Unit	67,413,750	64,727,545	Telaksananya SPM pada Keltan. Dewi Sri
6.	OVOP Komoditi Jagung						

Program Strategis	Unggulan/Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
7. Bantuan benih padi		Bantuan Pusat (sumber dana APBN)	1834	Ha			Terlaksananya bantuan benih kepada keompok tani
8. Bantuan benih padi kaya gizi (Biofortifikasi)		Bantuan Pusat (sumber dana APBN)	500	Ha			Terlaksananya bantuan benih kepada keompok tani
9. Bantuan benih jagung		Bantuan Pusat (sumber dana APBN)	757	Ha			Terlaksananya bantuan benih kepada keompok tani
10. Bantuan benih padi gogo		Bantuan Pusat (sumber dana APBN)	209	Ha			Terlaksananya bantuan benih kepada keompok tani
11. Bantuan Alsintan Pra panen dan Pasca Panen		Bantuan Pusat (sumber dana APBN)					
Tarktor Roda 4			17	Unit			
Traktor Roda 2			29	Unit			
Handsprayer			58	Unit			
Pompa Air			28	Unit			
Rice Transplanter			9	Unit			
Combine Harvester			7	Unit			
Corn Sheller			3	Unit			
12. Bantuan Pesticida		Bantuan Pusat (sumber dana APBN)	165	Kelompok			
13. Prasarana Lahan							
OPTIMASI LAHAN (OPLAH)		Bantuan Pusat (sumber dana APBN)	95	Ha	437,000,000	437,000,000	
JARINGAN IRIGASI TERSIER		Bantuan sumber dana	15	Kelompok	2,229,337,500	2,229,337,500	

Program Strategis	Unggulan/Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
		APBD Provinsi)		Tani			
Rehabilitasi Jaringan Tersier	Irigasi	Bantuan Pusat (sumber dana APBN)	47	Kelompok Tani	10,633,500,000	10,633,500,000	
DINAS PANGAN PERIKANAN							
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Unit	46,300,000	45964000	Barang diserahkan ke masyarakat (ke Kelompok pembudidaya Ikan) Pemuda Berkarya Nagari Ampang Kuranji
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Unit	2,315,000	2290000	Dokumen perencanaan telah selesai dilaksanakan
			1	Unit	1,385,000	1304000	Dokumen Pengawasan telah selesai dilaksanakan
			1	Paket	43,750,000	42,099,999	Barang diserahkan ke masyarakat (ke Kelompok pembudidaya Ikan) Pemuda Berkarya Nagari Ampang Kuranji
			9	Buah	495,000	495,000	
			450	Liter	3,060,000	3,060,000	

Program Strategis	Unggulan/Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
			7224	Kg	72,240,000	70792200	
			7020	Kg	38,610,000	37908000	Barang diserahkan ke masyarakat (ke Kelompok pembudidaya Ikan) 1.Pemuda Berkarya, 2. Pokdakan Sungai Payang Mandiri Nagari Ampang Kuranji Kec. Koto Baru3, Pokdakan Usaha Maju dan 4 Pokdakan Talang Saiyo Nagari Taratak Tinggi Kec.Timpeh
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3000	Kg	33,000,000	32700000	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12000	Kg	72,000,000	70800000	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1000	Buah	3,000,000	2942000	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4000	Kg	120,000,000	108000000	

Program Strategis	Unggulan/Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
Kabupaten/Kota							
Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan sarana dan prasarana sekolah (Ruang Kelas, MCK, Lab Komputer)		1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	9	ruang	3,084,544,800		1. Pembangunan Ruang Kelas Baru SD N 02 Timpeh (1 ruang), 2. Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 02 SUNGAI RUMBAI (1 ruang), 3. Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 15 SITIUNG (1 ruang), 4. Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 03 PULAU PUNJUNG (2 ruang), 5. Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 05 KOTO BESAR (1 ruang), 6. Pembangunan Ruang Kelas BaruSDN 13 SITIUNG (1 ruang), 7. Pembangunan Ruang Kelas BaruSDN 13 SITIUNG (2 ruang)
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7,175	Kg	143,500,000	121975000	Barang diserahkan ke masyarakat (ke Kelompok pembudidaya Ikan) 1.Pemuda Berkarya, 2. Pokdakan Sungai Payang Mandiri Nagari Ampang Kuranji Kec. Koto Baru3, Pokdakan Usaha Maju dan 4 Pokdakan Talang Saiyo Nagari Taratak Tinggi Kec.Timpeh

Program Strategis	Unggulan/Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,000	ekor	35,000,000	34750000	Barang diserahkan ke masyarakat (ke Kelompok pembudidaya Ikan) 1.Pemuda Berkarya sebanyak 50.000 ekor , 2. Pokdakan Sungai Payang Mandiri sebanyak 50.000 ekor Nagari Ampang Kuranji Kec. Koto Baru
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,000	ekor	30,000,000	28500000	Barang diserahkan ke masyarakat ke Pokdakan(Kelompok pembudidaya Ikan) 1. Pokdakan Usaha Maju sebanyak 50.000 ekor dan 2 Pokdakan Talang Saiyo sebanyak 50.000 ekor Nagari Taratak Tinggi Kec.Timpeh
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200	Ekor	5,000,000	5000000	Pengadaan Calon induk ikan UPTD BBI (Tarantang)
			2814	Kg	14,070,000	3658200	Operasional UPTD BBI Tarantang
			380	Karung	9,500,000	7980000	
			400	Unit	10,000,000	8400000	
			278	Kaleng	12,649,000	11120000	Pengadaan cacing tubifek UPTD BBI

Program Strategis	Unggulan/Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
			937	Kg	31,080,000	26001650	Tarantang
			4562	Kg	91,240,000	80949800	
			1	Paket	60,000,000	59398839.84	
			1	Paket	3,600,000	3540000	
			1	Paket	6,000,000	5972000	
			2	Paket	60,000,000	5947193196	Pelaksanaan Rehab Kolam UPTD BBI Tarantang
			3	Unit	57,600,000	5366371479	Pembuatan Sumut Bor di UPTD BBI Tarantang
			3	Unit	1,440,000	1423000	
			3	Unit	1,728,000	1715000	
			400	Ekor	36,000,000	36000000	Induk ikan gurami di UPTD BBI Tarantang
			1200	Ekor	17,400,000	17400000	
			1	<u>Unit</u>	5,000,000	4369369	Pengadaan sedot air untuk UPTD BBI Tarantang
			1	Unit	3,000,000	2567568	Belanja mesin potong rumput UPTD BBI Tarantang
			3	Unit	6,900,000	6450000	Tengki air di UPTD BBI Tarantang
			4	Unit	3,400,000	3250000	Pompa air di UPTD BBI Tarantang
DINAS KUMPERDAG							

Program Strategis	Unggulan/Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2	Nagari	0	0	Penyusunan rantai distribusi (koperasi dan BUMNag), sasaran pasar terukur (hilir), dan kelompok Masyarakat
		Pelatihan Pengurus KDMP	52	KDMP	157,984,750	0	Kegiatan Penigkatan kapasitas SDM Pengurus Koperasi dilakukan melalui dana Dekontrasi KEMENKOP melalui Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sumatera Barat
		Rancangan pembentukan UPT/BLUD pasar	1	Dokumen	-	0	1. Rancangan UPTD 2. Usulan Rehab Pasar Prioritas 3. kajian Retribusi Pasar (Uji Petik Retribusi Pasar) 4. Optimalisasi operasional Pasar Rakyat Modern Sungai Rumbai
		KDMP 4 Pilot Project	4	KDMP	57,044,150	54501438	Terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih sebanyak 52 dan telah berbadan hukum

Tabel 3.88 Progul Bupati Tahun 2025 Yang Mendukung Sasaran Strategis Mengurangi Pengangguran

Program Strategis	Unggulan/Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							
Pelatihan Calon Tutor Bahasa Inggris/Proses Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	20	orang	140,220,750		Terlaksananya Pelatihan Calon Tutor Bahasa Inggris bagi 20 orang peserta selama 20 hari dengan instruktur dari Kampung Inggris Language Center Pare.

Tabel 3.89 Progul Bupati Tahun 2025 Yang Mendukung Sasaran Strategis Mengurangi Kemiskinan

Program Strategis	Unggulan/Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
DINAS SOSIAL							
		2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	- 190	Ibu hamil KEK			Pemberian bantuan Nutrisi, Perengkapan Kamar, Perlengkapan Sekolah dan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas.
		1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	- 1	Paket			1. Proposal SR sudah difasilitasi oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan ke Kementerian Sosial dan sudah mendapatkan persetujuan untuk dibangun Sekolah

Program Strategis	Unggulan/Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
							Rakyat di Kab. Dharmasraya untuk SR Tingkat Provinsi Sumatera Barat 2. Pelaksanaan lelang dilakukan pada bulan desember 2025 3. Sudah dilakukan clear and clean lahan oleh Tim Pembentukan Sekolah Rakyat di Kabupaten Dharmasraya
		1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	- 15	Orang penerima manfaat			Dimasukkan dalam Rencana Kerja Tahun 2026
		1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Data dari Kemensos RI desil 1-5 (10389)	Rumah Tangga			Pemutakhiran data DTSEN pada Desil 1 - 5
		-	385	Penerima Manfaat	736,668,634	100%	Pemberian bantuan Nutrisi, Sarana Kamar, Perlengkapan Sekolah dan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas.
DPMTSP							
FORUM CSR ;(1) usulan proposal yang akan	Mengajukan	Pengawasan Penanaman Modal	10	Perusahaan	19,090,650	19,068,950	Telah dilaksanakannya kegiatan forum CSR yaitu :1. Forum TSLP Sesi

Program Strategis	Unggulan/Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
diajukan kepada setiap Perusahaan kepada Bupati (koordinasi dengan Dinas PU, Sekda dan Asisten 2) termasuk prioritas jalan/jembatan.							1 pada 26 Mei 2025 terdiri dari Perusahaan Swasta Perkebunan
FORUM CSR ; (2) Pelaksanaan Forum CSR setiap bulan mengundang seluruh Perusahaan Perkebunan, lengkap dengan permintaan							2. Forum TSLP Sesi 2 pada 02 Juni 2025 terdiri dari Perusahaan Swasta, BUMN, dan BUMD.
FORUM CSR ; (2) Pelaksanaan Forum CSR setiap bulan mengundang seluruh Perusahaan Perkebunan, lengkap dengan permintaan							3. Tindak Lanjut Proposal pada 12 Juni 2025 dengan Perusahaan Swasta, BUMN, dan BUMD
Pengawasan Penanaman Modal							Jumlah dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dan dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya

Program Strategis	Unggulan/Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
		Usahanya					
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	1	kali	0	0	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
PENERTIBAN IZIN; Bersama-sama dengan Pokja Pendapatan Daerah (Satpol PP dan BKD), meningkatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) baru dari Perusahaan burung wallet, Perusahaan Jasa Makan dan Minuman, Pasar, dan perusahaan yang telah melakukan usaha namun tidak memiliki perizinan berusaha, terutama Galian C	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	500	Izin	23,303,077	23,303,077	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha. Update perizinan dari 08 April 2025 - 28 Juli 2025 yaitu 1.880 Izin	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	10200	Izin	23,303,077	23,303,077	Pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik (OSS.go.id). Perizinan Berusaha tahun 2025 : 10.072 izin,	

Program Strategis	Unggulan/Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
							Non Berusaha : 1.116 izin, Total izin tahun 2025 : 11.188 izin
PENERTIBAN Mendatangkan investasi baru sesuai dengan program prioritas Bupati yaitu: (i) Bioskop (ii) 2 Hotel dengan jaringan internasional (iii) Komplek Rest Area (SPBU, Pusat Perbelanjaan dan Food Court) (iv) Investasi Promotor acara event konser(v) Partner Perusahaan Daerah untuk tambang, pabrik kelapa sawit, PDAM dan pupuk.	IZIN;	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Kegiatan	210,000,100	0	Sehubungan dengan pembatasan kegiatan yang bersifat expo, Apkasi Expo 2025 ditiadakan sehingga anggaran dirasionalisasikan. Namun kegiatan promosi tetap dilaksanakan sesuai program prioritas Bupati dengan progres sebagai berikut: 1. Feasibility study Pabrik Kelapa Sawit dan Rice Milling telah selesai dilaksanakan oleh pihak ketiga dari Universitas Andalas (UNAND). 2. Kunjungan investor potensial dari Jepang, PT Awina dan PT Sanyo Trading, ke Kabupaten Dharmasraya untuk survei potensi investasi pada 21-22 Juli 2025..
		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	75	Orang	4,685,050	4,570,017	Tersedianya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan

Program Strategis	Unggulan/Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1	Laporan	12,499,150	12,462,600	Jumlah peraturan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	11	Kegiatan pelaku usaha	7,879,400	7,854,053	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha

Tabel 3.90 Progul Bupati Tahun 2025 Yang Mendukung Sasaran Strategis Birokrasi yang berkualitas

Program Strategis	Unggulan/Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
DINAS KOMINFO							
	Pembangunan tower Base Transceiver Station (BTS) dengan rincian 1 tower di Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan dan 2 tower di Kecamatan Sembilan Koto (Nagari Banai dan Nagari Koto nan 4 dibawah		Titik Tower	3			3 Tower BTS dari Telkomsel

Program Strategis	Unggulan/Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
BKPSDM							
Pengadaan PPPK Penuh waktu dan Paruh waktu		Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	1,802	orang	64,551,550	64,438,454	PPPK Penuh waktu 486 orang PPPK Paruh waktu 1.316 orang
Pelaksanaan Latsar bagi cpns dan orientasi PPPK Penuh waktu		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	584	orang	544,002,400	543,439,672	Latsar CPNS 98 orang Orientasi PPPK 486 orang
pelaksanaan Ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	33	orang	20,564,650	20,496,800	Ujian Dinas 30 orang ujian penyesuaian ijazah 3 orang
pelaksanaan uji kompetensi, pelantikan pejabat struktural dan fungsional, pelaksanaan sumpah janji CPNS		Pengelolaan Asesement Center	105	orang	270,585,800	225,980,603	Pelaksanaan Uji Kompetensi 25 orang pelantikan pejabat struktural dan fungsional 74 sumpah janji CPNS 1
Pengiriman peserta diklat teknis		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1	orang	67,665,700	53,165,600	
Persentase ASN yang menyusun e kinerja tepat waktu		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	98.4	persen	3,212,750	3,203,600	Jumlah ASN yang menyusun e kinerja tepat waktu 4.930
Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	31	kasus	11,744,000	11,470,100	Disiplin berat 21 Disiplin sedang 6 Disiplin ringan 4

Tabel 3.91 Progul Bupati Tahun 2025 Yang Mendukung Sasaran Strategis Pelayanan Publik yang Prima

Program Unggulan/Kegiatan Strategis	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
BAGIAN ORGANISASI						
Pembentukan UPTD Pasar	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1	Peraturan Bupati	80,229,050	Rp75,485,250.00	Terbentuknya UPTD Pasar yang ditetapkan melalui regulasi resmi (Peraturan Bupati No 14 tahun 2025 tentang TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Tabel 3.92 Progul Bupati Tahun 2025 Yang Mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup

Program Unggulan/Kegiatan Strategis	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
Dokumen perencanaan anggaran pembangunan RTH di pasar lama pulau punjung sampai bawah jembatan						
Dokumen DED RTH						
Dokumen DED pengembangan RTH Simpang Silago						
Jumlah sampah yang tertangani 3 ton/hari						
Jumlah PAD yang dihasilkan meningkat Rp. 5.000.000 se						

Program Unggulan/Kegiatan Strategis	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
bulan						
Dokumen pelanggan pelayanan persampahan						
Terwujudnya PPK BLUD UPTD PP		1	dokumen	-	-	Terbentuknya BLUD UPTD Persampahan (sedang proses di bagian hukum)
Jumlah sampah yang berkurang sejumlah 40.471,2 kg/tahun atau 40 ton/tahun						
Jumlah sampah organik yang terolah 263.062,8 kg/tahun atau 263 ton/tahun						
Dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan sampah jadi uang						
Jumlah sekolah yang melaksanakan inovasi Gagah Pisan						
Tersedianya DED pembangunan set plan baru TPA Sitiung V Rabusa						
Tersedianya anggaran untuk pembangunan set plan baru						
Terwujudnya TPA baru dengan sistem sanitary landfill						
Terlaksananya pemrosesan akhir sampah dengan sistem sanitary landfill						
Terwujudnya FS TPST Sitiung						
Terwujudnya DED TPST Sitiung						
Terwujudnya Dokling/UKL-UPL TPST Sitiung						
Terwujudnya gedung pabrik pengolahan sampah TPST Sitiung						
Terlaksananya pengolahan sampah di TPST Sitiung						

Program Unggulan/Kegiatan Strategis		Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN
Penyediaan Sarana dan Prasarana	Pengelolaan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	3	unit	565000000	565000000	3 unit alat pengolahan sampah untuk TPST Sitiung (Mesin Turbo separator Grandong, Mesin Belt Conveyor pemilah 8 meter, Mesin Conveyor feeder 6 meter)
Persampahan di Kabupaten/Kota	TPA/TPST/SPA	Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					
Penyediaan Sarana dan Prasarana	Pengelolaan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	6	unit	192000000	189,902,995	6 unit becak motor
Persampahan di Kabupaten/Kota	TPA/TPST/SPA	Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					

Sumber : BAPPERIDA Dharmasraya dan Badan Keuangan Daerah, 2025

3.5 ANALISIS EFISIENSI PELAKSANAAN PROGRAM

3.5.1 ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

Tabel 3.93 ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (OPERASIONAL RUTIN)				
		550,761,066,513.39	451,806,775,520.00	82.03
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	48,641,992,748.00	33,610,794,434.00	69.10
2	Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	3,345,706,167.65	3,255,297,111.00	97.30
3	Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air	1,138,420,000.00	1,136,505,164.00	99.83
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	116,212,362,144.00	113,856,758,287.35	97.97
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	61,059,801,228.00	60,195,890,332.96	98.59
6	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	5,224,070,870.00	3,888,764,502.24	74.44
7	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	1,407,902,950.00	1,343,003,352.00	95.39
8	Mengurangi pengangguran	3,950,593,200.00	2,874,684,450.00	72.77
9	Mengurangi kemiskinan	3,389,753,700.00	3,172,148,322.59	93.58
10	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	142,912,448,284.50	81,388,732,988.00	56.95
11	Birokrasi yang berkualitas	2,336,745,191.90	2,063,267,321.00	88.30
12	Pelayanan publik yang prima	23,092,107,311.57	22,914,304,404.44	99.23
13	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	1,743,296,500.00	1,557,849,678.00	89.36

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
14	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	13,853,461,090.00	3,969,486,220.00	28.65
15	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	2,857,312,767.00	2,606,772,837.00	91.23
16	Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	1,731,911,325.00	1,368,199,934.72	79.00
17	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	6,895,794,850.00	4,833,197,211.00	70.09
18	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	6,341,734,623.00	5,636,679,420.00	88.88
TOTAL PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA		446,135,414,950.62	349,672,335,970.30	78.38
TOTAL SELURUH ANGGARAN DHARMASRAYA		996,896,481,464.01	801,479,111,490.30	80.40

Keterangan : data yang ditampilkan di ambil dari Fungsional perangkat daerah pada SIPD

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, SIPD Dharmasraya tahun 2025

3.5.2 ANALISIS EFISIENSI CAPAIAN KINERJA

Tingkat Efisiensi dalam pengelolaan anggaran dapat dihitung menggunakan formula berikut, sebagaimana digunakan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \left(\frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \right) \times 100$$

- **PA (Pagu Anggaran)** merupakan total alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
- **CK (Capaian Kinerja)** dinyatakan dalam persentase, dengan batas maksimal perhitungan sebesar 120%.
- **RA (Realisasi Anggaran)** adalah jumlah anggaran yang telah digunakan dalam pelaksanaan program atau kegiatan.

Berdasarkan ketentuan, tingkat efisiensi memiliki rentang nilai antara **-20% hingga 20%**, di mana:

- Nilai **positif** menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran, yaitu capaian kinerja yang optimal dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari alokasi.
- Nilai **negatif** mengindikasikan adanya ketidakefisienan, yakni penggunaan anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh.

Tabel 3.94 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi (%)	Ket.
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	48,641,992,748	33,610,794,434	95.46%	26.36	EFISIEN
2	Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	3,345,706,167.65	3,255,297,111	98.12%	0.82	EFISIEN
3	Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air	1,138,420,000	1,136,505,164	116.57%	16.74	EFISIEN
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	116,212,362,144	113,856,758,287.35	99.76%	1.79	EFISIEN
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	61,059,801,228	60,195,890,332.96	102.34%	3.75	EFISIEN
6	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	5,224,070,870	3,888,764,502.24	100.24%	25.80	EFISIEN
7	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	1,407,902,950	1,343,003,352	114.50%	19.11	EFISIEN
8	Mengurangi pengangguran	3,950,593,200	2,874,684,450	108.17%	35.40	EFISIEN
9	Mengurangi kemiskinan	3,389,753,700	3,172,148,322.59	113.35%	19.77	EFISIEN
10	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	142,912,448,284.50	81,388,732,988	93.76%	36.81	EFISIEN
11	Birokrasi yang berkualitas	2,336,745,191.90	2,063,267,321	99.67%	11.37	EFISIEN
12	Pelayanan publik yang prima	23,092,107,311.57	22,914,304,404.44	117.30%	18.07	EFISIEN
13	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	1,743,296,500	1,557,849,678	96.33%	6.97	EFISIEN

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi (%)	Ket.
14	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	13,853,461,090	3,969,486,220	136.68%	108.03	EFISIEN
15	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	2,857,312,767	2,606,772,837	109.66%	18.43	EFISIEN
16	Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	1,731,911,325	1,368,199,934.72	82.77%	3.77	EFISIEN
17	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	6,895,794,850	4,833,197,211	96.43%	26.34	EFISIEN
18	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	6,341,734,623	5,636,679,420	100%	11.12	EFISIEN
TOTAL		446,135,414,950.62	214,091,550,899.02	105%	57.47	56.72

Sumber : Fungsional Perangkat daerah data diolah oleh Bagian Organisasi, 2025

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 18 Sasaran Strategis yang tertuang dalam Perjanjian kinerja tahun 2025, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Efektivitas Kinerja yang Melampaui Target

Secara akumulatif, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berhasil mencatatkan rata-rata Capaian Kinerja sebesar 105%. Hal ini menunjukkan bahwa target-target pembangunan tidak hanya tercapai, tetapi berhasil melampaui ekspektasi awal. Keberhasilan tertinggi dicatatkan pada sektor Optimalisasi Perencanaan Tata Ruang (136,68%) dan Pelayanan Publik yang Prima (117,30%).

2. Efisiensi Penggunaan Anggaran yang Signifikan

Salah satu poin paling krusial dalam laporan ini adalah tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi, dengan rata-rata Tingkat Efisiensi sebesar 57,47%. Dengan total realisasi anggaran sebesar Rp231,26 Miliar dari Pagu Rp489,56 Miliar (*Data Sementara menunggu rekon dengan BKD*), pemerintah mampu menghasilkan output kinerja di atas 100%. Ini membuktikan adanya prinsip *good governance* melalui penghematan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3. Keberhasilan Sektor Prioritas (Adat & Budaya)

Sejalan dengan visi "Nagari Beradat dan Berbudaya", sasaran strategis nomor 17 dan 18 menunjukkan performa yang solid dengan capaian masing-masing 96,43% dan 100%. Hal ini merefleksikan bahwa penguatan nilai-nilai agama dan adat telah terimplementasi dengan baik di tengah masyarakat pada fase awal kepemimpinan ini.

4. Catatan untuk Keberlanjutan

Meskipun seluruh indikator masuk dalam kategori "EFISIEN", terdapat sektor dengan realisasi anggaran yang sangat rendah namun kinerjanya tinggi (seperti Pelayanan Publik dan Pendidikan). Hal ini perlu ditelaah lebih lanjut untuk memastikan apakah terdapat optimalisasi sistem digital atau adanya potensi penyesuaian pagu pada periode anggaran berikutnya agar lebih akurat.

Secara keseluruhan, kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada periode awal 2025 berada pada kategori Sangat Baik. Kombinasi antara capaian fisik yang melampaui target dan efisiensi anggaran yang masif menunjukkan performa birokrasi yang lincah (*agile*) dan akuntabel

3.6 REALISASI ANGGARAN

3.6.1 LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Tabel 3.95 LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED ANGGARAN TAHUN 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
PENDAPATAN DAERAH	966,739,327,933.46	952,036,775,854.25	98.47
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	136,947,264,820	137,446,952,704.65	100.36
Pajak Daerah	53,158,000,000	54,319,122,273	102.18
Retribusi Daerah	73,182,745,351	73,178,734,847	99.99
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,529,319,469	5,529,319,459	99.99
Lain-lain PAD yang Sah	5,077,200,000	4,419,776,125.65	87.05
PENDAPATAN TRANSFER	811,958,696,072.35	795,949,731,714	98.02
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	766,702,365,600	750,733,734,212	97.91
Pendapatan Transfer Antar Daerah	45,256,330,472.35	45,215,997,502	99.91
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17,833,367,041.11	18,640,091,435.60	104.52
Pendapatan Hibah	100,000,000	82,698,940	82.69
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17,733,367,041.11	18,557,392,495.60	104.64
BELANJA DAERAH	969,324,397,922.01	915,611,872,582.48	94.45
BELANJA OPERASI	792,360,152,082.51	755,555,738,316.18	95.35
Belanja Pegawai	498,350,557,499.30	485,726,445,153.08	97.46

Belanja Barang dan Jasa	280,362,764,298.21	258,738,701,220.10	92.28
Belanja Hibah	13,646,830,285	11,090,591,943	81.26
BELANJA MODAL	58,010,448,699.50	45,656,214,008.30	78.70
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14,255,474,863	12,620,746,293	88.53
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24,722,171,276.50	16,965,018,966.71	68.62
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14,138,190,500	11,201,347,218.59	79.22
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,634,561,060	4,617,797,530	99.63
Belanja Modal Aset Lainnya	260,051,000	251,304,000	96.63
BELANJA TIDAK TERDUGA	1,775,000,000	196,489,050	11.06
Belanja Tidak Terduga	1,775,000,000	196,489,050	11.06
BELANJA TRANSFER	117,178,797,140	114,203,431,208	97.46
Belanja Bagi Hasil	5,134,311,500	2,800,869,072	54.55
Belanja Bantuan Keuangan	112,044,485,640	111,402,562,136	99.42
PEMBIAYAAN DAERAH	2,585,069,988.55	2,585,069,988.55	100
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4,085,069,988.55	4,085,069,988.55	100
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4,085,069,988.55	4,085,069,988.55	100
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1,500,000,000	1,500,000,000	100
Penyertaan Modal Daerah	1,500,000,000	1,500,000,000	100
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1,500,000,000	1,500,000,000	100
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1,500,000,000	1,500,000,000	100
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1,500,000,000	1,500,000,000	100
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1,500,000,000	1,500,000,000	100
PEMBIAYAAN NETTO	2,585,069,988.55	2,585,069,988.55	100
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	39,009,973,260.32	0

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
PENDAPATAN DAERAH	966,739,327,933.46	952,036,775,854.25	98.47
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	136,947,264,820.00	137,446,952,704.65	100.36
Pajak Daerah	53,158,000,000.00	54,319,122,273.00	102.18
Retribusi Daerah	73,182,745,351.00	73,178,734,847.00	99.99
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,529,319,469.00	5,529,319,459.00	99.99
Lain-lain PAD yang Sah	5,077,200,000.00	4,419,776,125.65	87.05
PENDAPATAN TRANSFER	811,958,696,072.35	795,949,731,714.00	98.02
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	766,702,365,600.00	750,733,734,212.00	97.91
Pendapatan Transfer Antar Daerah	45,256,330,472.35	45,215,997,502.00	99.91
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17,833,367,041.11	18,640,091,435.60	104.52
Pendapatan Hibah	100,000,000.00	82,698,940.00	82.69
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17,733,367,041.11	18,557,392,495.60	104.64
BELANJA DAERAH	969,324,397,922.01	915,611,872,582.48	94.45
BELANJA OPERASI	792,360,152,082.51	755,555,738,316.18	95.35
Belanja Pegawai	498,350,557,499.30	485,726,445,153.08	97.46
Belanja Barang dan Jasa	280,362,764,298.21	258,738,701,220.10	92.28
Belanja Hibah	13,646,830,285.00	11,090,591,943.00	81.26
BELANJA MODAL	58,010,448,699.50	45,656,214,008.30	78.70
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14,255,474,863.00	12,620,746,293.00	88.53
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24,722,171,276.50	16,965,018,966.71	68.62
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14,138,190,500.00	11,201,347,218.59	79.22
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,634,561,060.00	4,617,797,530.00	99.63
Belanja Modal Aset Lainnya	260,051,000.00	251,304,000.00	96.63
BELANJA TIDAK TERDUGA	1,775,000,000.00	196,489,050.00	11.06

Belanja Tidak Terduga	1,775,000,000.00	196,489,050.00	11.06
BELANJA TRANSFER	117,178,797,140.00	114,203,431,208.00	97.46
Belanja Bagi Hasil	5,134,311,500.00	2,800,869,072.00	54.55
Belanja Bantuan Keuangan	112,044,485,640.00	111,402,562,136.00	99.42
PEMBIAYAAN DAERAH	2,585,069,988.55	2,585,069,988.55	100.00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4,085,069,988.55	4,085,069,988.55	100.00
Sisa Lebih Perhitungan	4,085,069,988.55	4,085,069,988.55	100.00
Anggaran Tahun Sebelumnya			
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	100.00
Penyertaan Modal Daerah	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	100.00
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	100.00
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	100.00
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	100.00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	100.00
PEMBIAYAAN NETTO	2,585,069,988.55	2,585,069,988.55	100.00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	39,009,973,260.32	0.00

Sumber :Laporan Realisasi Anggaran Unaudited Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

3.6.2 PROGRAM PER SASARAN STRATEGIS

TABEL 3.96 ANGGARAN DAN PROGRAM PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025

Sasaran Strategis	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	KEG.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Program Penyelenggaraan Jalan	28,070,821,500	22,403,496,864	2
	Program Perlindungan Perempuan	123,703,000	105,203,613	2
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	17,206,076,998	8,590,581,869	3
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2,933,554,750	2,217,109,240	2
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	307,836,500	294,402,848	2
Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	656,733,424	648,401,200	1
	Program Pengembangan Perumahan	226,848,445	221,847,148	6
	Program Kawasan			

	Permukiman	429,903,200	426,555,013	1
	Program Peningkatan Prasarana. Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	1,899,281,099	1,826,139,500	1
	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	132,940,000	132,354,250	1
Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	1,138,420,000	1,136,505,164	4
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	90,901,999,944	18,216,628,285	23
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,216,914,950	1,038,030,806	4
	Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	297,749,000	297,491,800	2
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	23,795,698,250	22,228,030,950	16
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	58,383,155,996	17,022,344,644	4
	Program Pengembangan Kurikulum	3,045,000	3,045,000	1
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	150,000,000	145,279,000	1
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	7,843,250	6,742,700	1
	Program Pembinaan Perpustakaan	134,305,600	129,655,300	2
	Program Pengelolaan Arsip	34,531,000	33,575,700	1
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	488,594,950	364,552,314	1
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1,858,325,432	1,323,468,676	3
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	115,789,900	100,482,600	1
	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	23,250,000	23,250,000	1
	Program Perlindungan Khusus Anak	2,422,698,970	1,984,332,812	3
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	2,662,332,000	1,780,699,090	4
Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	Program Promosi Penanaman Modal	3,393,000	3,367,700	1
	Program Pelayanan Penanaman Modal	51,337,450	51,131,947	1
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	7,182,250	6,889,300	1
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	32,972,750	32,917,061	1
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	96,070,200	77,013,470	1

	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	3,838,000	3,832,800	1
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	26,148,350	26,096,430	1
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	20,936,900	20,893,750	1
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1,083,378,300	1,040,379,276	4
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	82,645,750	80,481,618	1
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1,752,217,350	1,460,156,493	3
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1,279,533,650	665,062,649	2
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	57,044,150	54,501,438	1
	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	5,439,700	5,179,500	1
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	157,984,750	-	1
Mengurangi pengangguran	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	275,220,450	269,815,470	1
	Program Penempatan Tenaga Kerja	48,230,000	46,150,800	2
	Program Hubungan Industrial	374,923,150	373,818,100	1
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	22,187,650	21,874,900	1
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	59,759,000	57,943,100	1
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	1,192,600,000	1,087,080,002	2
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1,328,910,450	1,230,155,186	1
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	13,017,800	12,968,000	1
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	7,515,850	7,280,300	1
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	61,751,950	60,999,642	2
Mengurangi kemiskinan	Program Penyuluhan Pertanian	353,406,250	350,226,245	1
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. Dan Usaha Mikro (UMKM)	11,965,400	8,637,388	1
	Program Pemberdayaan Sosial	27,243,350	27,144,710	1
	Program Rehabilitasi Sosial	311,396,000	307,838,850	2
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,077,624,200	973,320,950	2
	Program Perumusan			
Birokrasi yang bersih dan akuntabel				

	Kebijakan. Pendampingan Dan Asistensi	173,620,800	128,415,856	2
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	17,297,738,290	16,939,914,402	4
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	122,471,276,490	61,625,605,648	5
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	316,806,200	260,478,469	1
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	623,525,050	542,308,467	1
	Program Perencanaan. Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	577,750,750	569,492,848	3
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	118,407,150	116,348,466	3
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Selain Blud)	255,699,355	232,847,882	8
Birokrasi yang berkualitas	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1,046,471,005	1,039,419,152	1
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	220,989,287	17,565,500	1
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	5,751,051	5,441,200	1
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	7,922,499	7,358,050	1
	Program Kepegawaian Daerah	510,288,950	448,723,747	4
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	545,322,400	544,759,672	2
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Blud Puskesmas)	22,487,587,062	-	16
Pelayanan publik yang prima	Program Pendaftaran Penduduk	12,913,400	12,831,200	1
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12,051,850	11,861,800	2
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	10,390,000	10,320,000	10
	Program Pengendalian Penduduk	264,170,000	254,452,060	2
	Program Pencatatan Sipil	99,995,000	95,717,448	1
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	205,000,000.00	192,140,271.00	3
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	267,994,800	267,608,000	3
Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Program Penanganan Kerawanan Pangan	178,841,250	170,048,964	1
	Program Pengawasan			

	Keamanan Pangan	9,009,700	8,144,700	1
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	15,233,550	14,201,300	1
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	29,145,800	22,415,400	1
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	806,662,950	721,842,414	1
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5,410,500	4,152,200	1
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial. Dan Budaya	105,538,650	94,996,400	1
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	212,231,300	153,147,300	1
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	95,572,500	83,986,800	11
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	7,284,000	7,030,000	9
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10,371,500	10,276,200	10
Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Program Penataan Bangunan Gedung	12,118,117,690	2,265,159,300	2
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,735,343,400	1,704,326,920	4
Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	432,562,000	428,518,000	2
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	236,914,092	231,348,950	1
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	173,490,250	172,188,999	2
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	80,122,250	78,487,400	1
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	11,635,450	11,090,850	1
	Program Peningkatan Pendidikan. Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	834,178,725	825,670,060	1
	Program Pengelolaan Persampahan	1,088,410,000.00	859,468,578.00	2
Optimalisasi penyelenggaraan	Program Pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan			4

Penanggulangan bencana daerah	Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	702,553,000.00	356,787,170.00	
	Program Penanganan Bencana	101,611,000	97,320,550	1
	Program Penanggulangan Bencana	927,747,325	914,092,215	4
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	6,895,794,850	4,833,197,211	4
Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa	880,917,000	852,963,478	1
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1,156,714,435	1,155,482,685	1
	Program Pengembangan Kebudayaan	1,982,037,432	1,391,204,299	1
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	2,228,354,006	2,169,238,058	1
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	93,711,750	67,790,900	1
18		446,135,414,950.62	214,091,550,899.02	281

Sumber : Fungsional Perangkat Daerah diolah oleh Bagian Organisasi, 2025

BAB 4. PENUTUP

4.1 Ringkasan Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya selama satu tahun anggaran. Penyusunan laporan ini merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan sumber daya publik dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil pembangunan.

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2025 didukung oleh alokasi anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya sebesar **Rp966,739,327,933.46** yang digunakan untuk mendukung berbagai prioritas pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2025, secara umum capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Sebagian besar indikator kinerja mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pada sektor pembangunan manusia, capaian indikator pendidikan menunjukkan perkembangan yang baik. Indikator Harapan Lama Sekolah pada tahun 2025 mencapai **13,02 tahun**, melampaui target yang ditetapkan sebesar **12,89 tahun** dengan capaian kinerja sebesar **101,01 persen**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa program pembangunan di sektor pendidikan telah mampu meningkatkan akses pendidikan masyarakat serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Dharmasraya.

Pada sektor lingkungan hidup, indikator **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** pada tahun 2025 tercatat sebesar **72,89**, melampaui target yang ditetapkan sebesar **66,47** atau mencapai **109,66 persen dari target yang ditetapkan**. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya. Namun demikian, jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional, nilai IKLH Kabupaten Dharmasraya masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai standar kualitas lingkungan hidup yang lebih baik.

Pada sektor tata kelola pemerintahan, nilai **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2025 mencapai **67,42**. Nilai tersebut

menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, namun masih berada di bawah target yang ditetapkan yaitu **70**. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas implementasi SAKIP masih perlu terus dilakukan secara berkelanjutan.

Pada sektor pembangunan infrastruktur, indikator **rasio kemantapan jalan kabupaten** pada tahun 2025 mencapai **54,88 persen**, dengan capaian sebesar **91,47 persen dari target yang ditetapkan**. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih memerlukan percepatan pembangunan untuk mencapai target akhir RPJMD.

Secara keseluruhan, hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2025 telah berjalan cukup efektif meskipun masih terdapat beberapa indikator pembangunan yang memerlukan peningkatan pada periode pembangunan berikutnya.

4.2 Analisis Capaian Kinerja Strategis

Analisis terhadap capaian indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 menunjukkan adanya pola capaian pembangunan yang mencerminkan keberhasilan pada beberapa sektor pembangunan sekaligus menunjukkan tantangan pada sektor lainnya. Analisis pola capaian kinerja ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan pada periode berikutnya.

Secara umum, capaian indikator kinerja pembangunan Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2025 menunjukkan tren yang positif pada sektor pembangunan manusia, tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini tercermin dari beberapa indikator pembangunan yang mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pada sektor pembangunan manusia, indikator yang berkaitan dengan kualitas pendidikan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Capaian indikator Harapan Lama Sekolah yang melampaui target tahunan menunjukkan bahwa berbagai program pembangunan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Program pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta berbagai program bantuan pendidikan kepada masyarakat menjadi faktor yang mendukung peningkatan indikator pendidikan tersebut.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun nasional, capaian indikator pendidikan Kabupaten Dharmasraya masih memerlukan peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target daerah telah tercapai, pemerintah daerah tetap perlu melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu bersaing dengan daerah lain.

Pada sektor pengelolaan lingkungan hidup, capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang melampaui target menunjukkan bahwa berbagai program pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup di daerah. Program pengendalian pencemaran lingkungan, peningkatan pengelolaan sampah, serta rehabilitasi lahan kritis merupakan beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya.

Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional, nilai IKLH Kabupaten Dharmasraya masih berada pada tingkat yang relatif lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup perlu terus dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan kebijakan pengelolaan lingkungan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Pada sektor tata kelola pemerintahan, peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan adanya perbaikan dalam implementasi sistem manajemen kinerja pemerintah daerah. Peningkatan nilai SAKIP tersebut mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperkuat integrasi antara perencanaan, penganggaran, serta pengukuran kinerja.

Namun demikian, nilai SAKIP yang masih berada di bawah target menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah masih perlu diperkuat. Penguatan implementasi SAKIP perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan kinerja, penguatan sistem pengukuran kinerja, serta peningkatan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dalam proses pengambilan keputusan pembangunan daerah.

Di sisi lain, pada sektor pembangunan infrastruktur daerah masih terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur daerah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan anggaran pembangunan, kondisi geografis wilayah, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur yang cukup besar.

Pembangunan infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur daerah melalui peningkatan alokasi anggaran pembangunan serta penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Selain itu, analisis terhadap pola capaian indikator kinerja juga menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran pembangunan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas perencanaan pembangunan serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Perencanaan pembangunan yang berbasis data dan didukung oleh indikator kinerja yang jelas akan mempermudah proses pengukuran serta evaluasi kinerja pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah.

Analisis terhadap pola capaian indikator kinerja juga menunjukkan pentingnya penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program pembangunan. Banyak program pembangunan daerah yang bersifat lintas sektor sehingga memerlukan koordinasi yang baik antar perangkat daerah agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Aparatur pemerintah daerah yang memiliki kompetensi yang baik di bidang perencanaan, penganggaran, serta pengelolaan kinerja akan mampu melaksanakan program pembangunan secara lebih efektif.

Berdasarkan analisis terhadap pola capaian kinerja pembangunan daerah tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2025 telah menunjukkan perkembangan yang positif pada beberapa sektor pembangunan, namun masih memerlukan peningkatan pada sektor lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus melakukan berbagai upaya perbaikan kebijakan pembangunan agar capaian kinerja pembangunan daerah pada tahun-tahun mendatang dapat lebih optimal.

Analisis pola capaian kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah pada periode berikutnya sehingga pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.3 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah telah berjalan dengan cukup baik dan mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Sebagian besar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menunjukkan capaian yang berada pada kategori berhasil hingga sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun mampu diimplementasikan secara efektif oleh seluruh perangkat daerah.

Capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan,

penguatan sistem pengukuran kinerja, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keberhasilan dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah serta peningkatan nilai SAKIP merupakan indikator penting yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya.

Di sisi lain, hasil evaluasi kinerja juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa indikator pembangunan yang belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Dengan demikian, hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

4.4 Rekomendasi Kebijakan Strategis dan strategi implementasi SAKIP

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025, beberapa rekomendasi kebijakan strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah perlu memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan memastikan bahwa setiap indikator kinerja yang ditetapkan memiliki target yang realistis, terukur, serta relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah
2. Peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu terus dilakukan melalui penguatan integrasi antara perencanaan, penganggaran, serta pengukuran kinerja.
3. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan konektivitas wilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup melalui berbagai program yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam serta pengendalian pencemaran lingkungan.
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur perlu terus dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur.

Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi SAKIP, pemerintah daerah perlu melakukan beberapa langkah strategis antara lain meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, memperkuat sistem pengukuran kinerja, serta meningkatkan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data kinerja juga perlu ditingkatkan agar proses pengumpulan dan pengolahan data kinerja dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

4.5 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja tahun 2025, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Dharmasraya pada tahun berikutnya diarahkan pada beberapa prioritas pembangunan utama yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pembangunan infrastruktur daerah, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah daerah juga akan terus mendorong pengembangan potensi ekonomi daerah melalui penguatan sektor unggulan seperti sektor perkebunan, perdagangan, serta industri pengolahan berbasis sumber daya alam.

Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya pada tahun-tahun mendatang dapat berjalan secara lebih efektif dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pulau Punjung, Maret 2026
BUPATI DHARMASRAYA

ANNISA SUCI RAMADHANI, SH., LL. M



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 KABUPATEN DHARMASRAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUTAN RISKHA TUANKU KERAJAAN
Jabatan : BUPATI DHARMASRAYA

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pulau Punjung, Januari 2025

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKHA TUANKU KERAJAAN, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	60
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	92
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	95
2	Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	69.76
		Rasio pemukiman layak huni	Persen	90
3	Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	80
		Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	Persen	0
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	74.5
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8.98
		Harapan lama sekolah	Tahun	12.89
6	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89.5
7	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	58.71
		Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	Persen	8.83
8	Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6
9	Mengurangi kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	5.32
10	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks perilaku antikorupsi	Indeks	3.578
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	Bobot	WTP
		Hasil evaluasi AKIP	Bobot/ Indeks	BB
		Nilai LPPD	Skor	3.800
11	Birokrasi yang berkualitas	Indeks Kelembagaan	Indeks	0
		Indeks SPBE	Indeks	3.61

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
		Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	82.77
12	Pelayanan publik yang prima	Publik service indeks	Indeks	3.3
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85
13	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	0.8651
		Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	Indeks	0.7798
		Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	Indeks	0.7154
14	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	20
15	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66.47
16	Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	Indeks Resiko Bencana Daerah	Indeks	115
17	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase peningkatan zakat	Persen	20
		Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	Persen	100
18	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	Nagari	2

Program		Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	541.728.322.133
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	113.111.209.113
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.	88.252.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.	113.676.500
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	34.850.000
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	101.630.000
Program Pengelolaan Pendidikan	Rp.	54.850.179.244
Program Pengembangan Kurikulum	Rp.	25.190.000
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp.	81.850.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	1.529.998.000
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp.	402.648.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp.	170.000.000
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rp.	7.782.350.400
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.	1.481.338.000
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp.	33.450.000
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp.	2.621.042.000
Program Penataan Bangunan Gedung	Rp.	24.265.564.115
Program Penyelenggaraan Jalan	Rp.	58.200.716.631
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp.	416.323.380
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.	7.514.048.000
Program Pengembangan Perumahan	Rp.	301.444.400
Program Kawasan Permukiman	Rp.	3.801.782.500
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp.	157.821.000
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Rp.	6.885.136.710
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban	Rp.	476.869.000

Umum		
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp.	550.110.000
Program Penanggulangan Bencana	Rp.	6.692.579.200
Program Pemberdayaan Sosial	Rp.	231.498.900
Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	550.949.600
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp.	41.381.300
Program Penanganan Bencana	Rp.	162.302.600
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp.	69.077.000
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	40.667.200
Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp.	119.186.200
Program Hubungan Industrial	Rp.	44.267.000
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.	730.291.000
Program Perlindungan Perempuan	Rp.	61.759.200
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Rp.	85.525.000
Program Perlindungan Khusus Anak	Rp.	453.000.800
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp.	219.580.400
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp.	216.097.000
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp.	35.026.200
Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian	Rp.	72.500.000
Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee		
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Rp.	92.500.000
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp.	210.088.000
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.	412.328.200
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp.	128.229.400
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp.	15.993.000
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Rp.	51.145.400
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Rp.	9.891.800

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp.	16.893.000
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.	13.285.800
Program Pengelolaan Persampahan	Rp.	597.992.000
Program Pendaftaran Penduduk	Rp.	91.597.000
Program Pencatatan Sipil	Rp.	29.342.000
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.	43.244.000
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp.	34.413.200
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.	723.834.000
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.	990.233.200
Program Pengendalian Penduduk	Rp.	185.400.000
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Rp.	2.392.117.000
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Rp.	1.313.485.000
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Rp.	536.744.660
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp.	1.395.539.600
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.	74.461.000
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	Rp.	55.119.000
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp.	157.778.000
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Rp.	297.472.700
Program Promosi Penanaman Modal	Rp.	399.998.000
Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp.	143.986.000
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.	511.300.000
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp.	35.296.000
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp.	460.006.000
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp.	3.027.104.372
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp.	50.007.000
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp.	169.937.000
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp.	25.056.600
Program Pengembangan Kebudayaan	Rp.	4.555.562.165

Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp.	1.541.548.200
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp.	76.116.800
Program Pembinaan Perpustakaan	Rp.	11.144.472.000
Program Pengelolaan Arsip	Rp.	144.891.900
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp.	268.606.700
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Rp.	27.049.000
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp.	45.196.400
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp.	67.962.000
Program Pemasaran Pariwisata	Rp.	145.832.000
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rp.	36.206.000
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.	2.090.451.650
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.	3.776.039.100
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp.	859.972.500
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp.	15.200.000
Program Penyuluhan Pertanian	Rp.	692.077.500
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	27.738.800
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp.	17.150.600
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp.	95.109.200
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp.	584.270.000
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp.	10.441.400
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp.	7.013.399.100
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp.	783.567.700
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Rp.	17.986.078.500
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	588.102.200
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	556.673.900
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	115.958.136.600
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.	494.329.000
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.	679.726.600
Program Kepegawaian Daerah	Rp.	1.200.899.000

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp.	1.012.724.000
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp.	151.174.100
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.	712.887.600
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp.	690.212.400
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp.	1.186.069.600
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp.	2.439.973.480
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp.	34.983.000
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp.	424.000.200

TOTAL ANGGARAN 2025

Rp 1,101,791,542,379.00

Pulau Pinang, Januari 2025

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA TUANKU KERAJAAN, SE